

**STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

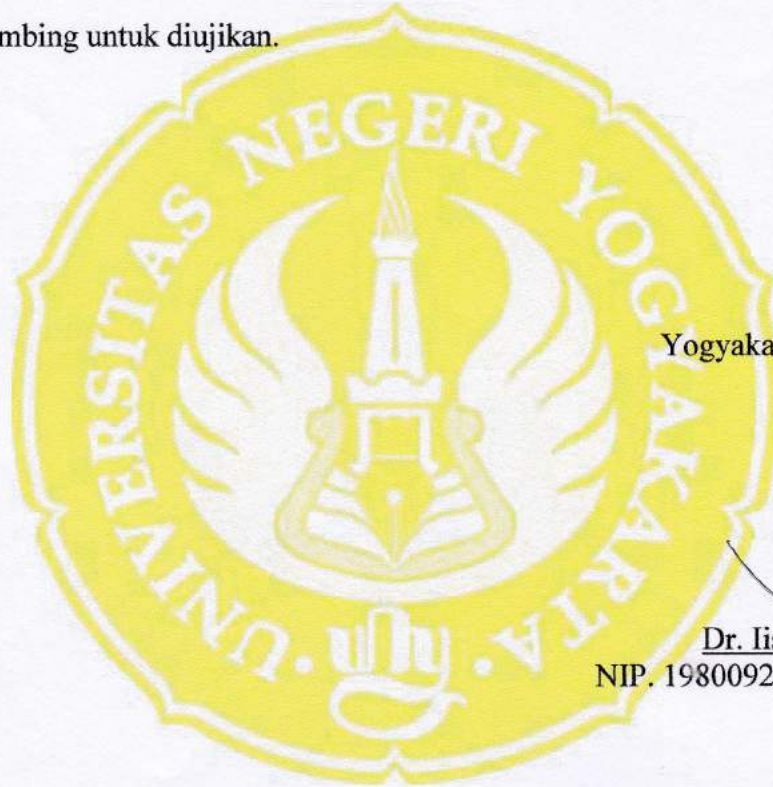


Oleh  
Laila Nur Rosyidah  
NIM. 12102241036

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
JULI 2016**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG” yang disusun oleh Laila Nur Rosyidah, NIM 12102241036 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 1 Juni 2016

Pembimbing

Dr. Iis Prasetyo, M.M  
NIP. 19800924 200501 1 002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 06 Juni 2016

Yang menyatakan,



Laila Nur Rosyidah  
NIM 12102241036




## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG" yang disusun oleh Laila Nur Rosyidah, NIM 12102241036 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni 2016 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Iis Prasetyo, M.M.	Ketua Penguji		19 - 07 - 2016
Widyaningsih, M.Si.	Sekretaris Penguji		18 - 07 - 2016
Dr. Ibnu Syamsyi, M.Pd	Penguji Utama		18 - 07 - 2016

Yogyakarta, 21 JUL 2016  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



  
Dr. Maryanto, M.Pd  
NIP. 19600902 198702 1 001

## MOTTO

“Hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Jangan mematok diri sendiri baku beku, mengklaim monopoli heroisme. Gelora hati harus disetir oleh otak yang pandai berkalkulasi, namun otak harus dijiwai hati”

(Y.B. Mangunwijaya)

*“It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see.”*

(Winston Churchill)

*“Do It Yourself”*: menjadi pribadi yang lebih baik dari yang lainnya, menjadi senyum bagi orang lain, dan menjadi dorongan untuk orang lain”

(Laila Nur Rosyidah)

## **PERSEMBAHAN**

Atas karunia Allah SWT

Karya ini akan saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya dan memanjatkan doa – doa yang mulia untuk keberhasilan penulis dalam menyusun karya ini.
2. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu besar.
3. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan pengalaman yang luar biasa.

# **STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG**

Laila Nur Rosyidah, NIM.12102241036, Pendidikan Luar Sekolah

[ellaplsuny@gmail.com](mailto:ellaplsuny@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Seberapa besar tingkat implementasi tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang. (2) Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang (3) Solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai standar pelayanan Minimal pendidikan kesetaraan paket B Kota Magelang

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Pendidikan Kesetaraan Paket B. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara kepada: pegawai dinas pendidikan, tutor, pamong belajar, warga belajar. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah Triangulasi data, *display* data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari berbagai indikator standar pelayanan minimal dalam aturan Permendiknas 129a/U/2004 hanya 45 persen saja yang memenuhi standar pelayanan minimal yang ada. (2) lulusan dari pendidikan kesetaraan yang melanjutkan pendidikan berjumlah 20 persen, 70 persen memilih untuk bekerja, sedangkan yang 10 persen tidak melapor. (3) sarana dan prasarana terkendala pada management anggaran dan pengelolaan buku. (4) Standar pendidik dan tenaga pendidik belum sesuai dengan kualifikasi nasional dikarenakan berbagai hal salah satunya masalah jaminan kesejahteraan.

Kata kunci: Implementasi, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B Di Kota Magelang” dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan skripsi
2. Ketua program Studi Pendidikan luar sekolah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tugas skripsi.
3. Dr. Iis Prasetyo, M.M. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
5. Bapak Sahid selaku Kepala PNF Dinas Kota Magelang yang telah memberikan ijin dan bantuan untuk penelitian.



6. Bapak dan Ibu Pengelola PKBM Kuncup Mekar, PKBM Upaya Terampil, PKBM Permata serta masyarakat setempat yang telah berkenan membantu dalam penelitian.
7. Bapak, Ibu dan Adikku atas doa, perhatian, kasih sayang dan segala dukungannya.
8. Teman – teman Jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2012 yang memberikan bantuan dan motivasi untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat menjadi amal dan mendapatkan balasan kebaikan dari Alloh SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama pemerhati Pendidikan Luar Sekolah dan pendidikan masyarakat serta pembaca umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 20 April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori .....	11
B. Penelitian yang Relevan .....	42
C. Kerangka Berfikir.....	43

D. Pertanyaan Penelitian .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	46
B. Tempat dan waktu Penelitian .....	47
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Objek Penelitian .....	48
E. Setting Penelitian.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Instrument Penelitian.....	53
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian .....	58
1. Letak Geografis .....	58
2. Visi Misi Pemerintah Kota Magelang .....	60
3. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan.....	63
B. Hasil Penelitian .....	67
1. Ketercapaian SPM PNF Data Dasar .....	67
2. Kendala Pencapaian SPM PNF .....	81
3. Solusi Pencapaian SPM PNF .....	85
C. Pembahasan .....	88
1. Ketercapaian SPM PNF Data Dasar .....	88
2. Kendala Pencapaian SPM PNF .....	100
3. Solusi Pencapaian SPM PNF.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN.....	110

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pembagian Kebijakan .....	32
Tabel 2. Perbandingan SNP dan SPM.....	40
Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Servie Triangle.....	37
Gambar 2. Kerangka Berpikir .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	109
Lampiran 2. Catatan wawancara .....	114
Lampiran 3. Rekap Data .....	147
Lampiran 4. Reduksi, Display dan Kesimpulan .....	177
Lampiran 5. Catatan Lapangan .....	227
Lampiran 6. Dokumentasi Foto.....	243
Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian .....	245

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan yang sejatinya adalah bahan pokok untuk mencetak penerus bangsa yang besar dan memiliki martabat hanya mampu disentuh oleh orang-orang elit saja. Angka putus sekolah Indonesia berada pada titik yang sangat kritis sekali Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 Provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk.

Bagaimana dengan nasib anak bangsa Indonesia dimasa yang akan datang, jika pendidikan masih begitu carut marut seperti ini. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pendidikan memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi konstribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial.

Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada sebenarnya sudah banyak dilakukan seperti program wajib belajar 9 tahun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Dengan ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan yang ada. Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan

pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 2001 hingga sekarang telah terjadi berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tak terkecuali dengan dunia pendidikan. Otonomi daerah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mempunyai pengaruh yang sangat strategis dari segi tatanan politik, hukum dan ekonomi. Bermula dari ingin memperbaiki salah satu mekanisme partisipasi yang sebelumnya dari *Top-Down* ke *Bottom Up* dengan maksud pemberian kewenangan ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut juga menuntut untuk dilaksanakan secara mandiri dari mulai perencanaan, pembangunan serta pembiayaannya. Namun harus memberikan manfaat yang besar bagi daerahnya.

Otonomi daerah harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi, namun harus ada beberapa hal dipenuhi dengan baik seperti tugas, wewenang dan kewajiban yang mana sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut dengan maksud untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pemberlakuan otonomi daerah pemerintah juga

memiliki andil yang sangat besar termasuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar otonomi daerah dapat sejalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan yang ada dapat berjalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya yang berkaitan adalah mengenai standar pelayanan minimal pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.

Sasaran pembangunan dalam dunia pendidikan dari hari ke hari semakin meningkat, dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Namun dalam berbagai hal untuk mewujudkan kebijakan tersebut harus ada keterkaitannya antara pendidikan dan sosial budaya yang ada. Sehingga sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang seharusnya dicapai tahun 2014, terdapat 9 poin yaitu meningkatkan proporsi satuan pendidikan yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Pemenuhan 27 item Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sampai saat ini masih kedodoran. Menurut Edukasi [kompas.com](http://kompas.com) berdasarkan data yang ada hingga September 2011, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sistem Pelayanan Minimal di Indonesia masih tergolong rendah, dilihat dari hasil kajian tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.

Sasaran pembangunan dalam dunia pendidikan dari hari ke hari semakin meningkat, dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Namun dalam berbagai hal untuk mewujudkan kebijakan tersebut harus ada keterkaitanya antara pendidikan dan sosial budaya yang ada. Sehingga sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang seharusnya dicapai tahun 2014, terdapat 9 poin yaitu meningkatkan proporsi satuan pendidikan yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Pemenuhan 27 item Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sampai saat ini masih kedodoran. Menurut Edukasi kompas.com berdasarkan data yang ada hingga September 2011, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Uni Eropa di 110 Kotaupaten/Kota di 16 Provinsi ini membuktikan kalau kinerja umum pendidikan di Indonesia bagian timur lebih rendah.

Menurut pendapat Adi Estry Standar Pelayanan Minimal (SPM) sendiri merujuk pada 27 kondisi wajib bagi kegiatan belajar yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Contohnya, SPM mendorong ketersediaan buku-buku



pelajaran, laboratorium sains dan keberadaan guru-guru yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta didik. SPM sangatlah penting karena standar ini merefleksikan pernyataan tegas bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak terhadap pendidikan minimal.

Evaluasi Kinerja (EK) adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal. Evaluasi Kinerja (EK) dirancang untuk mengetahui mutu, manajemen, dan kinerja terhadap standar pelayanan minimal yang mana dari hasil Evaluasi Kinerja ini bisa menjadi bahan pertimbangan pengembangan sebuah lembaga. Dari hasil Evaluasi Kinerja ini dapat diperoleh hasil nilai atau skor yang diperoleh oleh lembaga dalam berbagai hal kategori yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan ini dijabarkan dalam 8 standar. Standar tersebut yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Namun untuk EK hanya memuat 4 aspek yaitu Aspek Pengelolaan, Aspek Pembiayaan, Aspek Pemasaran, dan Aspek Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh BAN-PNF hasil evaluasi dikategorikan pada Grade C yang mana masih banyak yang perlu diperbaiki. Hasil rata-rata di Kota Magelang sebagai berikut, dengan nilai pemasaran yang hanya mencapai 1335 dimana maksimalnya 3500, aspek daya manusianya yang hanya mencapai 1000 yang seharusnya bisa mencapai angka 2250, dan untuk aspek pengelolaan hanya bisa mencapai 1900 dengan nilai

maksimal seharusnya mencapai 3250, aspek keuangan yang sangat rendah hanya mencapai 52 % yaitu dari maksimal nilai yang ada.

Bersaing dengan lembaga lain dan mengikuti setiap ritme perubahan, maka pendidik dan tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan inovasi, dimana ide, proses atau model manajemen program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan belajar dapat dijamin berlangsung dan berkembang.

Inovasi dalam manajemen program pendidikan, tentunya tidak semua pendidikan dan tenaga pendidikan memiliki kemampuan hal itu, sehingga tidak jarang ditemui manajemen program pendidikan yang dirasa usang dan sudah ketinggalan jaman sehingga tidak mampu bersaing dengan yang lainnya. Sehingga tak jarang tidak mencapai tujuan pendidikan secara maksimal.

Menurut D. Sudjana (2010:17),

“Implementasi manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan pengembangan terhadap segala upaya dalam mengatur dan memdayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan Organisasi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan mengembangkan upaya sebagaimana dikemukakan diatas, terhadap pembaharuan atau perubahan secara inovatif”

Model program pendidikan non formal yang ada sekarang ini masih minim sekali dalam berinovasi atau dikembangkan dengan baik. Bahkan tak jarang tidak menggunakan prinsip-prinsip proses inovasi, kondisi sosial, nilai dan keyakinan yang telah ada, sehingga tak jarang ide-ide baru yang diberikan oleh masyarakat yang mana dibutuhkan tak jarang terabaikan, terkalahkan oleh keinginan individu

maupun lembaga. Padahal dalam sebuah inovasi konsistensi dalam hal-hal tersebut adalah hal yang wajib.

Model Standar Pelayanan Minimal ini, menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat aspek-aspek yang diujikan yang dijadikan pedoman sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Sehingga apabila dari Standar Pelayanan Minimal sudah bisa berjalan beriringan dengan manajemen dan inovasi pendidikan yang lainnya, maka tak dipungkiri keterkaitan satu sama dengan yang lain menjadi patut untuk diteliti. Agar bisa menjadi salah satu fondasi terhadap pengembangan model program pendidikan nonformal yang selanjutnya bisa lebih baik dan menunjang bagi terselenggaranya program pendidikan nonformal yang efektif dan efisien serta memiliki mutu yang bersaing dengan pendidikan formal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat model standar pelayanan minimal pendidikan nonformal dilihat dari peraturan Permendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Non Formal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pergeseran pemerintahan yang sentralisasi menuju desentralisasi.
2. Dari 201.557 sekolah baik SD, SMP, dan SMA di Indonesia, 40,31% nya di bawah Standar Pelayanan Minimal.
3. Masih banyak lembaga yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
4. Proses belajar mengajar masih belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

5. Kurangnya inovasi dalam penerapan sistem standar pelayanan minimal.
6. Kurangnya penghargaan yang dimiliki di bagian pendidikan non formalnya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang ingin diteliti lebih terfokus dan mendalam. Dari berbagai lembaga non formal yang ada di Indonesia ini, masih banyak yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal dengan baik, maka perlu diadakanya penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Yang mana difokuskan dalam studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal pendidikan kesetaraan Paket B. Lembaga-lembaga yang akan menjadi sarana adalah lembaga non formal yang ada di Kota Magelang. Permasalahan ini diatasi menggunakan peraturan Permendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Non Formal.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah mengenai :

1. Seberapa besar tingkat Implementasi Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
2. Apa Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui seberapa besar tingkat implementasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang.
2. Mengetahui kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Kesetaraan Paket B di Kota Magelang
3. Mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan kesetaraan paket B Kota Magelang

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan:

- a. Menjadikan sebuah rujukan baru khususnya tentang Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang.
- b. Memberikan salah satu wujud kemajuan pendidikan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga

Memberikan kontribusi yang lebih dalam memajukan pendidikan dengan menjadikan bahan penelitian ini sebagai salah satu bahan evaluasi untuk kemajuan bersama.



b. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang dunia pendidikan memberikan pengalaman yang relevan untuk menjadi calon pendidik di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pendidikan Non Formal**

##### **a. Definisi pendidikan**

Pendidikan adalah sebuah proses melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. Pendidikan menurut Hills (Nurhadi Fuad: 2014: 98) adalah, “*education is a process of learning aimed at equipping people with knowledge and skills. There are to be enough to equip people sufficiently well so as to enable them to live satisfactorily, continue to learn and pursue career*”

Di dalam melaksanakan pendidikan menurut tokoh pendidikan awal bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, dikemukakan bahwa perlu diterapkan tiga pilar pendidikan yang sering dikenal sebagai *Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani* yang maknanya kurang lebih adalah jika berada didepan pendidik menjadi sebuah teladan, jika ditengah dapat memberikan motivasi, dorongan dan kreasi yang inovatif, dan yang ada dibelakang memberikan sebuah semangat baru. Dalam hal ini UNESCO juga sangat menjunjung tinggi mengenai 4 pilar yang mana berkaitan dengan dunia pendidikan non formal yaitu tentang *Learning to Know* (belajar mengetahui), *Learning To Do* (belajar melakukan sesuatu), *Learning To Be* (belajar menjadi sesuatu) dan *Learning To Live Together* (belajar hidup bersama).

Cak Nur menuliskan dalam tajuk “Sedikit tentang Pendidikan Islam” menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan utama adalah pendidikan moral atau

akhlak dan pengembangan kecakapan atau keahlian. Dari berbagai pendapat tersebut tentang pendidikan bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah hak segala umat manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2004 (Kompas, 2011: 6).

Memasuki era abad ke 21 ini tantangan yang kita hadapi semakin kompleks dalam semua aspek kehidupan. Keberlangsungan kehidupan bangsa ini hanya tergantung pada kemampuan kita dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul secara bersamaan. Seperti dalam bidang politik mengarah pada demokratisasi, dalam bidang ekonomi akan terjadi liberalisasi dan yang jelas adalah dalam bidang sosial budaya mengarah pada universalisasi sebuah nilai. Institusi sosial yang mana memiliki sebuah peran strategis dalam menjawab tantangan yang ada. Namun selama ini peran tersebut belum dapat dilakukan secara optimal. Pendidikan belum melakukan perubahan apalagi rekonstruksi yang memiliki makna secara luas. Hal ini disebabkan karena pendidikan masih belum berorientasi pada proses pemberdayaan.

Hal ini kita perlu melakukan perubahan orientasi, yaitu pada pelaku pendidikan dan program pendidikan. Para pelaku pendidikan harus mampu membuka pandangan-pandangan baru yang ada dengan ilmu-ilmu lain sehingga mampu memiliki pandangan yang komprehensif dan bisa bersaing secara sehat. Tidak lupa, pendidikan juga harus berorientasi pada fungsi pengetahuan, proses pendidikan, kontekstual dalam program pendidikan, dan tidak lupa berbasis pada budaya lokal dan transformatif.

## **b. Pendidikan Non Formal**

Pendidikan *non formal* terasa berjalan ditempat, sebenarnya masyarakat menginginkan pendidikan *non formal* ini berkembang secara berkualitas dan berkuantitas karena masyarakat ingin meningkatkan kualitas hidupnya.

Standar nasional pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2005, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Saleh Marzuki (2012: 79) mendefinisikan bahwa:

Pendidikan non formal adalah proses belajar terjadi secara terorganisir di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat diartikan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan dengan jangka yang relatif singkat yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang bersifat fungsional untuk kehidupan masa kini dan masa depan.

Menurut D. Sudjana (2004: 141) pendidikan non formal dapat ditampilkan dalam pemecahan masalah pendidikan formal, yaitu sebagai:

### **1) Pelengkap (*Complementary Education*)**

Pendidikan non formal dapat menyajikan berbagai mata pelajaran atau kegiatan belajar yang belum termuat di dalam kurikulum pendidikan formal sedangkan materi pelajaran atau kegiatan belajar tersebut sangat dibutuhkan

oleh anak didik dan masyarakat yang menjadi layanan pendidikan formal tersebut

### 2) Penambah (*Suplementery Education*)

Pendidikan non formal dapat memberi kesempatan tambahan pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang sama disekolah kepada mereka yang masih bersekolah atau mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan formal.

### 3) Penganti pendidikan non formal (*Substitute Education*)

Pendidikan non formal dapat mengganti fungsi sekolah didaerah-daerah yang karena berbagai alasan penduduknya belum terjangkau oleh pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan (Paket A,B dan C) adalah contoh-contoh fungsi sebagai penganti ini.

Pendidikan yang sejatinya untuk mencerdaskan, harus memiliki fungsi yang sama dalam mewujudkan hal itu, tak jauh berbeda dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang mana bersama-sama membina dan mengembangkan manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas tidak identik dengan manusia pandai, tetapi tidak setiap manusia pandai itu cerdas. Manusia cerdas asli mempunyai kemampuan dalam merespons dengan cepat terhadap lingkungan hidupnya.

### c. **Pendidikan Kesetaraan**

Standar proses pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan

dapat ditempuh melalui kegiatan tatap muka, tutorial, mandiri dan/atau kombinasi ketiganya.

*Community-based Education* (pendidikan berbasis masyarakat selanjutnya disebut CBE atau menurut Campton dan H Mc Clusky dalam Ara Hidayat ( 2012: 252) disebutkan dengan istilah *Community Education* merupakan sebuah “sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup”. “Kemudian CBE didorong oleh arus globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam suatu hal, termasuk di dalamnya pendidikan, dalam situasi semacam ini pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat” (Mastuhu 2003: 86).

Secara konseptual, sebagaimana yang ditulis oleh Winarto Suhakhmal dan dikutip oleh Zubaidi (Ara Hidayat:2012:131) CBE adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat

Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Oleh karena itu, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk

mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang dilakukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Menurut Umbrerto Sihombing dalam buku *Pengelolaan Pendidikan*, konsep, prinsip dan aplikasi mengelola pesantren dan madrasah (2012:253) menyebutkan bahwa terdapat lima aspek dalam pelaksanaan CBE yaitu:

*Pertama*, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di dalam masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan dan ada kalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab kehadiran teknologi itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena dipaksakan. Hal inilah yang membuat masyarakat rapuh.

*Kedua* adalah kelembagaan artinya ada wadah yang statusnya jelas memiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat. Disini digugah dan ditumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengadaan, pengantian dan pemeliharaan lembaga.

*Ketiga* adalah sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu program harus digali berdasarkan potensi lingkungan yang dimiliki.

*Keempat* adalah kepemilikan program, artinya kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah.

*Kelima* adalah organisasi, artinya pengelola pendidikan tidak menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan lain.

## **2. Standar Nasional Pendidikan**

Perbedaan kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang, karakteristik, kecepatan dan kesempatan belajar peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, diperlukan standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan nonformal khususnya pada pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Pemerintah pusat seringkali hanya berorientasi nilai dan kelulusan sehingga, berupaya meminimalisir kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional. Standar nasional mengamanatkan adanya delapan standar yang harus ditetapkan oleh pemerintah guna menghindari kesenjangan kualitas pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Ujian nasional merupakan salah satu perangkat yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan sebagai salah satu penetapan dan pemberlakuan berbagai standar pendidikan.



Fungsi dan Tujuan standar nasional pendidikan

- 1) Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- 2) Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- 3) Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan dalam peraturan pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 meliputi:

a) Standar Isi

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005, mencakup:

- 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang mencakup pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.

- 2) Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
- 3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
- 4) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b) Standar Proses

Standar dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005, mencakup:

- 1) proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- 2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- 3) setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

#### c) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

#### d) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- 1) Kompetensi pedagogik
- 2) Kompetensi kepribadian
- 3) Kompetensi profesional, dan
- 4) Kompetensi sosial

Pendidik melaksanakan pendidikan pada TK/RA, SD/MI, SMP,MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dan pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah/madrasah pengawas satuan pendidikan,

tenaga administrasi, tenaga perpustakaan satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

e) Standar Sarana Dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib mewakili prasarana yang memiliki lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f) Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pengelolaan adalah Permen No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

g) Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan model kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air dan jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h) Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan non formal terdiri dari:

- 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik
- 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- 3) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

- 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik
- 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2004 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

### **3. Standar Pelayanan Minimal**

#### **a. Pengertian Standar Pelayanan Minimal**

Standar pelayanan minimal (*minimal service standart*) merupakan suatu istilah dalam kebijakan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pemenuhan tersebut Oentarto, dkk. (2004: 173) menyatakan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen).

Adapun nilai strategis tersebut yaitu: *pertama*, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan, *kedua*, bagi masyarakat standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai agen mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Selanjutnya bila ditelaah lebih dalam maka pengertian standar pelayanan minimal di atas terkait pula dengan konsep manajemen kinerja (*performance management*). Pendapat Berntein yang dikutip dalam buku Sistem Manajemen Kinerja Otonomi Daerah, Lan (2004: 18) menyatakan bahwa sebagai sebuah

sisem yang terintegrasi, manajemen kinerja diyakini dapat digunakan untuk mendukung keputusan, peningkatan kualitas pelayanan dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2010, Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar atau SPM pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007. Urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Oleh karena itu penyelenggaraan standar pelayanan minimal adalah kewenangan kabupaten/kota.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomer 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan pendapat di atas maka pengertian standar pelayanan minimal menyangkut dua konsep utama yaitu: “tolak ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan dan acuan mengenai kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan”. Adapun yang dimaksud dengan konsep tolak ukur penyediaan layanan ialah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan (pemerintah daerah) yang ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki (sumber daya manusia, perlengkapan dan pembiayaan serta sumber daya pendukung lainnya).

Sedangkan konsep acuan kualitas dan kuantitas bagi penggunaan layanan (masyarakat) adalah kondisi yang dapat diperoleh dari penyedia layanan (pemerintah daerah) terkait pelayanan publik yang diberikan. Dengan demikian “minimal” dalam pengertian “standar pelayanan minimal” merupakan kondisi “minimal” dari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung arti “optimal” bagi aparat pemerintah daerah. Atau dengan kata lain bahwa standar pelayanan minimal merupakan istilah dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas dan kuantitas yang dapat diterima dari pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik.

Prinsip-prinsip penyusunan SPM pendidikan terdapat dalam Lampiran 1 Permendikbud Nomer 23 Tahun 2013. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Ditetapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- 2) Diberlakukan untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota, SPM dimaksudkan untuk menjamin terjadinya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu.
- 4) Merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya:



- 5) Bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat.
- 6) Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal perlu adanya kriteria yang bertujuan untuk mengukur hal tersebut. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan indikasi suatu inisiatif disebut Praktek baik (*Good Practice*) adalah:

1. Kentalnya unsur *governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada praktik baik tersebut.
2. Relatif baru pendekatannya atau penerapannya di suatu daerah dan memiliki daya tarik untuk disosialisasikan kepada wilayah lainnya. Ada pelajaran yang bisa diambil.
3. Memiliki kepedulian yang besar dari masyarakat, kepala daerah, dan media. Hasil penerapan inisiatif memiliki pengaruh yang besar dan penerapan inisiatif berkelanjutan. Misal: adanya penandatanganan maklumat atau MOU dihadiri yang disaksikan oleh Bupati/Walikota/Gubernur dan banyak orang sehingga kegiatan itu bisa dianggap sudah bisa merubah perilaku pihak yang terkait (SKPD atau masyarakat).
4. Telah terjadi perubahan di unit pelayanan, dinas dan/atau di masyarakat (misal: memberikan layanan sesuai dengan standar SPM dan telah dipublikasikan).
5. Sudah mulai diimplementasikan atau diterapkan di unit layanan atau dinas/SKPD.

6. Berpotensi meningkatkan kinerja unit layanan atau SKPD/Dinas (misal: jumlah guru cukup dan terdistribusi dengan merata). Ada perbedaan sebelum dan sesudah inisiatif diterapkan. Lebih baik jika ada data perbandingan sebelum intervensi dan sesudah intervensi.
7. Inisiatif dapat diterapkan ke daerah/wilayah lain.

Contoh lain praktik baik perlu diidentifikasi dan dipelajari kemungkinan implementasinya di daerah kita, meskipun persoalan pendidikan relatif sama antar satu daerah dengan daerah lain, namun dalam implementasinya perlu penyesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial politik dan budaya lokal.

#### **4. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal**

##### **a. Definisi Kebijakan publik**

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Sedangkan menurut Mustopasidjaja, Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002 : 231). Model Kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikan dapat dikelola oleh para analisis kebijakan.

Beberapa pendapat lain mengenai definisi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Frederick menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

- 2) Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- 3) Raksasataya, kebijakan sebagai trik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

Suatu kebijakan memuat tiga element yaitu: a) identitas dari tujuan yang ingin dicapai, b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan c) penyediannya berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Untuk melahirkan suatu produk yang baik, kebijakan harus terlebih dahulu melalui proses perumusan dan penelitian yang memadai agar terhindar dari gugatan atau tantangan pihak lain dikemudian hari.

#### **b. Proses kebijakan**

Sebelum suatu kebijakan diambil, maka ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Pembuatan kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

- a) Penyusunan masalah-masalah apa yang akan diangkat dan masalah apa yang akan ditunda atau tidak dibicarakan sama sekali

- b) Perumusan kebijakan hasil dari perumusan yang berupa kebijakan
- c) Dukungan atas kebijakan, baik dari legislatif, pemimpin lembaga atau putusan pengadilan
- d) Implementasi kebijakan pelaksanaan oleh instansi terkait
- e) Penilaian kebijakan apakah kebijakan yang dibuat telah memenuhi persyaratan

**c. Jenis-jenis kebijakan publik**

**1) Desentralisasi**

Ada satu hal yang hilang dan sangat penting dalam dunia pendidikan utamanya diiringi dengan perubahan kebijakan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam dunia pendidikan. Dewasa ini pendidikan kita banyak kehilangan kekuatan yang sangat diagung-agungkan, sehingga pendidikan Indonesia kehilangan apa yang menjadi tujuan dan lupa dengan apa yang akan diperjuangkan bersama.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Desentralisasi pendidikan adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (2012 :50). Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi pemerintah daerah. Pada mulanya istilah desentralisasi digunakan dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerah kewenangan.

Desentralisasi menurut Pondinelli dalam Pengelolaan Pendidikan (2012:50) mempunyai empat bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi (pengalihan) dan privatisasi. Pertama dekonsentrasi adalah pembagian sebagian kewenangan atau tanggungjawab administratif ketingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pemerintah pusat, pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke staf atau kantor diluar ibukota atau pemerintah pusat. *Kedua* delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus, kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di kewenangan untuk mengambil keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi daerah. *Keempat* privasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat.

Keempat bentuk tersebutlah yang menjadi model desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah model devolusi. Desentralisasi dan pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2) Prinsip Desentralisasi Pendidikan**

Secara konseptual, terhadap dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaanya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Provinsi dan Distrik), dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang menfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar ( Inom Nasution, 2010: 6)

## **3) Otonomi daerah**

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

menurut perkara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerinth yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Matrik pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

**Tabel 1. Pembagian kebijakan**

No	Sub urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendiddikan nonformal.
2.	Kurikulum	a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.	a. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	a. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3.	Akreditasi	a. Akreditasi akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikannon formal	-	-
4.	Pendidik dan tenaga	a. Pengendalian formasi pendidik,	a. Pemindahan pendidik dan	a. Pemindahan pendidik dan

	pendidik	<p>pemindahan pendidik dan pengembanagn karier pendidik.</p> <p>b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Provinsi.</p>	<p>tenaga kependidikan lintasdaerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Deraha provinsi</p>	<p>tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota</p>
5.	Perizinan Pendidikan	<p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat</p> <p>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>
6.	Bahasa dan sastra	<p>a. Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia</p>	<p>a. Pembinaan dan sastra yang penuturanya lintas Daerah kabupaten/Kotadal am 1(satu) daerah provinsi</p>	<p>a. Pembinaan bahasa dan sastra yang penutupan dalam daerah kabupaten/ kota.</p>

## 5. Implementasi

### a. Definisi Implementasi

Implementasi menurut Van Horn dan Van Meter ( Wahab, 2008 : 89) yang merumuskan implementasi sebagai:

*“Those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* ( tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta



yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sementara menurut Lester dan Stewart (2000: 104) mendefinisikan implementasi sebagai:

*“The stage of the police process immediately after the passage of a law. Implementation viewed most broadly, means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted laws into effect in an effort to attain policy or program goals”*

(Tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian Undang-Undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.)

#### **b. Implementasi Kebijakan**

Studi Implementasi Menurut George C. Edwards (Hepikus: 2012: 6) adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antar pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Dalam hal ini bisa diartikan apabila dalam sebuah kebijakan tidak dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakan itu dilakukan dengan

baik. Sedangkan suatu kebijakan akan mengalami kegagalan apabila dalam implementasi tidak dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan implementasi kebijakan terkadang banyak kendala yang tidak terduga. Proses Implementasi kebijakan sendiri bisa dikatakan sebuah proses yang sangat rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut memiliki berbagai macam penyebab salah satunya adalah faktor karakteristik dari program-program kebijakan yang dijalankan maupun aktor-aktor yang terlibat dalam Implementasi kebijakan. Seperti disebutkan oleh Lester dan Stewart, pelaku dalam implementasi kebijakan birokrasi, legislatif, lembaga-lembaga pengadilan, kelompok-kelompok penekanan, dan komunitas organisasi. Dari masing-masing kebijakan itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sehingga permintaan terhadap implementasi kebijakan juga akan beragam.

## **6. Sistem Pelayanan Publik**

### **a. Pengertian Pelayanan publik**

Menurut Budiman Rusli dalam buku Reformasi Pelayanan Publik mengatakan bahwa sesuai dengan *Life cycle Theory of Leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sehingga tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun. Menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian, kriteria dan ruang lingkup di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan barang publik, jasa publik atau administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara baik pemerintah pusat maupun daerah atau oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah atau oleh institusi lain dengan anggaran berasal dari APBN atau APBD.

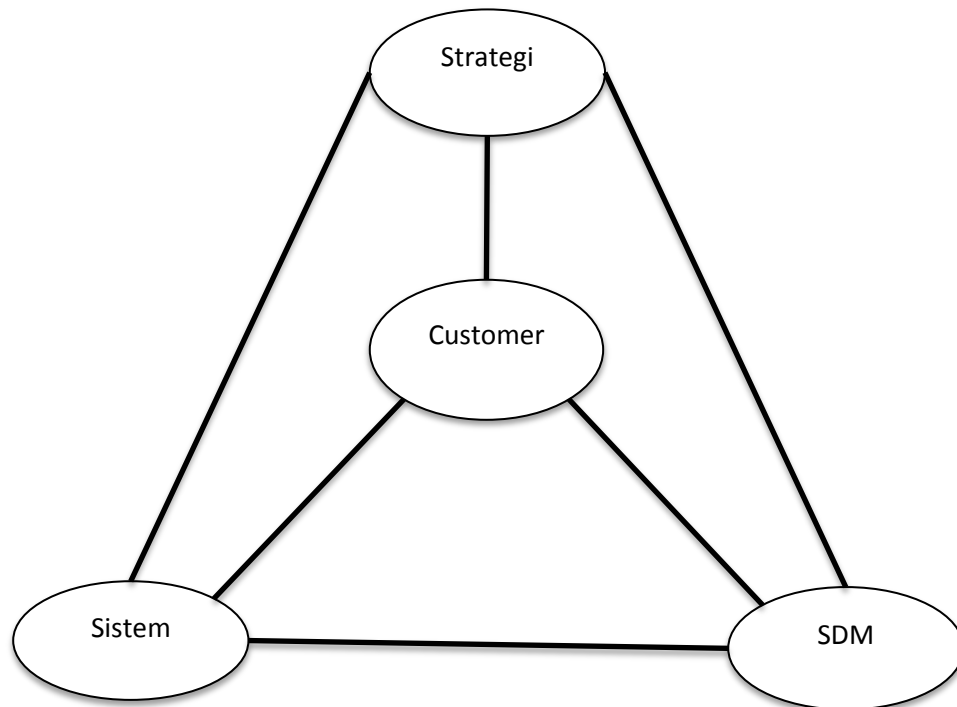
#### **b. Standar Pelayanan**

Menurut Albert dan Zemke dalam buku Manajemen Pelayanan (Ratmiko dan Atik Septi Winarsih: 2008: 98) bahwa organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pelayanan yang sangat berhasil memiliki kesamaan, yaitu

- 1) Disusun strategi pelayanan yang baik
- 2) Orang di garis depan yang berorientasi pada pelanggan/konsumen
- 3) Sistem pelanggan yang ramah

Setiap organisasi harus mengkondisikan tiga faktor tersebut untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Interaksi di antara strategi, sistem, dan orang di garis depan serta pelanggan akan menentukan keberhasilan manajemen dan kinerja pelayanan organisasi tersebut.

Interaksi di antara empat faktor tersebut dikonsepsikan Albert dan Zemke sebagai *The Service Triangle*, sebagaimana dapat dilihat modelnya dalam gambar. 1 dibawah ini.



**Gambar. 1 Model Service Triangle**

## **7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal**

### **a. Konsep Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Non Formal**

Pemahaman SPM secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan publik (pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat. Dijajaran birokrasi daerah

sendiri, pengertian SPM, masih sering dikacaukan dengan standar/prasaratan teknis, standar kerja, standar pelayanan umum.

**b. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Non Formal**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2013 dalam penyelenggrakan SPM pendidikan terdapat berbagai Indikator yang dibagi menjadi 2 kelompok indikator yaitu penyelenggaraan pendidikan non formal oleh Kabupaten/Kota dan penyelenggara pendidikan non formal oleh satuan pendidikan.

Indikator sesuai dengan Peraturan Permendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Non Formal. Dalam hal ini indikator yang diterapkan ada 4 yaitu mengenai data dasar, sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kompetensi lulusan. Pasal 5 dalam peraturan Peraturan Permendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Non Formal yaitu:

- a. Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.
- b. Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 Persen.
- c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.
- d. Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.
- e. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.
- f. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C).
- g. Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.
- h. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi.

- i. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
- j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.
- k. Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbarui secara terus menerus.

**Tabel 2 .Perbandingan SNP dan SPM**

<b>No</b>	<b>Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>Keterkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan</b>	<b>Penangungjawab</b>
1.	Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.	Data Dasar	Dinas Pendidikan
2.	Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 persen.	Data Dasar	Lembaga PKBM
3.	Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B	Standar Sarana Prasarana	Lembaga PKBM
4.	Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.	Standar Kompetensi Lulusan	Lembaga PKBM
5.	Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.	Standar Kompetensi Lulusan	Dinas Pendidikan
6.	Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA atau Program Paket C)	Standar Kompetensi lulusan	Dinas Pendidikan
7.	Sejumlah 90 persen peserta didik Program paket B yang mengikuti uji sample mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.	Standar kompetensi lulusan	Dinas Pendidikan
8.	Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi.	Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidik	Lembaga PKBM
9.	Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
10.	Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar mengajar memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan teknis pembelajaran.	Standar Sarana Prasarana	Dinas Pendidikan
11.	Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbarui secara terus menerus.	Data Dasar	Lembaga PKBM

## **B. Penelitian yang relevan**

Hasil yang relevan dengan penelitian ini perlu dibahas karena berguna dalam memberikan masukan sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Tesis dari Wara Winartiningsih yang berjudul evaluasi implementasi standar isi program keahlian teknologi informasi di SKM bertaraf Internasional Provinsi D.I.Yogyakarta. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar isi telah dilaksanakan dengan baik oleh SMKBI di Yogyakarta di Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Isi telah dilaksanakan dengan baik oleh SMKBI di Yogyakarta. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan standar isi dari segi pelaksanaan, kendala dan masukan atau solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan dari sisi pelaksanaan, kendala, dan solusi persamaan lain dari model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi kesenjangan dan ketimpangan. Perbedaan terletak dari objek yang diteliti, dalam penelitian ini memiliki standar isi sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti Standar Pelayanan Minimal.
2. Skripsi Khoirina Nuryani yang berjudul Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul tahun ajaran 2013/2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sudah memenuhi standar pelayanan minimal dengan prosentase 83,33% meskipun, masih banyak



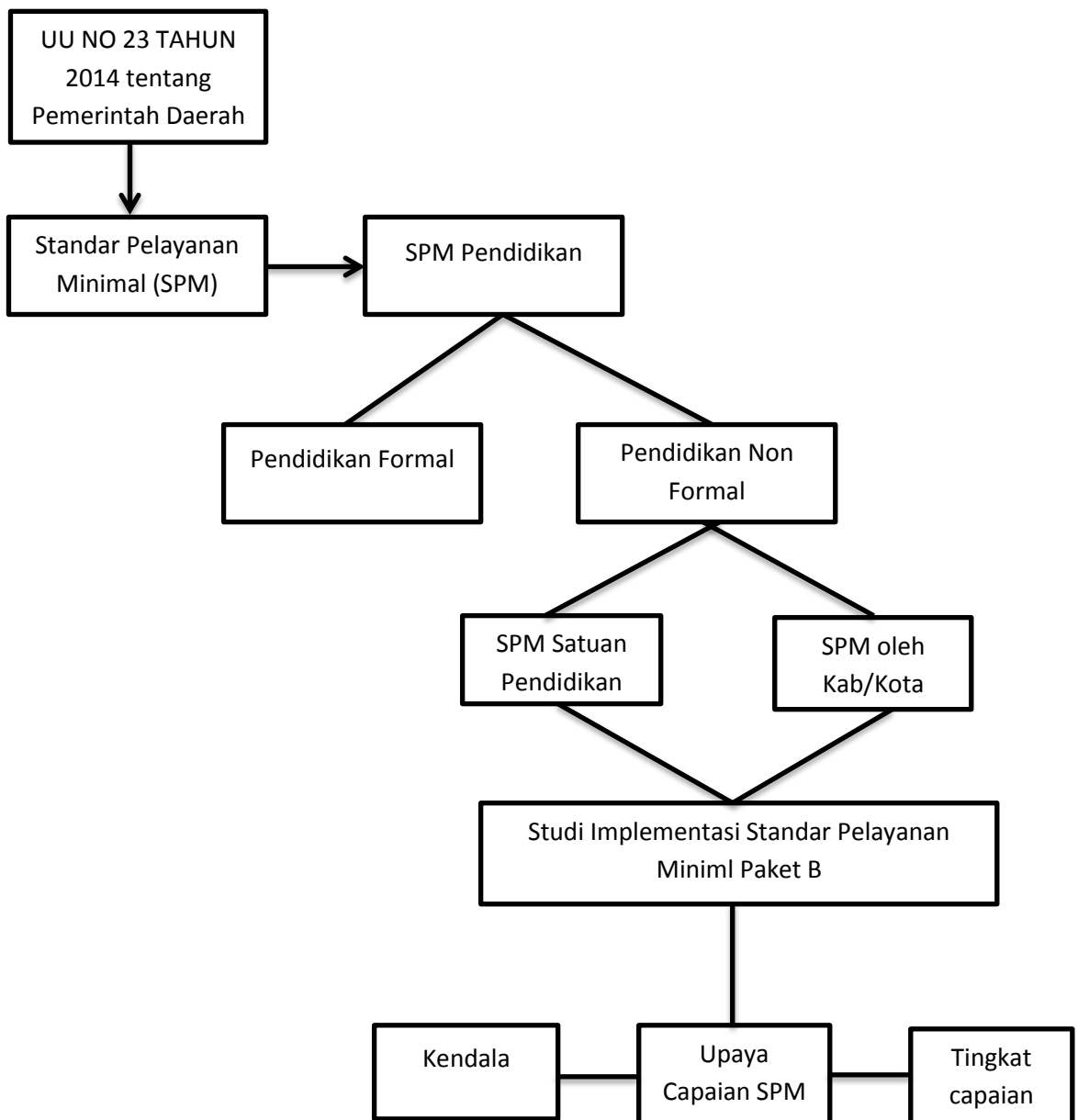
yang harus diperbarui. Indikator yang kedua adalah mengenai pendidik dan tenaga pendidik sudah tercapai dengan baik. Karena dilihat dan dihitung secara kuantitatif keberangkatan 37,5 jam. Indikator yang ketiga adalah pelayanan kurikulum terdiri dari tiga indikator didalamnya, dari tiga indikator tersebut hanya satu yang tidak mencapai standar pelayanan minimal yaitu rencana pembelajaran. Secara keseluruhan sudah mencapai standar pelayanan minimal namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lagi. Agar terjadi pendidikan yang memiliki mutu dan tingkat pendidikan yang bersaing dengan sekolah-sekolah negeri maupun swasta di kancah Nasional maupun Internasional.

### **C. Kerangka berfikir**

Pemerintah terus berupaya dalam mengembangkan dan memperbaiki pendidikan di Indonesia, sehingga banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menguatkan kebijakan tersebut. Dilihat dari kacamata hukum dan juga dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk masyarakat secara nasional maupun secara daerah. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomer 23 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nomer 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal di Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2013 tersebut dapat berbagai indikator yang terbagi menjadi dalam pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten/Kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

Dengan indikator-indikator tersebut dapat diketahui bahwa sekolah atau lembaga sudah memenuhi SPM atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut:



**Gambar 2. Kerangka berfikir**

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Dari kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti.

1. Bagaimana standar kompetensi lulusan dalam kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
2. Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berlaku dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran Kesetaraan paket B?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
5. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal dalam kesetaraan Paket B di Kota Magelang?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008: 2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu Variable saja, yaitu Permendiknas Nomer 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal. Menurut Saifuddin Azwar (2005: 7), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002: 11) Pada prinsipnya dengan metode deskriptif data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyaji laporan tersebut.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini semua data yang terkumpul kemudian di analisa dan diorganisasikan hubungannya untuk menarik kesimpulan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan.

## **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di lembaga non formal di Kota Magelang. Alasan pemilihan lembaga ini karena, 1) Lembaga pendidikan non formal di Kota Magelang merupakan lembaga yang masih belum berkembang dengan baik, beberapa lembaga juga belum pernah mendapat evaluasi kinerja. 2) Meskipun lembaga non formal namun animo masyarakat sangat banyak peminatnya. Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan Februari 2016.

## **C. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “Sosial situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Penentuan sample dari suatu populasi disebut penarikan sample atau sampling. Menurut Sugiyono (2014: 54) *Purpose Samplling* adalah teknik pengambilan sumber data/ subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sumber data sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sumber data/ subjek penelitian lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Subjek dalam penelitian ini dibagi dalam 4 kluser, yaitu :

- a. Dinas Pendidikan
  - 1) Pengelola Pendidikan Non Formal

- b. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
  - 1) Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
  - 2) Tutor Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
  - 3) Warga Belajar Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

Maksud dari pemilihan ini adalah untuk mendapat sebanyak mungkin informasi dan berbagai macam sumber data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya.

#### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2014: 58) mendefinisikan bahwa: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu tentang sesuatu hal objektif valid dan realibel tentang sesuatu hal (varian tertentu)”.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Non Formal di Kota Magelang. Alasan pemilihan lembaga ini karena, 1) Lembaga pendidikan Non formal di Kota Magelang merupakan lembaga yang masih belum berkembang dengan baik, beberapa lembaga juga belum pernah mendapatkan Evaluasi Kinerja. 2) Meskipun lembaga non formal namun animo masyarakat sangat banyak peminatnya. Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan Februari 2016.

#### **E. Setting Penelitian**

Latar penelitian ini merupakan Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang. Tempat Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Kota Magelang, Jalan Alibasah Sentot P No 6 Kota Magelang.
2. PKBM Upaya Terampil, Jalan Pasar Kebon Polo No 447
3. PKBM Permata, Jalan Perintis Kemerdekaan 9 Rt 004/07 Kramat, Magelang
4. PKBM Kuncup Mekar, Jalan Beringin III No 22 Tidar Krajan, Magelang dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Dinas pendidikan dan PKBM merupakan salah satu subjek penelitian untuk mengetahui Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
  - b. Lokasi Dinas Pendidikan dan PKBM mudah dijangkau peneliti sehingga memungkinkan penelitian berjalan lancar.
  - c. Keterbukaan dari pihak Dinas, pengelola PKBM dan masyarakat setempat sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah.

Pendidikan Non Formal di Kota Magelang merupakan salah satu pendidikan yang masih aktif dalam pemberantasan angka buta aksara, dan pendidikan kesetaraan.

#### **F. Teknik Pengumpulan data**

Menurut Andi Supangat (Lexy J Moleong: 2007: 112) menyatakan bahwa pengertian data adalah:

“Bentuk jamak dari data, yang dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang membentuknya dapat berupa, angka-angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan lainnya.”

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Permasalahan yang harus diamati ketika melakukan pengamatan menurut J.P Spredly seperti di kutip oleh (S. Nasution 2011: 88) yaitu sebagai berikut :

- a. Ruang dalam aspek fisik
- b. Perilaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi
- c. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu
- d. Obyek, yaitu benda-benda yang berada di tempat itu.
- e. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan.
- f. Tujuan, yaitu apa yang ingin di capai orang dan makna perbuatan orang
- g. Perasaan, yaitu emosi yang dirasakan dan dinyatakan.

Observasi menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono 2014: 311) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

## 2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Pertanyaan diarahkan pada mengungkap kehidupan responden, konsep, persepsi, peranan, kegiatan dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan



fokus yang diteliti. Pertanyaannya bervariasi dalam beberapa format: aplikasinya, isi, urutan pertanyaan.

Diperkuat lagi oleh pernyataan menurut Esterberg (Moleong: 2002 : 281) mendefinisikan interview sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat didefinisikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya. Wawancara akan berlangsung dengan baik kalau telah tercipta rapport antara peneliti dengan yang diwawancarai. Susan Stainback dalam buku Metode Penelitian Pendidikan (Sugiyono: 2014: 287) menyatakan bahwa *“Rapport is a relationship of mutual trust and emosional affinity between two or more people. Establishing rapport is an important task for the qualitative research”*.

### 3. Studi Dokumenter

Studi Dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Nana Syaodih Sukmadinata: 2012: 221). Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen Bogdan menyatakan *“ in most tradition o qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any*

*first person narrative procuced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief”*

**Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data**

No.	Aspek	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.	Dinas Pendidikan Kota Magelang Pengelola PKBM	Wawancara, dan dokumentasi
2.	Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 Persen.	Pengelola PKBM Tutor	Wawancara dan dokumentasi
3.	Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.	Warga Belajar Pengelola PKBM Tutor Dinas Pendidikan Kota Magelang	Wawancara dan dokumentasi
4.	Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.	Warga Belajar Pengelola PKBM Tutor Dinas Pendidikan Kota Magelang	Wawancara dan dokumentasi
5.	Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.	Pengelola PKBM Tutor	Dokumentasi dan wawancara
6.	Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat me-lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C).	Pengelola PKBM Tutor	Dokumentasi dan wawancara
7.	Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.	Warga belajar Pengelola PKBM Tutor Dinas Pendidikan Kota Magelang	Dokumentasi dan wawancara
8.	Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi.	Pengelola PKBM Tutor Dinas Pendidikan Kota Magelang	Wawancara dan dokumentasi
9.	Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang	Pengelola PKBM Tutor Dinas Pendidikan	Wawancara dan dokumentasi

	ditetapkan secara nasional.	Kota Magelang Warga belajar	
10.	Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.	Pengelola PKBM Tutor Warga belajar	Wawancara dan dokumentasi
11.	Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbarui secara terus menerus	Pengelola PKBM Dinas Pendidikan Kota Magelang	Wawancara dan dokumentasi

#### **G. Instrumen Penelitian**

“Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah” (Arikunto 2010: 136)

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri atau dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama. Instrumen penelitian ini menggunakan Permendiknas Nomer 129a/U/2004 Pasal 5 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal. Instrumen penelitian ini berisi mengenai indikator pencapaian pelaksanaan SPM pendidikan non formal yang digunakan sebagai pedoman saat melakukan observasi, dokumentasi, wawancara maupun pengambilan data akurat lainnya. Cara perbandingan dengan menggunakan lembar observasi, dokumentasi, dan wawancara ini dengan pelaksanaan SPM pendidikan non formal.

#### **H. Teknik Pengolahan dan analisis data**

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. (Sugiyono 2014: 339)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh juga semakin banyak dan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu diadakanya reduksi data yang mana berarti merangkup, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian tema yang ada data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode aspek-aspek tertentu.

## 2. Penyajian Data

Hasil dapat dilakukan dalam di reduksi data yang mana dalam bentuk yang berbeda seperti uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *lowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. (Sugiyono 2014: 343). Bila pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak dapat lagi dirubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

## *2. Conclusion Drawing (Verification)*

Kesimpulan yang pertama dapat diartikan kesimpulan sementara, sehingga perlu didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang selanjutnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya. Dari keseluruhan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, seleksi mana yang akan ditampilkan, setelah itu baru dilakukan interpretasi data. Interpretasi data berusaha mencari makna dan implikasi yang lebih luas tentang hasil penelitian.

Interpretasi data dilakukan dengan mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang di dapatnya dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis data secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif di gunakan untuk menjaring data tentang Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Paket B Kota Magelang

### **3) Keabsahan Data**

Setelah data di peroleh baik dengan observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur dang angket, maka data tersebut oleh peneliti dilakukan pengecekan

data kembali dengan satu tujuan agar mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Sehingga peneliti menentukan untuk pengecekan keabsahan data itu dengan triangulasi. Menurut (Iskandar R 2009:127)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap suatu data.

Pendapat lain mengatakan bahwa triangulasi adalah upaya untuk mengecek kebenaran pada data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain sehingga tujuan dari triangulasi adalah mengecek suatu kebenaran data tertentu dengan cek silang yaitu dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase lapangan dengan metode yang lain pula (Nasution, 2011: 115).

Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan (Nasution, 2011: 115-116) untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden, untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Dalam teknik ini, triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan dalam Nana Syaodih Sukmadinata: Metode Penelitian menyatakan

*“What the qualitative researcher is interested in is not truth per se, but rather perspectives. Thus, rather than trying to determine the “truth” of people’s perception, the purpose of corroboration is to the help researchers increase their understanding and probability that their finding will be seen as credible or worthy of consideration by other”*

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan itu dilakukan pengecekan kembali untuk mendapatkan data yang valid dan reabilitas. Maka dilakukan pengecekan ulang dengan menguji kembali proses pengumpulan data peneliti ke lapangan kembali dengan tujuan mendapatkan kapasitas dari data yang didapat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Perkembangan dan dinamika Kota Magelang yang pesat sebagai Kota Jasa saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang ada walaupun luasnya hanya 18,12 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110<sup>0</sup> 12'30" – 110<sup>0</sup> 12'52" Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> 26'28" – 7<sup>0</sup> 30'9" Lintang Selatan serta terletak pada posisi strategis, karena berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa, dan berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo, di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi Dieng.

Letak strategis Kota Magelang juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang terletak pada posisi strategis, yaitu berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworjo. Di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng dan dataran tinggi Dieng. Letak Starategis Kota Magelang juga ditunjang



Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang dari lebih 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara  $5^0 - 45^0$ , sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan sungai Progo di sisi barat dan sungai Elo di sisi timur. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sebesar +7,10 mm/th.

Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 Kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Timur: Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- d. Sebelah Barat: Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Kecamatan Magelang Utara Luas wilayah 6.128 km<sup>2</sup>, Terdiri dari 5 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Potrobangsari
- b. Kelurahan Wates
- c. Kelurahan Kedungsari
- d. Kelurahan Kramat Selatan
- e. Kelurahan Kramat Utara

Kecamatan Magelang Tengah Luas wilayah 5.104 km<sup>2</sup>, Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kemirirejo
- b. Kelurahan Cacaban
- c. Kelurahan Magelang
- d. Kelurahan Panjang
- e. Kelurahan Gelangan
- f. Kelurahan Rejowinangun Utara

Kecamatan Magelang Selatan Luas wilayah 6.888 km<sup>2</sup>, Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Jurangombo Selatan
- b. Kelurahan Jurangombo Utara
- c. Kelurahan Magersari
- d. Kelurahan Rejowinangun Selatan
- e. Kelurahan Tidar Utara
- f. Kelurahan Tidar Selatan

## **2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang**

### **a. VISI**

Berdasarkan gambaran umum dan permasalahan pokok yang dihadapi Visi Kota Magelang Tahun 2010-2015 adalah "Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan. Adapun makna Visi Kota Magelang tersebut adalah :

- 1) Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang maju, bermodal dari kondisi dan letak geografis Kota Magelang yang strategis serta terciptanya

pelayanan jasa dalam semua bidang (pendidikan, perdagangan, pariwisata, kesehatan, dsb) perlu peningkatan dan perbaikan penyediaan pelayanan jasa tersebut bagi masyarakat kota dan masyarakat daerah sekitar.

- 2) Profesional, Adalah kemampuan nyata pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan jasa secara efektif, efisien dan
- 3) Sejahtera, Kesejahteraan masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya dapat tercipta dengan tercukupinya kebutuhan manusia meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang selanjutnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Magelang yang layak dan bermartabat.
- 4) Mandiri, Era global saat ini yang ditandai dengan pemberlakuan pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, dsb) cepat atau lambat tentunya akan berdampak pada kondisi ketahanan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu kiranya perkuatan dan peningkatan perekonomian kerakyatan dengan optimalisasi dari potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian.
- 5) Berkeadilan, Peningkatan pembangunan segala aspek secara merata dan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya yang ditujukan masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan dan pengembangan paham kebangsaan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

## **b. MISI**

Berdasarkan Visi Kota Magelang tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kota Magelang Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

- 1) Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsif apratur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.
- 2) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.
- 3) Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian.
- 5) Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- 6) Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman ketentraman masyarakat.

### **3. Deskripsi Pelaksanaan Kebijakan**

Program Kesetaraan Paket B dilaksanakan oleh bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Magelang. Demi kelancaran aktifitas organisasi maka Dinas Pendidikan Kota Magelang dan PKBM di Kota Magelang merumuskan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Kota Magelang

1) Visi

Terwujudnya layanan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan bermutu.

2) Misi

- a) Melaksanakan layanan prima di bidang administrasi dan informasi pendidikan serta layanan pengembangan karier.
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan menengah.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang pemuda dan olahraga.
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur pendidikan luar sekolah menuju tercapainya SDM berdaya saing tinggi, mandiri, maju dan produktif.
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan dan pelestarian di bidang perpustakaan serta membuktikan dan meningkatkan budaya membaca masyarakat

### 3) Tujuan

- a) Pebangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- b) Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan.
- c) Memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, Pendidikan Non Formal Informal (PNFI).
- d) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat dan tenaga kependidikan PNFI.
- e) Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan melalui kursus dan pelatihan serta membuka jasa konsultasi di bidang pendidikan baik formal maupun non formal.

### b. PKBM Permata

#### 1) Visi

Menjadi PKBM unggul.

#### 2) Misi

Meningkatkan partisipasi masyarakat di PKBM, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, mewujudkan masyarakat yang mandiri.

#### 3) Tujuan

Mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat sekitar PKBM melalui pendidikan non formal.

c. PKBM Kuncup Mekar

1) Visi

Terwujudnya masyarakat setempat yang lebih cerdas , terampil, lebih kreatif dan produktif, lebih sejahtera dan harmonis serta selalu ingin mengembangkan diri secara positif sebagai manusia seutuhnya ciptaan Tuhan.

2) Misi

Mengembangkan fasilitas-fasilitas usaha pembelajaran, pemberdayaan, pembangunan masyarakat setempat antara lain berupa :

- a) Peningkatan kapabilitas masyarakat untuk dapat berkarya secara positif
- b) Peningkatan pengetahuan, wawasan, ketrampilan, dan sikap untuk dapat hidup lebih baik
- c) Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat
- d) Pengembangan usaha-usaha produktif di masyarakat yang menggunakan model dan pengelolaan usaha yang profesional, bersifat kekeluargaan dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya

3) Tujuan

- a) Tujuan umum dari kegiatan PKBM adalah untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap warga belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sebagai kemampuan untuk dapat hidup wajar dan mandiri di tengah masyarakat
- b) Lebih utama kegiatan-kegiatan yang ada di PKBM untuk memandirikan warga belajar dalam mencari nafkah untuk bekal yang lebih baik

d. PKBM Upaya Terampil

1) Visi

- a) Mewujudkan masyarakat berilmu pengetahuan, berwawasan luas, memiliki skill dan berakhlak mulia guna mencapai masyarakat yang mandiri

2) Misi

- a) Melaksanakan proses belajar mengajar secara profesional
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap
- c) Membangkitkan minat membaca masyarakat melalui TBM
- d) Meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mewadahi pelatihan-pelatihan tertentu (Budidaya jamur, Membordir, Membuat Cake, Membuat Handycraft)
- e) Meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan terlibat emosional semua yang terlibat dalam PKBM melalui metode pembelajaran terpadu
- f) Menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan formal dan non formal serta masyarakat pada umumnya
- g) Meningkatkan kemampuan manajerial internal lembaga
- h) Mewujudkan lingkungan yang berbudaya dan religius secara berkesinambungan

3) Tujuan

- a) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu komponen pendidikan yang bertujuan mengembangkan pendidikan luar sekolah. Dengan pemahaman bahwa pendidikan luar sekolah sama pentingnya



dengan pendidikan sekolah, maka pengakuan akan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi suatu konsekwensi.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Ketercapaian SPM Pendidikan Non Formal Data Dasar**

#### **a. Data Dasar SPM**

1) Indikator Nomer 1 “Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Jumlah penduduk usia sekolah di Kota Magelang pada usia 12-15 tahun berjumlah 16.937 peserta didik. Sementara dilihat dari angka putus sekolah di Kota Magelang berjumlah 42 peserta didik. Diperkuat dari penuturan SH selaku pimpinan PNF di Dinas pendidikan Kota Magelang:

“Dari data tahun 2015, ada 42 siswa.” (CW. 5.1)

Diperkuat lagi oleh MH selaku karyawan dibagian pengajaran menyatakan bahwa:

“Data tahun 2015 ada 42 mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW. 10.1)

Dilihat dari pemaparan diatas bahwa jumlah angka putus sekolah yang ada di Kota Magelang tidak mencapai 3 persen dari jumlah keseluruhan peseta didik pada usia 12-15 tahun. Lembaga pendidikan non formal yang ada, memiliki andil dalam mengurangi angka putus sekolah di Kota Magelang. Dari ke 3 lembaga pendidikan non formal yang ada banyak menyerap anak-anak putus sekolah dari Kota Magelang sendiri maupun dari daerah lain, seperti

Kabupaten Magelang, Temanggung dan Wonosobo. Oleh karena itu jumlah peserta didik di ketiga lembaga yang ada di Kota Magelang sangat banyak.

Hal ini sama bisa dilihat dari jumlah warga belajar disetiap lembaga yang ada di Kota Magelang, di Kuncup Mekar sendiri menurut IN sebagai pengelola ada:

“Untuk Kesetaraan paket B sekitar 89 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.2.3)

Sedangkan di PKBM Upaya Terampil menurut RA ada:

“Dari kelas VII, VIII, dan IX itu disini ada 112 warga belajar mbak. ” (CW.19.3)

Di PKBM Permata Menurut ZU:

“Untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 92 warga belajar mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW.18.3)

Lembaga pendidikan non formal memiliki berbagai aturan yang harus dipatuhi untuk terlaksananya pendidikan yang lebih baik. Salah satu aturannya adalah mengenai pembatasan jumlah peserta didik/ warga belajar yang ada. Jumlah peserta didik yang idiel harus berbanding dengan jumlah ruangan dan jumlah tenaga pengajar yang ada. Disetiap lembaga non formal yang peneliti observasi memiliki batasan yang relatif berbeda satu dengan yang lainnya. Dilihat dari kouta warga belajar di kuncup mekar contohnya menurut IN:

“Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga.” (CW.2.2)

Didukung dari pernyataan dari RA dan ZU selaku pengelola dari PKBM Upaya Terampil:

“Kalau tiap angkatan kalau disini tidak dibatasi mbak, kalau ada yang daftar 60 ya kita terima semua. Kalau cuma ada 20 ya kita terima.” (CW.19.2)

“Tiap tahun berbeda beda mbak tergantung anggaran saja.” (CW.20.2)

Pemaparan dari beberapa narasumber diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Kota Magelang angka putus sekolah tidak melebihi 10 persen dari jumlah usia anak sekolah. Namun, dilihat dari banyaknya warga belajar di 3 Lembaga Non formal yang ada di Kota Magelang ini, dikarenakan beberapa faktor salah satunya warga belajar bukan hanya berasal dari Kota Magelang saja, melainkan dari Kota Temanggung dan Kabupaten Magelang juga.

2) Indikator nomer 2 “Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 Persen.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Indikator ke 2 ini, membahas mengenai peserta didik yang mana dalam sebuah pembelajaran aktif atau tidak, dalam wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa pengelola PKBM yang ada menunjukkan hasil kurang maksimal.

Hal ini disampaikan oleh pengelola bernama NN :

“Ada, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 8 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 22 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 38 yang tidak aktif 10 orang.” (CW.1.5)

Didukung pernyataan dari pengelola yang lain bernama IN:

“Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga.” (CW.2.2)

Selain itu dalam setiap pembelajaran pasti dibutuhkan keaktifan warga belajar. Warga belajar menjadi kunci dari pembelajaran, namun dari hasil

wawancara menunjukkan bahwa keaktifan warga belajar dalam mengikuti setiap pembelajaran sangat kurang. Dilihat dari pernyataan RA:

“Banyak itu mbak, maklum ya mbak namanya juga sekolah non formal. Tapi biasanya akan aktif kalau udah mau mendekati ujian mid semester sama semesteran gitu mbak.” (CW.19.5)

Didukung lagi dengan pernyataan dari AG:

“Banyak mbak, apalagi kalau cuma pembelajaran biasa biasanya hanya sedikit yang hadir” (CW.20.5)

Sementara itu, dari data yang ada jumlah dari warga belajar yang tidak aktif melebihi 10 persen di 3 lembaga non formal yang ada. Dari penuturan dari hasil wawancara warga belajar akan mulai aktif lagi saat mendekati ujian akhir semester dan ujian nasional.

#### **b. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan ini mencakup 4 indikator yang harus dibahas dalam Standar Pelayanan Minimal yang tercantum pada indikator nomor 4, indikator nomor 5, indikator nomor 6 dan indikator nomor 7.

- 1) Indikator Nomer 4 “Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Ujian akhir adalah salah satu bentuk pencapaian terakhir dari sebuah pendidikan, dengan dibuktikannya mendapatkan sebuah ijazah untuk melanjutkan kejenjang selanjutnya ataupun untuk bekerja. Namun sebelum mendapatkan Ijazah warga belajar harus melewati sebuah proses terakhir dalam pembelajaran, yaitu Ujian Nasional. PKBM pun juga ada Ujian yang

dinamakan Ujian Kesetaraan yang mana memiliki hak yang sama dengan peserta Ujian Nasional yang lainnya, seperti yang diungkapkan oleh KS:

“Hampir semua warga belajar mengikuti mbak, untuk ujian kesetaraan kalau sayarat kehadiran memenuhi.” (CW.3.2)

Diperkuat oleh pernyataan dari HW:

“Hampir semuanya saya ikutkan mbak, itu saja biasanya saat ujian Nasional kadang juga tetep aja yang tidak datang dengan berbagai alasan, padahal sayang ya kan tinggal ujian saja. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya sendiri yang tidak mau, kita sebagai pengelola ya hanya bisa mengarahkan saja” (CW.9.6)

Penuturan tersebut sejalan dengan MB yaitu:

“Kalau daftar hadir 70 persen terpenuhi, bisa mengikuti ujian nasional mbak.” (CW.12.2)

Ujian nasional di Tingkat Paket B yang setara dengan Ujian Nasional setara SMP di Kota Magelang sudah berjalan dengan baik, dimana peran dari warga belajar dan tutor maupun pamong sangat baik. Dilihat semua warga belajar yang ada harus mengikuti ujian nasional.

- 2) Indikator Nomer 5 “Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Pendidikan pada dasarnya adalah satu batu loncatan ketika memasuki dunia kerja, jenjang dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat secara umum. Dilihat dari data yang ada banyak warga belajar yang ada di Kota Magelang banyak yang memasuki dunia kerja dibandingkan dengan melanjutkan di pendidikan selanjutnya. Dengan berbagai alasan salah satunya karena faktor ekonomi ataupun karena faktor yang lainnya. Bisa dilihat dari penuturan ZU:

“Menurut data tahun lalu ya mbak itu ada banyak sekali yang masuk dunia kerja dibandingkan dunia pendidikan selanjutnya.” (CW.18.9)

Hal ini sesuai disampaikan oleh NN:

“60 persen dari 40 warga belajar masuk dunia kerja mbak, soalnya banyak dari warga belajar Paket B yang sudah disambi kerja.” (CW. 1.9)

Sedangkan RA menuturkan:

“Dilihat dari tahun lalu ya mbak jumlahnya itu ada 30 anak dari jumlah totalnya 45 anak. ” (CW. 19.9)

Berbagai faktor yang menyebabkan warga belajar masuk ke dunia kerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan selanjutnya. Beberapa faktor yang lainnya adalah faktor ekonomi, maupun karena mereka sudah bekerja sebelumnya.

3) Indikator nomer 6 “Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Pendidikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia ini, sehingga dalam pendidikan yang ada pasti memiliki jenjang-jenjang untuk terus dicapai. Warga belajar memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan, namun dalam hal ini minat warga belajar untuk melanjutkan pendidikan masih sangat rendah, Hal ini disampaikan oleh IN:

“Dari 38 siswa tahun lalu hanya 10 persen saja mbak, itu saja dengan berbagai bujukan sudah saya lakukan.”(CW.2.10)

Sedangkan RA menyampaikan :

“Yang masuk data saya itu ada 4 anak saja mbak, soalnya kan biasanya jarang juga yang konfirmasi kalau sudah lulus mbak.” (CW.19.10)

Diperkuat oleh ZU :

“Tahun kemarin itu yang masuk data di PKBM cuma ada 4 orang kalau enggak salah mbak, itu yang lapor mbak.” (CW.18.10)

- 4) Indikator Nomer 7 “Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Mutu pendidikan dapat dilihat dari nilai yang memuaskan dalam hasil akhir pendidikan, seperti hasil mid semester maupun hasil ulangan harian. Pembelajaran perlu diadakan evaluasi secara terjadwal dan berkala. Namun evaluasi yang diadakan oleh PKBM sangatlah sedikit, yaitu hanya mid semesteran dan semesteran saja. Dilihat dari penuturan SW:

“Kalau yang berkala dan terjadwal biasanya mid semester dan semesteran mbak, itu kan sudah dijadwal oleh PKBM juga”(CW.7.9)

Hal ini juga disampaikan oleh TT:

“Kalau yang terjadwal ngikuti dari PKBM ada mbak, mid semester sama semesteran itu lho... yang biasanya berengan sama PKBM yang lain juga”(CW.17.9)

Hal ini juga disampaikan oleh RH:

“Kalau dari PKBM ada mbak, itu lho mid semester sama semesteran itu aja, kalau yang lainnya mah enggak ada”(CW.11.9)

Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terkadang memiliki banyak kendala yang ada, apalagi dilihat dari faktor ekonomi dari para warga

belajar dari paket B. Sehingga dari jumlah yang ada di Paket B yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah formal.

**c. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik**

- 1) Indikator Nomer 8 “Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini disampaikan oleh HW sebagai berikut:

“Terpenuhi mbak dan disini termasuk yang sesuai dengan kebutuhan” (CW.9.14)

Diperkuat oleh penuturan RA:

“Untuk paket B sudah terpenuhi mbak. Ditambah lagi kan ada juga tutor paket yang lain juga yang biasanya membantu juga.” (CW.19.14)

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini salah satunya mengenai kompetensi profesional. Bisa dilihat dari asal pendidikan formal dan dari kualifikasi yang lain seperti penuturan dari NN:

“Tidak lah mbak, biasanya diambil dari guru-guru yang mengajar di formal kok,” (CW.1.12)

Sejalan dengan penuturan IN:

“Jelas tidak mbak, biasanya kita ambil dari pendidikan formal biar sesuai dengan mata pelajaran.” (CW.2.12)



Sejalan dengan penuturan AG:

“Tidak mbak. Biasanya palah saya ngambilnya dari guru-guru pendidikan formal kok.” (CW.20.12)

Terpenuhinya tenaga pendidik di pendidikan non formal biasanya diambil dari pendidikan formal yang ada. Beberapa tenaga pengajar harus terpenuhi agar warga belajar juga mendapat pendidikan yang sesuai dengan pendidikan formal.

2) Indikator nomer 9 “Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga berlaku untuk tutor dan tenaga pendidik bagi PKBM seperti yang diungkapkan oleh NN:

“Sebenarnya sih ada mbak, tapi ya bagaimana ya sekarang yang penting mau ngajar aja dan sesuai dengan mata pelajaranya.” (CW.1.16)

Sepeti penuturan IN:

“Ada lah mbak pastinya, namun kalau harus sesuai dengan kulifikasi pasti pada ngak mau soalnya kan sukarela ya, jadi ya biasanya yang mau aja jadi tutor disini.” (CW.2.16)

Seperti dijelaskan oleh KL:

“Saat perekrutan awal ada mbak, tapi dari beberapa kualifikasi biasanya hanya beberapa yang terpenuhi.” (CW.15.5)

Seperti dijelaskan oleh SH:

“Kebanyakan dari semua PKBM tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi tutor, yang penting mau mengajar saja” (CW. 5.8)

Karena adanya kualifikasi tertentu, maka tutor juga diberikan sebuah pelatihan untuk menunjang kualifikasi tertentu dan sesuai dengan kualifikasi nasional.

Seperti yang diungkapkan oleh KS:

“Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan JK:

“Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. ” (CW.13.4)

Diperkuat dengan ungkapan dari IK:

“Pembekalan itu biasanya ada mbak, persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)

Kualifikasi terdiri dari kualifikasi pedagogik yang mana tutor dituntut untuk menguasai materi dan berbagai hal terkait dengan pembelajaran. Kualifikasi tersebut untuk menunjang mengenai pendalaman materi maupun pendalaman media pembelajaran yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh NN:

“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan RH:

“Ya pastinya menguasai lah mbak, kalau enggak kita pun ya ngak terlalu ngerti hahah” (CW.11.6)

Seperti yang diungkapkan oleh SW:

“Bisa kok mbak soalnya menjelaskanya dengan jelas dan banyak yang mengerti termasuk saya.” (CW.7.6)

Kedatangan tutor menjadi salah satu yang penting bagi setiap pembelajaran yang ada. Namun dalam hal ini terkadang tutor memiliki jam bentrok dengan pendidikan formal yang ada sehingga bisa telat. Begitupun dengan warga belajar yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh SA:

“Tepat waktu mbak mungkin satu atau dua tutor sja yng sering telat, katanya beliau juga ngajar di SMP formal, jadi biasanay waktu juga ditambah kok kalau beliau telat.” (CW.4.7)

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan SW:

“Tepat waktu mbak, malah yang sering telat itu warga belajarnya kok heheheh” (CW.7.7)

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan OW:

“Palah seringnya warga belajarnya yang sering telat mbak.” (CW.8.7)

Dengan terpenuhinya kualifikasi tutor yang mengajar di program paket B ini akan menjadikan warga belajar mendapat hak yang sama dengan yang lainnya. Namun dalam paket B terjadi berbagai kendala dalam pemenuhan kualifikasi untuk tutor.

#### **d. Standar Sarana dan Prasarana**

- 1) Indikator Nomer 3 “Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Media pembelajaran dan modul pembelajaran dalam sebuah sistem pembelajaran adalah barang yang sangat mutlak dan dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Modul pembelajaran dibutuhkan di dunia pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, namun kebanyakan yang terjadi dipendidikan non formal masih ada keterbatasan dalam hal tersebut. Selain itu, hal yang juga diungkapkan RH:

“Ada mbak, biasanya dibagikan smjaat awal pembelajaran itu lho, pas pertama kali masuk”(CW.11.1)

Adapun pendapat lain dari FO adalah:

“Ada mbak, biasanya setiap semester kita dibagikan modul kok”(CW.6.1)

Hal tersebut juga diperkuat oleh SA:

“Seharusnya mendapatkan mbak, tapi kadang ada warga belajar yang tidak mau membawa modulnya.” (CW.4.2.)

Hal tersebut juga diperkuat oleh TT:

“Biasanya yang mau aja mbak yang dapat, soalnya kadang juga ada yang udah diberikan sama pengelola atau tutor, kadang palah ditinggal gitu aja dikelas, ndak dibawa pulang” (CW.17.2.)

Hal tersebut juga diperkuat oleh OW:

“Kalau engak ambil ya enggak dapat mbak, kan biasanya pembagian cuma pas masuk pembelajaran aja”(CW.8.2.)

Adapun pendapat lain dari SA:

“Jarang mbak, paling paling cuma modul kalau enggak ya LCD itu saja biasanya kalau pertemuan yang banyak atau pelatihan saja kok mbak,” (CW.4.3.)

Hal tersebut juga diperkuat oleh OW:

“Media pembelajaran kalau sama tutor enggak ada mbak, paling kalau pas ada pelatihan itu paling aja cuma pake LCD” (CW.8.3.)

Adapun pendapat lain dari MB:

“Media pembelajaran jarang menggunakan mbak, meskipun ada, soalnya terbatas juga dengan waktu dan pemahaman dari setiap tutor juga berbeda kan mbak, beda kalau sekolah formal, waktunya kan jelas dan tertata dengan rapi. ” (CW.12.8)

Hal tersebut juga diperkuat oleh IN:

“Kalau disini pembelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan

LCD atau modul pembelajaran yang ada di PKBM mbak.” (CW. 2.19)

Hasil wawancara yang ada dalam pendidikan non formal masih kurang media pembelajaran yang harus dilengkapi, namun biasanya terkendala dengan anggaran yang ada. Sehingga kurangnya media pembelajaran yang disediakan oleh pengelola mengakibatkan pembelajaran kurang efektif dan efisien dan yang paling sangat memprihatinkan pembelajar menggunakan media seadanya.

- 2) Indikator nomer 10 “Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Untuk sarana dan prasarana yang ada di PKBM di Kota Magelang sebenarnya masih banyak yang dalam kondisi yang baik, namun karena keterbatasan sehingga banyak barang yang terbengkalai. Seperti halnya dengan masalah gedung saja masih pinjam dengan Pemerintah Kota Magelang. Hal ini diperjelas oleh HW:

“Gedung kita dipinjam pemerintah kota mbak, tapi kalau untuk perizinan dan yang lain sebagainya kita berada di Dinas pendidikan kota masihan.” (CW.9.7)

Hal ini diperjelas oleh IN:

“Semua gedung yang ada di PKBM kota magelang semua milik Pamerintah Kota magelang namun berada dibawah naungan Dinas pendidikan Kota Megelang.” (CW.2.7)

Satiap satuan pendidikan wajib mewakili prasarana yang memiliki lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjukan proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana juga harus layak untuk pembelajaran, agar warga belajar juga bisa nyaman dengan pembelajaran yang ada, namun yang ada dilapangan sangat kontras sekali mengenai kelayakan sarana dan prasarana yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh SA:

“Masih baik kok mbak, layak lah untuk pembelajaran.” (CW.4.10)

Hal ini diperjelas oleh MB:

“Sarana dan prasarana kurang lengkap ya mbak, tidak ada lab dan alat-alat pendukung praktikum. Ya maklum ya namanya juga pendidikan non formal” (CW.12.6)

Hal tersebut juga diperkuat oleh OW:

“Kalau meja kursi masih bagus mbak, dibuat belajar juga msih nyaman kali ya mbak”(CW.8.10)

Seperti yang diungkapkan oleh SH:

“Dinas pernah mengadakan sarana dan prasanana di salah satu PKBM saja, yaitu PKBM Permata untuk pengadaan meja dan kursi” (CW. 5.5)

Indikator nomer 10 ini banyak kendala-kendala masalah sarana prasarana yang harus diselesaikan, namun semua itu tidak luput dari peran warga belajar,

pemong belajar, tutor dan tak lupa dengan pemerintah terkait. Dalam hal ini pengelola PKBM juga perlu adanya skala prioritas terkait pendanaan sarana dan prasarana agar semua keperluan mengenai sarana dan prasarana bisa terpenuhi.

## **2. Kendala Pencapaian SPM Pendidikan Non Formal**

Kendala pelaksanaan SPM secara menyeluruh yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Non Formal di Kota Magelang yaitu masalah anggaran yang terbatas, kompetensi tutor, dan pengelola PKBM yang masih kurang dan manajemen kurang efektif dan efisien. Untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pengimplementasian SPM peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pengelola di 3 PKBM yang ada, kendala yang ada biasanya mengenai anggaran. Dari penuturan beberapa pengelola di setiap PKBM yang ada di Kota Magelang.

“Kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal adalah keuangan mbak, ya kalau keuangan sedikit bagaimana bisa menjalankan program dengan baik.” (CW. 1.23)

Diperkuat dengan pernyataan dari IN:

“Banyak mbak kalau bicara kendala, salah satunya ya masalah anggaran lah ya pastinya. Karna memang kalau anggaran itu masalah yang sangat krusial untuk menunjang kelancaran.” (CW. 2.23)

Namun dalam sebuah pembelajaran yang ada kendala pasti bukan hanya berasal dari masalah anggaran yang ada, namun di PKBM juga mengenai masalah warga belajar, dari masalah jadwal belajar, masalah umur warga belajar juga menjadi berbagai kendala seperti yang diungkapkan oleh HW:

“Banyak mbak, tapi kalau saya bilang semua itu banyak masalah dari warga belajar yang masih sangat labil.” (CW.9.23)

Pengimplementasi SPM terdapat pihak-pihak yang menghambat, sehingga bisa mengganggu proses pembelajaran, namun dalam hal ini berbagai masalah penghambat bukan berasal dari satu pihak saja ada beberapa pihak lain juga. Seperti penuturan dari HW menyatakan bahwa:

“Warga belajar mbak, ya bagaimana ya warga belajar kan sebagai subjek dari proses pembelajaran ini to mbak. Kalau ngak ada warga belajar ya kita tidak ada program ini” (CW.9.24)

Hal ini sesuai dengan penuturan RA sebagai berikut:

“Banyak mbak, dari anggaran, tutor, dan warga belajar punya kendala masing-masing mbak.” (CW.19.24)

Hal ini juga disampaikan oleh ZU:

“Pemerintah mbak kalau dirasa-rasa kurang mendukung PKBM secara penuh.” (CW.18.24)

Kualifikasi tutor diberlakukan untuk memberikan sebuah kualitas yang baik bagi pendidikan dari kualifikasi tersebut dijelaskan apa saja yang menghambat kualifikasi tutor tersebut hingga apa pengaruh bagi pembelajaran dan warga belajar sendiri. Terkadang kualifikasi dijadikan sebagai sebuah alasan menjadi kendala dalam pembelajaran maupun dalam masalah anggaran.

Hal ini juga disampaikan oleh SH:

“Seharusnya tidak menjadi kendala asalkan kualifikasi itu dipenuhi oleh setiap lembaga, namun karena tidak dipenuhinya itu menjadi kendala saat akreditasi ataupun penilaian yang lainnya.” (CW.5.16)

Hal ini disampaikan oleh NN sebagai berikut :

“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI Semarang untuk menyetarakan standar sesuai kualifikasi Nasional.” (CW.1.30)



Hal ini sesuai dengan penuturan HW sebagai berikut:

“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik”  
(CW.9.30)

Hal ini juga disampaikan oleh ZU:

“Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)

Kendala dalam kualifikasi tutor sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pengelola dan dinas pendidikan sebagaimana yang bertanggung jawab dalam proses perekrutan tutor maupun tenaga pengajar. Namun Dengan tuntutan yang ada Kualifikasi tutor dapat terlaksana apabila dijalankan sesuai dengan standarisasi nasional.

Pembelajaran yang terpenting adalah dukungan dari sarana dan prasarana, namun dalam beberapa kasus yang ada kebanyakan mempermasalahkan mengenai masalah sarana dan prasarana yang tidak lengkap dan menjadi kendala dalam setiap pembelajaran yang ada. Hal ini disampaikan oleh SA sebagai berikut :

“Tidak mbak soalnya ditaruh di TBM kok, jadi mudah mengambilnya.” (CW.4.12)

Hal ini sesuai dengan penuturan SW sebagai berikut:

“Sedikit mbak, karena digudang dan tidak dirapikan jadi susah pas nyarinya aja” (CW.7.12)

Sedangkan RH menyampaikan bahwa :

“Enggak mbak, kan kalau enggak ada tinggal minta sama pengelola aja” (CW.11.12)

Hal ini didasarkan pada penuturan SH sebagai berikut:

“Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)

Sementara itu, ZU juga menyampaikan bahwa :

“Ya jelas to mbak, kalau lengkap kan warga beajar juga semangat, tutor pun juga semangat.” (CW.18.25)

Hal ini sesuai dengan penuturan MH sebagai berikut:

“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.10.19)

Sedangkan NN menyampaikan bahwa:

“Salah satunya iya, sarana dan prasana kan juga masih minjam dan inventaris disini juga.” (CW.1.25)

Dalam proses pembelajaran pendidik dan tenaga pendidik menjadi hal yang sanagt penting, namun bisa juga menjadi kenadalam apabila tutor tidak datang tepat waktu. Hal ini didasarkan pada penuturan SA sebagai berikut:

“Tekadang iya mbak, kalau tutornya pas dapat yang galak, kadang ada juga tutornya yang judesnya minta ampun,” (CW.4.13)

Sementara itu, TT juga menyampaikan sebagai berikut :

“Engak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok” (CW.17.13)

Hal ini sesuai dengan penuturan SW sebagai berikut :

“Tidak ada, disini tutor-tutornya enak-anak kok mbak, semuanya bisa diajak bercanda.” (CW.7.13)

Berbagai kendala yang sudah dipaparkan diatas banyak bersangkutan dengan dana dan sarana dan prasarana mengenai pembelajaran. Untuk menunjang pembelajaran memang tidak terlepas dengan masalah dana.

### 3. Solusi Pencapaian SPM

Solusi yang dapat dilakukan yaitu PKBM harus mampu menyusun skala prioritas, meningkatkan kompetensi tutor dan pengelola agar dicapai manajemen PKBM yang efektif dan efisien, sehingga SPM dapat terpenuhi. Pengimplementasian adalah tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian Undang-Undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh IN:

“Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi dari anggaran, kualifikasi tutor dan pengelolaan PKBM itu sendiri ya mbak.” (CW.2.28)

MB juga menambahkan:

“Kendala saat pengimplementasian biasanya karena keterbatasan anggaran mbak untuk PKBM itu jadi kurang optimal.” (CW.12.11)

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh IK sebagai berikut:

“Banyak mbak, yang paling krusial ya anggaran to mbak. La mau gimana lagi anggaran yang menjalankan e mbak” (CW.16.11)

Hal ini didukung dengan pernyataan HW:

“Perlu adanya pelatihan yang lebih serius dan mendalam tentang SPM itu sendiri.” (CW.9.28)

Karena kendala dalam kualifikasi tutor yang sangat mengganggu dengan proses pembelajaran maka pengurus berusaha lebih baik dengan menyetarakan setiap kualifikasi tertentu yang sama dengan kualifikasi nasional dengan cara mengikutkan tutor dan warga belajar mengikuti pelatihan maupun pendidikan

untuk menunjang setiap kinerja dan memperbaiki proses dan metode pembelajarannya. Dari hasil penelitian tidak terlalu terasa dengan cepat namun mampu memberikan sebuah pembelajaran bagi tutor dan tenaga pendidik.

Seperti penuturan dari MB:

“Tidak terlalu signifikan mbak, soalnya yang penting tutor mampu mengajar dengan baik dan warga belajar juga suka dengan tutor tersebut.” (CW.12.12)

IK juga menambahkan:

“Dibilang tidak juga sebenarnya memberatkan juga mbak, tapi juga dari dinas juga tidak ada kejelasan kok mbak, ya kami sebagai tutor juga santai saja to. Yang penting tugas mengajar kita terpenuhi gitu aja.” (CW.16.12)

Hal ini didukung dengan pernyataan JK:

“Kalau dalam pembelajaran tidak mbak, kualifikasi tutor biasanya kendala sama gaji mbak. Padahal gaji disini juga enggak seberapa.” (CW.13.12)

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh ND sebagai berikut:

“Proses pembelajaran ngak ada hubunganya sama kualifikasi tutor biasanya mbak. Kualifikasi tutor kan biasanya hanya administrasi aja kok.” (CW.14.12)

Untuk masalah sarana dan prasarana banyak solusi yang bisa diberikan, namun semua itu tidak lepas dari peran pemerintah dan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasana untuk menunjang pembelajaran yang ada.

Seperti penuturan dari SH:

“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.5.19)

Hal ini didukung dengan pernyataan MB:

“Ya bagaimana ya, pasti iya lah, kalau alat-alat yang tidak lengkap kan juga menyusahkan para tutor juga mbak pas pembelajaran.” (CW.12.13)

IK juga menambahkan:

“Kendala sih tidak terlalu ya mbak, toh kalau disini pembelajarannya juga tidak terlalu sering dan waktunya juga fleksibel.” (CW.16.13)

Dalam pembelajaran harus ada keharmonisan anatar warga belajar dengan tutor maupun yang lainnya. Sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dalam hal ini keharmonisan dijaga dengan baik. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh SW sebagai berikut:

“Saya sih diam aja mbak, yang penting saya mengikuti pelajaran yang tutor berikan gitu aja.”(CW.7.16)

OW juga menambahkan:

“Jangan bikin mood tutor sebel aja sama kitanya, pasti juga tutornya enak kok”(CW.8.16)

Seperti penuturan dari TT:

“Nurut aja sama perintah-perintah tutor gt aja pasti ngak ada masalah kok mbak”(CW.17.16)

Dari berbagai pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengaruh pemerintah masih kurang dalam mendukung program pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal ini dengan baik. Sehingga perlu adanya berbagai tindakan tindakan taktis yang man bisa mengurangi permasalahan mengenai Standar Pelayanan Minimal ini agar bisa berjalan dengan baik dan beriringan dengan pendidikan formal.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Ketercapaian SPM Pendidikan Non Formal Data Dasar**

##### **a. Data Dasar**

- 1) Indikator Nomer 1 “Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Anak Sekolah menurut definisi WHO (World Health Organization) yaitu golongan anak yang berusia anatar 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya usia 13-15 Tahun masuk pada usia sekolah menengah pertama. Dengan berbagai masalah yang ada tak sedikit juga anak usia sekolah harus kehilangan waktunya karena berbagai hal. Salah satunya adalah masalah ekonomi masalah akses pendidikan hingga masalah yang lainnya. Sehingga angka putus sekolah di Indonesia cukup tinggi, menurut dara badan pusat statistika Tahun 2015 pada usia 13-15 tahun mencapai 2,21 persen atau 209.976 anak.

Dari data angka putus sekolah di Kota Magelang sangat sedikit, namun dilihat dari data warga belajar yang ada di 3 lembaga sangat banyak sekali, biasanya berasal dari daerah lainnya. Peserta didik adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Tanpa adanya peserta didik proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Menurut Dwi Siswoyo,

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Sosok peserta didik pada umumnya merupakan sosok anak yang

membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. (Dwi Siswoyo, 85:2013)

Pemaparan dari beberapa narasumber bisa diambil kesimpulan bahwa Kota Magelang memiliki angka putus sekolah tidak melebihi 10 persen dari jumlah usia anak sekolah. Dilihat dari banyaknya warga belajar di 3 Lembaga Non formal yang ada di Kota Magelang ini, beberapa faktor salah satunya warga belajar bukan hanya berasal dari Kota Magelang saja, melainkan dari Kota Temanggung dan Kabupaten Magelang juga. Sehingga dilihat dari Data yang ada di atas Indikator 1 sudah sesuai Standar Pelayanan Minimal untuk wilayah Kota Magelang.

**2) Indikator Nomer 2 “Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 persen.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Tugas peserta didik atau warga belajar adalah belajar dengan baik untuk menghindari atau mengubah cara-cara yang salah itu agar tercapai hasil belajar yang maksimal. Warga belajar atau peserta didik juga dituntut untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga memiliki rencana belajar yang jelas. Agar terhindar dari perbuatan belajar yang insidental. Jadi belajar harus merupakan suatu kebutuhan dan kebiasaan yang teratur bukan “seenaknya” saja.

Keaktifan belajar suatu individu berbeda dengan individu yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat keaktifan seseorang. Keaktifan belajar dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (Wina Sanjaya, 94: 2009):

- a) Adanya ketertiban siswa baik secara fisik, moral, emosional, maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran.
- b) Siswa belajar secara langsung
- c) Adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim yang kondusif
- d) Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran
- e) Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakasa. Terjadi interaksi dua arah anatar siswa dengan guru.

Faktor yang sangat mempengaruhi keaktifan belajar warga belajar hal ini adalah faktor guru, keluarga, dan motivasi masing-masing individu. (Duprijono, 38: 2010) Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa mencakup faktor dalam yaitu motivasi siswa dan faktor luar mencakup keluarga, guru, dan masyarakat.

Realita di PKBM yang ada di Kota Magelang sangat berbeda dari yang diharapkan, namun sebagai pengelola dan juga tutor juga memiliki harapan agar dapat aktif dari awal hingga akhir masa sekolahnya. Sehingga harapan pembelajaran yang ada benar-benar ada manfaatnya, bukan hanya mengejar target sebuah Ijazah saja untuk menunjang suatu pekerjaan ataupun untuk mencari kerja semata. Sehingga makna pembelajaran dapat dirasakan dengan penuh oleh warga belajar, tutor maupun tentor.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan,

Peserta didik adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan. (Shafique Ali Khan, 62: 2005)



Banyak warga belajar Paket B di Kota Magelang tidak aktif dalam proses pembelajaran, dengan berbagai alasan salah satunya karena masalah dengan pekerjaan yang sudah ada. Dalam hal ini biasanya banyak warga belajar yang tidak aktif dalam pembelajaran, biasanya pembelajaran mulai aktif lagi ketika menjelang ujian tengah semester ataupun ujian kenaikan kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator nomer 2 ini belum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

**b. Standar Kompetensi Kelulusan**

**1) Indikator Nomer 4 “Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Ujian kesetaraan menurut Permendikbud No 5 Tahun 2015 tentang kriteria lulusan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada program paket B/setara SMP/MTs. Ujian adalah sebuah bentuk pencapaian terakhir dari sebuah pendidikan, dengan dibuktikan dengan sebuah Ijazah yang berguna untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya ataupun untuk keperluan bekerja. Namun sebelum mendapatkan Ijazah warga belajar juga harus menempuh yang namanya sebuah pendidikan.

Dalam indikator nomer 4 ini mengenai “Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir program paket B lulus ujian kesetaraan” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004) sudah mencapai Standar

Pelayanan Minimal. Dilihat dari jumlah warga belajar yang mengikuti ujian kesetaraan paket B sudah mencapai 92 persen.

**2) Indikator Nomer 5 “Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Pendidikan pada dasarnya adalah salah satu batu loncatan untuk menuju dunia kerja. Pendidikan yang tinggi memberikan peluang yang lebih tinggi juga dalam sebuah rentang pekerjaan.

Warga belajar lulusan dari lembaga non formal kesetaraan banyak memilih untuk bekerja dengan alasan ekonomi ataupun awlanya sudah bekerja. Dari data yng ada lulusan lembaga pendiidkan non formal yang ada di Kota Magelang, 70 persen memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dari indikator nomer 5 tentang “Sejumlah 50 persen lulusan program paket B dapat memasuki dunia kerja” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004) sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Jumlah warga belajar yang diserap menjadi tenaga kerja lebih besar, meskipun demikian biasanya warga belajar juga ada yang bekerja dan juga lanjut pada pendidikan selanjutnya yaitu mengikuti program kejar paket C.

**3) Indikator Nomer 6 “Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA,SMK, MA atau Program Paket C.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Warga belajar memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan, namun minat belajar di pendidikan non formal begitu sangat rendah. Pendidikan menjadi hal yang sangat sekunder dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga dalam pendidikan yang ada pasti memiliki jenjang-jenjang untuk dicapai.

Indikator nomer 6 tentang “Sejumlah 50 persen lulusan program paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK,MA atau Program Paket C0.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004). Belum mencapai Standar Pelayanan Minimal karena dilihat dari warga belajar yang melanjutkan pada pendidikan tinggi sangat sedikit kalau diprosentasekan hanya 20 persen saja.

Warga belajar yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi biasanya juga didukung oleh faktor ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan warga belajar yang lain, namun tak lupa juga dukungan dari orang tua maupun motivasi dari warga belajar itu sendiri.

**4) Indikator Nomer 7 “Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sample mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Indikator nomer 7 mengenai “Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sample mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004) belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Mutu pendidikan dapat dilihat dari

nilai yang memuaskan dalam hasil akhir pendidikan, seperti hasil mid semester maupun hasil ulangan harian. Pembelajaran perlu diadakan evaluasi secara terjadwal dan berkala.

Kenyataan yang dipaparkan dalam hasil wawancara yang ada sangat memprihatinkan, karena warga belajar hanya akan datang saat mengikuti ujian semester ataupun semesteran saja, berarti dari kesimpulanya adalah bahwa warga belajar banyak yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik.

Dengan alasan berbagai kendala sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan sebagaimana pendidikan seharusnya yang mana ada pembelajaran yang kondusif dengan segala bentuk masukan moral dan yang lainnya. Mutu pendidikan yang mana bisa dilihat dari proses pembelajaran tidak dapat dilihat dan bahkan 50 persen pun tidak tercapai sesuai dengan standar pelayanan minimal.

**c. Standar Sarana Dan Prasarana**

**1) Indikator Nomer 3 (Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.)**

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2) Sarana Pendidikan adalah semua pernakat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai penunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah

segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan dan perabot yang langsung dipergunakan dalam proses belajar sekolah.

Pendidikan non formal Kota Magelang telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat baik dalam pemenuhan salah satu Indikator SPM yang ada. “Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004). Ketersediaan buku pegangan atau modul untuk warga belajar berasal dari dana APBD II Kota Magelang. Buku teks yang digunakan sebagai pegangan warga belajar dipinjamkan oleh PKBM. Buku dikembalikan setelah Ujian Akhir Semester (UAS).

Modul pembelajaran yang dimiliki di setiap PKBM sudah mencapai SPM, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat banyak buku yang memiliki kesamaan sehingga kurang variatif. Sebagian buku pengayaan yang dimiliki PKBM merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Pengadaan buku referensi berasal dari APBD II Kota Magelang.

**2) Indikator Nomer 10 “Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar mengajar memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan teknis pembelajaran.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang memiliki lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat beribatan, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Indikator nomer 10 menyatakan bahwa “Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar mengajar memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan teknis pembelajaran” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004) belum memenuhi standar yang ada. Karena dari hasil wawancara yang ada sarana dan prasarana yang ada di PKBM Kota Magelang dari segi sarana masih dipinjam oleh Pemerintahan Kota Magelang. Prasarana yang ada masih kurang memadai untuk proses pembelajaran yang ada disana.

**d. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik**

**1) Indikator Nomer 8 (Sejumlah 100 persen tutor program paket B yang diperlukan terpenuhi.)**

Dilihat dari indikator di atas jumlah tutor yang ada di setiap PKBM di Kota Magelang, maka jumlah yang ada sudah mencapai SPM. Karena dilihat dari jumlah tutor dan kebutuhan dari mata pelajaran yang diampu sudah terpenuhi.

Menurut Mulyadi (73: 2013) Tutor merupakan pendidik yang membantu warga belajar untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung selama proses pembelajaran keaksaraan berlangsung.

Tutor adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama membimbing, memotivasi dan memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik pada jalur pendidikan non formal. (PP No. 19/2005)

Menurut Knowles 1990:38) tutor sebagai fasilitator perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Menekankan suatu suasana yang kondusif untuk belajar
- b) Menciptakan mekanisme untuk perencanaan yang saling menguntungkan
- c) Mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan untuk pembelajaran
- d) Menformulasikan tujuan program yang dapat memenuhi/memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut
- e) Mendesain pola belajar berpengalaman
- f) Mengarahkan belajar berpengalaman dengan metode dan bahan belajar yang sesuai
- g) Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis ulang kebutuhan belajar selanjutnya.

Tutor harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sehingga bisa mewujudkan warga belajar yang memiliki moral dan etika untuk

menjunjung bangsa Indonesia. Dari segi jumlah tutor sudah memenuhi SPM, namun dari segi kualitas belum tentu, sehingga akan dibahas di indikator yang selanjutnya.

**2) Indikator Nomer 9 “Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.” (Permendiknas Nomer 129a/U/2004)**

Indikator nomer 9 ini belum mencapai SMP dilihat dari wawancara yang ada sebelumnya bahwa untuk mendapatkan kualifikasi tutor yang sesuai pasti akan mengalami berbagai kendala. Disalah satunya adalah jumlah tutor yang harus didik cukup banyak sehingga memerlukan dana yang relatif besar, dan dari sisi lain pemerintah tidak memiliki otoritas untuk mewajibkan para tutor memenuhi kualifikasi minimal. Meskipun sudah ada standar kualifikasi tutor dalam tingkat nasional yang hampir sama dengan pendidikan formal, namun pengaplikasian terjadi banyak kendala seperti anggaran, dan kebijakan pemerintah sendiri.

Menurut Sugito, M.A:

Tutor merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah program kesetaraan. Disamping membantu proses pendidikan dan belajar, tutor memiliki peran dalam memotivasi dan memberdayakan warga belajarnya. Berbeda pada jalur formal, peserta didik pada jalur pendidikan nonformal relatif kurang memiliki motivasi belajar dan merasakurang berdaya, sehingga tenaga pendidik atau tutor seharusnya yang berkualitas.

Banyak tutor paket B di Kota Magelang belum semuanya berkualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan juga hampir 50% tutor bekerja tidak sesuai



dengan bidang keahliannya dan kompetensinya. Kondisi ini menentukan masih banyak tenaga pendidik khususnya tutor program pendidikan kesetaraan Paket B yang belum memenuhi standar minimal. Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan khususnya paket B tetap berjalan apalagi di Kota Magelang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, meskipun terjadi banyak kendala.

Menyadari dengan koneksi yang ada, maka pemerintah di bawah Departement Pendidikan Nasional telah melakukan upaya peningkatan, baik menggunakan jalur strata ataupun dengan jalur pelatihan. Upaya Pemenuhan peningkatan kompetensi tutor melalui program-program pelatihan misalnya dengan pematangan pada program studi. Namun kenyataannya, belum memenuhi secara luas mengenai kualifikasi tutor secara menyeluruh sehingga perlu adanya pengembangan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan andragogik tutor yang lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan salah satu misi pendidikan nasional adalah pengupayaan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan mengupayakan keberadaan tutor yang profesional. Tutor adalah agen pembelajaran yang mana harus memiliki kompetensi agar profesional dalam menjalankan tugasnya.

Apa yang dimaksud tutor yang profesional paling tidak mempunyai ciri-ciri (Supriadi , 1998: 179) yakni

- (1) mempunyai komitmen pada proses belajar peserta didik:
- (2) menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara-cara mengajarkannya:
- (3) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya:
- (4) merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

Tanpa tutor menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar tanpa tutor dapat mendorong warga belajar untuk belajar sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

## **2. Kendala Pencapaian SPM Pendidikan Non Formal**

Sesuai dengan indikator Permendiknas Nomer 129a/U/2004 mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal masih belum memenuhi standar, dari segi sarana dan prasarana belum terpenuhi. Kenyataannya yang ada dilapangan banyak ruang kelas dan alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran terlihat seadanya. Pengadaaan media pembelajaran seperti alat peraga, LCD Proyektor, anggaran yang dimiliki PKBM tidak cukup untuk membeli hal tersebut karena harganya yang cukup mahal.

Dari tenaga pengajar dan pendidik juga banyak yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan secara nasional. Dari tentor yang tidak sesuai dengan kualifikasi maka banyak yang melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan mana mestinya. Seharusnya pembelajaran didukung

dengan RPP, Evaluasi dan yang lainnya. Tetapi kenyatannya di pendidikan non formal tidak dilaksanakan dengan baik.

### **3. Solusi Pencapaian SPM Pendidikan Non Formal**

PKBM harus mampu menyusun skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada. Seperti meningkatkan kompetensi tutor dan pengelola agar dicapai manajemen PKBM yang efektif dan efisien, sehingga SPM dapat terpenuhi. Pengimplementasian adalah tahap penyelenggraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.

Guna mencapai SPM PNF sebesar 100% perlu beberapa langkah yang diperlukan. Kendala dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya adalah karena kurangnya informasi mengenai SPM pendidikan Non Formal.

Dilihat dari wawancara sedikit sekali yang mencapai mengenai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal untuk itu perlu pengalakan kembali mengenai Standar Pelayanan Minimal. Sehingga tentor dan pamong mengetahui standar apa saja yang harus dipenuhi, sehingga PKBM lebih memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Kelengkapan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar dan berpengaruh pada hasil belajar warga belajar dengan

adanya sarana dan prasarana yang lengkap proses pembelajaran akan optimal. Oleh karena itu kemampuan mengelola sarana dan prasarana PKBM harus dioptimalkan. PKBM maupun Dinas terkait harus mampu menyusun skala prioritas dalam pengadaan ruang kelas, alat tulis dan yang lainnya.

Untuk meningkatkan SDM yang dapat dilakukan adalah optimalisasi dari dinas pendidikan dan pengelola PKBM yang ada. Pengelola PKBM harus meningkatkan kompetensi dimana juga harus didukung oleh tutor. Salah satunya adalah memenuhi kualifikasi tutor sesuai dengan kualifikasi nasional.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari berbagai indikator standar pelayanan minimal dalam aturan Permendiknas 129a/U/2004 hanya 45 persen saja yang memenuhi standar pelayanan minimal yang ada. Implementasi standar pelayanan minimal disetiap indikator yang ada relatif berbeda satu dengan yang lainnya, untuk itu akan dijabarkan satu persatu:
  - a. Indikator nomer 1 sudah mencapai standar pelayanan minimal, dilihat hanya 2,21 persen angka putus sekolah yang ada di Kota Magelang.
  - b. Indikator nomer 2 belum mencapai standar pelayanan minimal, karena hampir 30 persen peserta didik tidak aktif mengikuti pembelajaran. Padahal untuk mencapai standar pelayanan minimal perlu 90 persen peserta didik aktif dalam pembelajaran yang ada.
  - c. Indikator nomer 3 sudah mencapai standar pelayanan minimal. Karena jumlah peserta didik sudah sama dengan jumlah buku atau modul yang dibutuhkan oleh peserta didik.
  - d. Indikator nomer 4 sudah mencapai standar pelayanan minimal yang ada, karena 92 persen peserta didik mengikuti ujian kesetaraan.
  - e. Indikator nomer 5 sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal, dilihat dari 70 persen peserta didik yang sudah lulus memasuki dunia kerja.

- f. Indikator nomer 6 belum sesuai dengan standar pelayanan minimal, menurut data yang ada hanya 20 persen saja yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
- g. Indikator nomer 7 belum sesuai dengan standar pelayanan minimal, melihat hanya 50 persen saja yang mengikuti uji sample. Untuk mencapai standar pelayanan minimal maka yang harus mengikuti uji sample adalah 90 persen peserta didik.
- h. Indikator nomer 8 sudah mencapai standar pelayanan minimal. Jumlah tutor yang dibutuhkan sama dengan jumlah murid yang diajar. Sebanyak 100 persen tutor program paket b terpenuhi dengan baik.
- i. Indikator nomer 9 belum mencapai standar pelayanan minimal yang ada. Kualifikasi tutor yang ada di Kota Magelang sangat rendah, menurut kualifikasi yang ada hanya ada beberapa saja yang sesuai dengan kualifikasi yang ada.
- j. Indikator nomer 10 belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ada. Dengan alasan sarana prasarana yang ada di ketiga lembaga PKBM yang ada adalah milik Pemerintah Kota sedangkan kewenangan milik dari Dinas Pendidikan, sehingga masih memiliki problematika secara internal.
- k. Indikator nomer 11 belum sesuai dengan standar yang ada. Karena data-data banyak yang belum terdaftar dan banyak data-data yang hilang.

2. Kendala yang ada dalam pemenuhan standar pelayanan minimal ini begitu banyak salah satunya adalah informasi mengenai standar pelayanan minimal yang kurang dikalangan tutor maupun pamong. Kendala lain adalah modul pembelajaran yang kurang variatif, sarana dan prasarana yang masih minim, dan yang paling sangat terlihat adalah peserta didik dengan berbagai kendala sehingga banyak yang tidak aktif mengikuti pembelajaran yang ada. Kualifikasi tenaga pendidik juga sangat diperlukan, namun kendala dalam perekrutan dan sistem yang ada di pendidikan non formal yang terkadang menyusahkan.
3. Solusi yang ditawarkan adalah, memberikan informasi yang lebih mengenai SPM dikalangan pengelola maupun tutor. Memberikan kebijakan yang jelas mengenai kualifikasi tutor yang ada. Memberikan skala prioritas dalam segala urusan mengenai management yang ada.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian terhadap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai SPM perlu digalakkan kembali secara menyeluruh, agar membantu PKBM ataupun tenaga pengajar dalam meningkatkan pelayanan dan baik langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatkan kualitas dan prestasi yang lainnya. Sehingga perlu adanya pemberian informasi mengenai SPM secara lebih jelas dan sesuai dengan kapasitas di setiap daerah dan PKBM yang ada.

2. Management dalam sarana dan prasarana masih kurang sehingga banyak masalah sarana dan prasarana yang belum memiliki titik terang, meskipun nantinya disetiap PKBM memiliki anggaran yang sangat tinggi namun management yang dilakukan dalam pengelolaan masih sangat minim pasti akan berdampak pada ketidak efektifan dalam menggunakan dana yang ada. Sehingga kurang maksimal dan berjalan dengan baik.
3. Pendidik dan tenaga pendidik masih bermasalah dalam sistim perekrutan dan tentunya disetiap PKBM di Kota Magelang masih belum memiliki kualifikasi tutor yang sesuai dengan kualifikasi tutor nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ara Hidayat. 2012. Pengelolaan Pendidikan : Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah. Kaukaba. Yogyakarta
- Andi Astry. 2015. Standar Pelayanan Minimal Tingkat Pendidikan Dasar. <http://mommiesdaily.com/2014/12/16/standar-pelayanan-minimal-di-tingkat-pendidikan-dasar/>. Diakses Tanggal 06 Oktober 2015 pukul 09.00
- Budi Winarno, MA, PhD. 2014. Kebijakan Publik teori, proses, dan studi kasus, PT. Buku Seru . Jakarta.
- Farida Yusuf Ttayibnapis, M.Pd. 2000. Evaluasi Program. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Dwi Siswoyo. 2013. Ilmu Pendidikan. UNY Press. Yogyakarta
- D Sudjana S. 2004. Pendidikan NonFormal. Falah Production. Bandung.
- Hepikus. 2012. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau. Jurnal-publikA. Volume 1, Nomer 1, Desember 2013. Diakses melalui: <http://jurnalnasional.ciki.me/index.php/ian/article/viewFile/12/21> pada senin, 14 Maret 2016 pukul 20.03
- Herwin. 2012. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Jurnal. Program studi perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Diakses melalui <http://pasca.unand.ac.id/id.wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PECAPAIAN-STANDAR -PELAYANAN-MINIMAL.pdf> pada Senin 14 Maret 2016 pukul 20.35
- Inom Nasution. 2010. Jurnal Otonomi Daerah dan Pendidikan. Volume 1. Nomer 2. Juli-Desember 2010.
- Iskandar R. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. Gaung Persada
- Keputusan Menteri Nomer 129A/U Tehun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- Kompas Cetak. 2011. 88,8 persen sekolah dibawah standar. Diakses melalui <http://entertainment.kompas.com/read/2011/03/23/10321298/88.8.persen.sekolah.di.bawah.standar>. Pada senin, 14 Maret 2016 pukul 19.56
- Kurniawan, Op.Cit., hlm. 4
- Ledy Sunarto. 2013. Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Strategi Grup Investigation Pada Mapel PKn Materi Perundang-Undangan Siswa Kelas V SD Negeri 01 Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Diakses Melalui [http://eprints.ums.ac.id/23776/15/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23776/15/NASKAH_PUBLIKASI.pdf) Diakses 26 Mei 2016 pukul 12:45

- Lester, James P dan Steward, Josep Jr. 2000. Public policy: An Evolutionari Approach. Belmont. Wadsworth
- Lijan Poltak Sinambela,dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasution. 2011. Metodologi Research (Penelitian Ilmiah) Bumi Aksara: Jakarta
- Nurhatti Fuad. 2014. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat konsep dan Strategi Implementasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mastuhu. 2003. Menata ulang pemikiran sistem pendidikan nasional dalam abad 21. MSI. Universitas Indonesia. Jakarta
- M.Saleh Marzuki. 2012. Pendidikan Non Formal dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Oentarto. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Gramedia: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2008 Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomer 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Permen Nomer 03 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B Dan Program Paket C
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- Permendikbud Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2005 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Penyelenggaraan Ujian Nasional, Dan Penyelenggraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/Mts Atau Sederajat Dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. 2004. Sistem manajemen kinerja otonomi daerah. Lembaga Administrasi Negara.

- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2008. Pelayanan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sanjaya Wina. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana.
- Shafique Ali Khan. 2005. Filsafat Pendidikan Al-Ghazali. Pustaka Setia. Bandung
- Solichin Abdul Wahab. 2008. Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. PT Sinat Grafika. Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta
- Sudjana. 2002. Metode Statistika. PT. Tarsito. Bandung
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Syaiful Sagala. 2011. Kemampuan Profesi dan Guru dan Tenaga Kependidikan. Alfabeta. Bandung
- Syafarudin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam pendidikan konsep, strategi, dan aplikasi. PT. Grasindo. Jakarta
- Tatang M. Amirin. 2013. Manajemen Pendidikan. UNY Press. Yogyakarta
- Moestopadidjaja. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang model-model perumusan Implementasi dan Evaluasi. Gramedia. Jakarta
- Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomer 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Umberto Sihimbing. 2012. Pengelolaan Pendidikan, konsep, prinsip, dan aplikasi mengelola pesantren dan madrasah. Rineka Cipta: Jakarta
- Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1
- Yoyon Suryono dan Sumarno. 2013. Pembelajaran Kewirausahaan Masyarakat. Aditya Media. Yogyakarta
- Vibriyanthy, R., & Fauziah, P. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Di Homeschooling Kak Seto Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 75 - 85. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/2358>

LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENGELOLA PKBM**

**I. IDENTITAS**

Nama : (laki – laki/perempuan)  
Jabatan :  
Usia :  
Alamat :

**II. PERTANYAAN**

**A. Tingkat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Apakah warga belajar masih usia sekolah?
2. Berapa kuota untuk warga belajar kesetaraan paket B di PKBM?
3. Berapa jumlah Warga belajar di lembaga PKBM?
4. Berapa Jumlah ruangan yang ada ?
5. Apakah ada warga belajar yang tidak aktif namun namanya terdaftar?
6. Apakah warga belajar dapat mengikuti ujian Nasional kesetaraan paket B?
7. Apakah PKBM ini milik pemerintah atau yayasan?
8. Apakah hasil Ujian Nasional memenuhi standar kelulusan minimal?
9. Berapa prosentase warga belajar yang memasuki dunia kerja?
10. Berapa prosentase warga belajar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?
11. Bagaimana Mutu pendidikan Kesetaraan paket B di Kota Magelang?
12. Apakah warga belajar mencapai target yang telah ditentukan?
13. Berapakah tutor yang ada di PKBM ini ?
14. Apakah tutor murni mengajar di PKBM saja?
15. Apakah ada tutor yang mengajar di pendidikan formal?
16. Apakah jumlah tutor di PKBM terpenuhi sesuai dengan kebutuhan?
17. Berapakah tutor yang berasal dari pendidikan formal?
18. Apakah ada kualifikasi tertentu untuk menjadi tutor di PKBM ini?
19. Apakah Standar kualifikasi tutor sudah sesuai dengan standar kualifikasi Tutor nasional?
20. Apakah proporsi tutor ideal dengan jumlah warga belajar yang ada?
21. Bagaimana dukungan pemerintah dalam menunjang kinerja tutor?
22. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung proses pembelajaran?
23. Apakah dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang mendukung?
24. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar?
25. Apakah tutor menguasai media pembelajaran yang ada?

26. Apakah ada pelatihan khusus tentang media pembelajaran?
- III.** Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang
1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
  2. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang menghambat pengimplementasian standar pelayanan minimal dalam kesetaraan paket B di kota magelang?
  3. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana menjadi kendala?
  4. Apakah kualifikasi tutor menjadi kendala dalam proses pembelajaran?
  5. Apakah peraturan dari dinas pendidikan menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran?
- IV.** Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang
1. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
  2. Bagaimana Solusi untuk mengatasi pihak-pihak tertentu yang menghambat pengimplementasian standar pelayanan minimal dalam kesetaraan paket B di kota magelang?
  3. Bagaimana solusi untuk sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran?
  4. Bagaimana solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian kualifikasi tutor dalam proses pembelajaran?
  5. Bagaimana solusi untuk menanggulangi peraturan pemerintah yang ada demi terlaksannya proses pembelajaran?

## **PEDOMAN WAWANCARA TUTOR**

### **I. IDENTITAS**

Nama : (laki – laki/perempuan)  
Jabatan :  
Usia :  
Alamat :

### **II. PERTANYAAN**

#### **A. Tingkat Implementasi Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Apakah peserta didik juga aktif dalam proses pembelajaran?
2. Apakah warga belajar dapat mengikuti ujian nasional kesetaraan?
3. Apakah tutor yang mengajar sesuai dengan bidang pendidikannya?
4. Apakah tutor mendapat pelatihan dan pembekalan dari Dinas Pendidikan?
5. Apakah ada kualifikasi tertentu untuk menjadi tutor di PKBM ini?
6. Apakah sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran sudah lengkap?
7. Apakah sarana prasarana sudah sesuai dengan standar teknis lapangan?
8. Apakah dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang mendukung?
9. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar?
10. Apakah media pembelajaran yang digunakan disediakan oleh PKBM?

#### **B. Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
2. Apakah kualifikasi tutor menjadi kendala dalam proses pembelajaran?
3. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana menjadi kendala?
4. Apakah usia warga belajar yang sangat berbeda menjadi kendala dalam proses pembelajaran?

#### **C. Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan kualifikasi tutor?
3. Bagaimana solusi untuk sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi usia warga belajar yang sangat berbeda dalam proses pembelajaran?

## **PEDOMAN WAWANCARA DINAS PENDIDIKAN**

### **I. IDENTITAS**

Nama : (laki – laki/perempuan)  
Jabatan :  
Usia :  
Alamat :

### **II. PERTANYAAN**

#### **A. Tingkat Implementasi Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Berapa angka putus sekolah di Kota Magelang pada usia 12-16 tahun?
2. Berapa lembaga yang menyediakan program kesetaraan di Kota Magelang?
3. Apakah Dinas menyediakan modul pembelajaran?
4. Apakah Dinas Pendidikan menyediakan alat-alat laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran?
5. Apakah dinas menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran?
6. Berapa pengelola disetiap lembaga yang ada?
7. Apakah jumlah tutor terpenuhi?
8. Apakah jumlah warga belajar mencapai target?
9. Apakah kualifikasi tutor tercapai sesuai SPM?
10. Apakah sarana dan prasarana di PKBM sudah memenuhi standar SPM?
11. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar?
12. Apakah ada pembinaan dalam Standar pelayanan Minimal?
13. Apakah penyusunan rencana kerja mencapai target SPM?
14. Apakah penyusunan Standar kerja mencapai target SPM?
15. Apakah ada penilaian pengukuran kinerja?
16. Apakah penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM terpenuhi?

#### **B. Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelan**

1. Apakah penentuan kualifikasi tutor menjadi kendala dalam pemenuhan SPM?
2. Apakah sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pemenuhan SPM?

#### **C. Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Bagaimana cara mengatasi kendala kualifikasi tutor untuk pemenuhan SPM?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam hal sarana dan prasarana?



## **PEDOMAN WAWANCARA WARGA BELAJAR**

### **I. IDENTITAS**

Nama : (laki – laki/perempuan)  
Jabatan :  
Usia :  
Alamat :

### **II. PERTANYAAN**

#### **A. Tingkat Implementasi Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Apakah pihak PKBM menyediakan modul untuk proses pembelajaran?
2. Apakah warga belajar mendapatkan semua modul?
3. Apakah ada media yang digunakan selama proses pembelajaran?
4. Apakah warga belajar memahami pembelajaran selama penggunaan media pembelajaran tersebut?
5. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar?
6. Apakah tutor menguasai materi yang diajarkan?
7. Apakah tutor datang tepat waktu?
8. Apakah tutor selalu memberikan evaluasi proses pembelajaran?
9. Apakah diadakan evaluasi pembelajaran secara berkala dan terjadwal?
10. Apakah sarana dan prasarana yang ada di PKBM dalam kondisi yang baik?
11. Apakah sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran?

#### **B. Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Apakah anda kesulitan dalam mencari modul?
2. Apakah anda mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan tutor?
3. Apakah anda mengalami kendala dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai?
4. Apakah anda mengalami kendala dengan jadwal pembelajaran?

#### **C. Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang**

1. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala kesulitan mencari modul pembelajaran?
2. Bagaimana mengatasi kendala dalam berkomunikasi dengan tutor?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah jadwal pembelajaran?

### Catatan Wawancara 1

#### I. IDENTITAS

Nama : NN  
Hari dan tanggal : Kamis, 17 Februari 2016  
Pukul : 14.00-15.00 WIB  
Lokasi : PKBM Permata

#### II. PERTANYAAN

1. "Iya, tapi masih ada juga yang sudah tidak usia sekolah, selain itu biasanya mereka juga bekerja, persentasenya sekitar 70% dan 30 % dari usia sekolah dan yang tidak usia sekolah." (CW.1.1)
2. "Dalam satu tahun ajaran PKBM hanya menyediakan 40 kursi untuk warga belajar dengan jumlah dua kelas saja." (CW.1.2)
3. "Untuk Kesetaraan paket B sekitar 92 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX." (CW.1.3)
4. "8 ruangan" (CW.1.4)
5. "Ada, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 8 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 22 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 38 yang tidak aktif 10 orang." (CW.1.5)
6. "Bisa mbak, asalkan semua persyaratan memenuhi" (CW.1.6)
7. "PKBM ini pinjaman dari Pemerintah Kota Magelang mbak, tapi berada di bawah naungan dari Dinas Pendidikan mbak." (CW.1.7)
8. "Iya mbak, rata-rata nilai ujian nasional warga belajar memenuhi SKL, SKL Nasional 6,5 sedangkan Nilai rata-rata di PKBM 7,0." (CW.1.8)
9. "60 persen dari 40 warga belajar masuk dunia kerja mbak, soalnya banyak dari warga belajar Paket B yang sudah disambi kerja." (CW.1.9)
10. "20 persen mbak dari 40 jumlah warga belajar, dan sisanya biasanya sudah menikah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mbak." (CW.1.10)
11. "Tutor di PKBM ini khususnya yang kesetaraan paket B ada 14 tutor mbak." (CW.1.11)
12. "Tidak lah mbak, biasanya diambil dari guru-guru yang mengajar di formal kok," (CW.1.12)
13. "Hampir semua tutor mengajar di pendidikan formal mbak, dan biasanya di PKBM hanya untuk menambah waktu atau hanya berupa pelayanan sosial" (CW.1.13)
14. "Jelas sesuai dengan kebutuhan ya mbak, sesuai juga dengan latar pendidikan yang ada." (CW.1.14)
15. "Semuanya mbak dari 14 tutor semuanya dari pendidikan formal semua" (CW.1.15)

16. “Sebenarnya sih ada mbak, tapi ya bagaimana ya sekarang yang penting mau ngajar aja dan sesuai dengan mata pelajarannya.” (CW.1.16)
17. “Biasanya dukungan hanya berbrntuk pelatihan atau diklat saja mbak, sednagkan dari segi keuangan juga masih kurang.” (CW. 1.17)
18. “Ya beginilah mbak keadaan di PKBM, mau dibilang sudah ya belum tapi ya cukup dan layak untuk pemebelajaran.” (CW.1 18)
19. “Biasnaya tergantung dengan tutor sih mbak, kadang ada yang menggunakan kadang juga hanya menggunakan modul saja. (CW. 1.19)
20. “Sudah, modul dan media pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan, namun kurang dimanfaatkan dengan baik.” (CW. 1.20)
21. “Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)
22. “Ada mbak, biasanya P2PNF semarang yang mengadakan secara berkala.” (CW.1.22)
23. “Kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal adalah keuangan mbak, ya kalau keuangan sedikit bagaimana bisa menjalankan program dengan baik.” (CW. 1.23)
24. “Kalau pihak lain sih ngak ada mbak.” (CW.1.24)
25. “Salah satunya iya, sarana dan prasana kan juga masih minjam dan inventaris disini juga.” (CW.1.25)
26. “Sebenarnya tidak, karena PKBM biasanya yang penting tutor mau mengajar saja sudah bersyukur.” (CW.1.26)
27. “Tidak ada lah mbak, soalnya semua wewenang proses pembelajaran diserahkan langsung pada pengelola PKBM. (CW.1.27)
28. “Solusinya ya mbak, kalau anggaran ditambah aja, pasti pengimplementasian juga akan maksimal.” (CW.1.28)
29. “Sarana dan prasarana ditambah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada aja mbak.” CW.1.29)
30. “Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI semarang untuk menyetarakan standar sesuai kulifikasi Nasional.” (CW.1.30)
31. “Solusinya ya biasnya kita tetep jalan mbak, yang penting proses pemebelajaran tetep berlangsung dengan baik saja .” (CW.1.31)

## Catatan Wawancara 2

### I. IDENTITAS

Nama : IN  
Hari, Tanggal : Jum'at 18 Februari 2016  
Jam : 14.00-15.00 WIB  
Lokasi : PKBM Kuncup Mekar

### II. PERTANYAAN

1. "Banyak yang usia sekolah mbak, diabndingkan yang tidak, tapi ya itu biasanya mereka sudah bekerja atau sudah menikah." (CW.2.1)
2. "Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga." (CW.2.2)
3. "Untuk Kesetaraan paket B sekitar 89 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX." (CW.2.3)
4. " 7 ruangan" (CW.2.4)
5. "Pasti ada mbak, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 7 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 14 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 35 yang tidak aktif 13 orang." (CW.2.5)
6. "Kalau memenuhi persyaratan ujian selalu kami ikutkan mbak." (CW.2.6)
7. "Semua gedung yang ada di PKBM kota magelang semua milik Pamerintah Kota magelang namun berada dibawah naunagn Dinas pendidikan Kota Megelang." (CW.2.7)
8. "Sudah mbak, disini alhamdullilah sudah memenuhi SKL dengan nilai rata-rata 7,3 dari yang nilai SKL yang hanya 6,5." CW.2.8)
9. "Kalau dilihat dari jumlah warga belajar tahun lalu sekitar 75 persen dari 38 anak memasuki dunia kerja mbak, soalnya kan memeng sebagian dari mereka sudah bekerja sebelumnya." (CW. 2.9)
10. "Dari 38 siswa tahun lalu hanya 10 persen saja mbak, itu saja dengan berbagai bujukan sayng sudah saya lakukan ." (CW.2.10)
11. "Ada 14 tutor mbak sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan." (CW.2.11)
12. "Jelas tidak mbak, biasanya kita ambil dari pendidikan formal biar sesuai dengan mata pelajaran." (CW.2.12)
13. "Hanya 1 orang saja mbak yang hanya ngajar di sini saja, biasanya mereka juga mengajar di pendidikan formal " (CW.2.13)
14. "Ada yang terpenuhi ada yang tidak mbak, dari 14 tutor yang ada ada 4 tutor yang tidak sesuai dengan mata pelajaran." (CW. 2.14)
15. "13 orang " (CW. 2. 15)
16. "Ada lah mbak pastinya, namun kalau harus sesui dengan kulifikasi pasti pada ngak mau soalnya kan sukarela ya, jadi ya biasanya yang mau aja jadi tutor disini." (CW.2.16)
17. "Kalau dari pemerintah mungkin bisa dibilang ngak ada kali ya mbak, yang banyak itu dari P2PNFI biasanya mengadakan banyak pelatihan untuk tutor." (CW. 2.17)

18. “Sudah mbak, bisa dilihat saja modul, alat peraga semua ada dan semua digunakan untuk proses pembelajaran.” (CW.2. 18)
19. “Kalau disini pemebelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan LCD atau modul pemeblaajatron yang da di PKBM mbak.” (CW. 2.19)
20. “Kalau disini alhamdulillah sudah mbak, media pemebelajaran yang ada sering kami gunakan, soalnya melihat anak-anak Paket B sering kesusahan kalau tidak menggunakan media pembelajaran.” (CW. 2.20)
21. “Ada 2 tutor yang kurang mahir dalam menggunakan media pemebelajaran yang moderen mbak, karena memang sudah tua.” (CW.2.21)
22. “Ada mbak, setiap setengah tahun sekali biasanya PKBM selalu mengirim tutor untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh P2PNFI di Semarang.” (CW.2.22)
23. “Banyak mbak kalau bicara kendala, salah satunya ya masalah anggaran lah ya pastinya. Karna memang kalau anggaran itu masalah yang sanagt krusial untuk menunjang kelancaran.” (CW. 2.23)
24. “Ada mbak, warga belajar yang terdaftar namun tidak aktif itu lo. Jadi membuat data yang ada sering tidak falid.” (CW.2.24)
25. “Pasti iya, kalau sarana dan prasaran kurang bagaimana proses pembelajaran yang ada berlangsung dengan lancar. .” (CW.2.25)
26. “Kita tidak pernah memberatkan tutor dengan kualifikasi tersebut,, yag penting mau mengajar saja .” (CW.2.26)
27. “Peraturan dari dinas pendidikan sangat membantu proses pengelolaan PKBM dalam proses pembelajaran yang ada kok mbak.” (CW.2.27)
28. “Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi dari anggaran, kualifikasi tutor dan pengelolaan PKBM itu sendiri ya mbak.” (CW.2.28)
29. “Pembenahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana aja kali ya mbak biar bisa digunakan semaksimal mungkin.” CW.2.29)
30. “ Kalau masalah tutor yang ada kita mengikutsertakan dalam pelatihan pengajaran yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan maupun dari swasta.” (CW.2.30)
31. “Agar pembelajaran yang penting berlanjut maka sering kita mengabaikan peraturan dari pemerintah.” (CW.2.31)

### **Catatan Wawancara 3**

#### **I. IDENTITAS**

Nama : KS  
Jabatan : PKBM Kuncup Mekar  
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016  
Jam : 15.30-16.00 WIB

#### **II. PERTANYAAN**

1. “Ya bagaimana ya mbak, kalau anak Paket B susah seriusnya, secara keseluruhan mungkin yang aktif hanya 50 persen saja.” (CW.3.1)
2. “Hampir semua warga belajar mengikuti mbak, untuk ujian kesetaraan kalau sayarat kehadiran memenuhi.” (CW.3.2)
3. “Kalau di PKBM sini semuanya seseai dengan bidang pendidikan mbak, soalnya saya juga dari sekolah formal mbak.” (CW.3.3)
4. “Pelatihan, seiring mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)
5. “Kalau saya dulu nggak ada mbak, langsung ngajar aja kok mbak.” (CW. 3.5)
6. “Belum mbak, namanya juga PKBM, semuanya masih minjam mbak, media pembelajaran saja masih minim.” (CW.3.6)
7. “Belum kayaknya mbak, bisa dilihat saja dilapangan seperti apa.” (CW. 3.7)
8. “Karena saya mengajar bahasa indonesia, saya tidak terlalu banyak media pembelajaran mbak, dan itupun media pemebelajaran saya disini juga tidak ada.” (CW. 3.8)
9. “Biasnaya sudah disesuaikan mbak dari kurikulum yang ada, kita sebagai tutor hanya menyampaikan saja.” (CW. 3.9)
10. “Tidak mbak, kalau saya menggunakan media biasanya saya pinjam disekolah formal tempat saya mengajar.” (CW.3.10)
11. “Banyak mbak, gaji saya sebagai tutor saja kurang, sarana dan prasana disini juga kurang mendukung dan warga belajar juga kurang kondusif” (CW. 3.11)
12. “Tidak lah mbak, yang penting pembelajaran terlaksana aja.” (CW. 3.12)
13. “Kalau yang ini jelas lah ya mbak, soalnya kan tempat pemebelajaran gabung dengan SD wates 4, jadi banyak endala kalau pas bersamaan penggunaanya.” (CW.3.13)
14. “Terkadang iya mbak, soalnya pasti daya tangkap setiap umur juga relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya.” (CW. 3.14)
15. “Pemerintah memberikan anggaran yang lebih tinggi kali ya mbak agar lebih banyak yang tercapai, untuk warga belajar masih perlu pendekatan yang lebih baik lagi.” (CW. 3.15)
16. “Kalau menurut saya mah harus ada seleksi yang lebih jelas ya mbak, dan dibawah dinas pendidikan langsung, agar status kita sebagai tutor juga diakui pinginya” (CW. 3.16)

17. “Masalah sarana dan prasarana itu mah urusnya dengan masalah anggaran ya mbak, kalau itu mah tergantung dari kebijakan pemrinahnya saja” (CW. 3.17)
18. “Kalau saya dengan metode pembelajaran yang saya berikan sudah membantu proses pembelajaran, sehingga tidak terlalu terkesan mengurui bagi warga belajar yang jauh lebih tua dibandingkan saya. (CW.3. 18)

## Catatan Wawancara 4

### I. IDENTITAS

Nama : SA  
Hari dan tanggal : Rabu, 24 Februari 2016  
Jam : 16.0-16.30 WIB  
Lokasi : PKBM Kuncup Mekar

### II. PERTANYAAN

1. "Menyediakan mbak, biasanya ada yang dibagikan ada yang mengambil di TBM." (CW.4.1)
2. "Seharusnya mendapatkan mbak, tapi kadang ada warga belajar yang tidak mau membawa modulnya." (CW.4.2.)
3. "Jarang mbak, paling paling Cuma modul kalau enggak ya LCD itu saja biasanya kalau pertemuan yang banyak atau pelatihan saja kok mbak," (CW.4.3.)
4. "Kalau tutor-tutor yang sudah tua biasanya cuma pake modul mbak, tapi kalau pae media pembelajaran biasanay lebih jelas" (CW.4.4)
5. "Sesuai mbak kan biasanya petemuan sebelumnya sudah dijelaskan dahulu, seperti apa media yang akan digunakan dalam pertemuan selanjutnya." (CW.4.5)
6. "Menguasai kali ya mbak, soalnya saya juga ngak ngerti heheheh.." (CW.4.6)
7. "Tepat waktu mbak mungkin satu atau dua tutor sja yng sering telat, katanya beliau juga ngajar di SMP formal, jadi biasanay waktu juga ditambah kok kalau beliau telat." (CW4.7)
8. "Evaluasinya itu Mid semester dan ulangan-ualang tidak ya mbak? Kalau itu sih ada" (CW.4.8)
9. "Evaluasi pembelajaran itu kan dijadwal dari PKBM mbak, kalau yang dari tutor langsung jarang ada mbak." (CW.4.9)
10. "Masih baik kok mbak, layak lah untuk pembelajaran." (CW.4.10)
11. "Iya kali ya mbak, kalau enggak ada meja dan kursi giman saya belajarnya." (CW.4.11)
12. "Tidak mbak soalnya ditaruh di TBM kok, jadi mudah mengambilnya." (CW.4.12)
13. "Tekadang iya mbak, kalau tutornya pas dapat yang galak, kadang ada juga tutornya yang judesnya minta ampun," (CW.4.13)
14. "Tidak mbak, soalnya yang penting bagi saya proses pembelajaran ada, dan modul juga ada, kalua saya gitu." (CW.4.14)
15. "Iya mbak, soalnya saya kan sudah kerja jadi seminggu di jadwal masuk 3 kali saya hanya bisa masuk 2 hai saja." (CW.4.15)
16. "Kadang via telepon mbak, soalnya kan zaman sudah canggih" (CW.4.16)
17. "Kalau jadwal kerja saya kan ngak bisa diganti mbak, jadi ya pinginya jadwal aja menyesuaikan dengan kita yang bekerja" (CW.4.17)



## Catatan Wawancara 5

### I. IDENTITAS

Nama : SH  
Jabatan : Staf PNF  
Lokasi : Dinas Kota Magelang  
Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Februari 2016  
Jam : 10.00-11.00 WIB

### II. PERTANYAAN

1. “Dari data tahun 2015, ada 42 siswa.” (CW. 5.1)
2. “ Ada 3 mbak, PKBM upaya terampil, PKBM kuncup mekar dan PKBM Permata saja.” (CW. 5.2)
3. “Kalau dari dinas pendidikan sendiri tidak ada mbak, karena keterbatasan anggaran.” (CW. 5.3)
4. “Tidak ada anggaran mbak untuk pengadaan alat dan yang lainnya” (CW.5.4)
5. “Dinas pernah mengadakan sarana dan prasanana di salah satu pkb saja, yaitu PKBM permata yaitu pengadaan meja dan kursi” (CW. 5.5)
6. “Disetiap PKBM biasanya yang terlapor di dinas pendidikan sekitar 7-8 orang.” (CW.5.6)
7. “Terpenuhi mbak, bisa dicek langsung disetiap PKBM yang bersangkutan”(CW.5.7)
8. “Kebanyakan dari semua PKBM tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi tutor, yang penting mau mengajar saja” (CW. 5.8)
9. “Dari ketiga PKBM yang ada belum ada yang sesuai dengan standar SPM mbak,” (CW.5.9)
10. “ Media pembelajaran yang sudah diajarkan biasanya yang dibutuhkan oleh warga belajar, namun kalau pengimplementasian kan tergantung dengan tutornya mbak.” (CW. 5.10)
11. “ Pembinaan dari Dians kota belum pernah ada mbak, tapi kalau dari PNFI semarang sudah pernah mbak, namun hanya perwakilan saja.” (CW.5.11)
12. “Rencana kerja biasanay sudah sesuai dan SPm, namun karena banyak kendala sehingga tidak bisa mencapai target” (CW.5.12)
13. “Standar kerja setiap lembaga mencapai target SPM dilihat dari pengelolaan dan lulusan yang dihasilkan” (CW.5.13)
14. “Ada mbak, tapi dari ketiga lembaga yang ada yang pernah dinilai adalah PKBM kuncup mekar pada tahun 2015 dan tahun 2016 ini rencananya adalah upaya terampil.” (CW.5.14)
15. “Belum terpenuhi mbak, karna yang baru dinilai kan baru PKBM kuncup mekar saja.” (CW.5.15)
16. “Seharusnya tidak menjadi kendala asalkan kualifikasi itu dipenuhi oleh setiap lembaga, namun karena tidak dipenuhinya itu menjadi kendala saat akreditasi ataupun penilaian yang lainnya.” (CW.5.16)

17. “Selama ini masih menjadi kendala mbak, namun tetep diusahakan ada pembelajaran dengan semua keterbatasan yang ada.” (CW.5.17)
18. “Penegasan dari pusat mengenai kualifikasi tutor dan kejelasan peraturan yang ada.” (CW.5.18)
19. “Sarana dan prasarana itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)

## Catatan Wawancara 6

### I. IDENTITAS

Nama : FO  
Hari dan tanggal : Jum'at, 26 Februari 2016  
Jam : 13.00-14.20 WIB  
Lokasi : PKBM Permata

### II. PERTANYAAN

1. "Ada mbak, biasanya setiap semester kita dibagikan modul kok"(CW.6.1)
2. "Kalau hadir pas pembagian dapat mbak, kalau yang enggak hadir biasanya bisa ngambil tapi nemui pengelola gitu"(CW.6.2.)
3. "Engak ada mbak, paling pake buku aja kok para tutor njelasinya" (CW.6.3.)
4. "Faham mbak, kan cuma pake modl aja" (CW.6.4)
5. "Sesuai mbak, kan yang dibutuhkan warga belajar kan biasanya penjelasan saja dari modul yang ada" (CW.6.5)
6. "Hampir semua tutor menguasai mbak, soalnya saya juga mudeng kalau pas diajari" (CW.6.6)
7. "Kadang ada tutor yang sering teat mbak, jadinya waktunya kebuang banyak, tapi kan biasanya warga belajar palah suka" (CW.6.7)
8. "Evaluasinya ada mbak, yaitu paling Cuma midsemester sama semesteran aja" (CW.6.8)
9. "Ada mbak, kan kalau yang berkala dan terjadwal biasanya langsung dari PKBM "(CW.6.9)
10. "Baik kok mbak, yang penting masih bisa buat belajar kok"(CW.6.10)
11. "Kalau disini masih mendukung mbak." (CW.6.11)
12. "Tidak kok mbak," (CW.6.12)
13. "Tidak mbak, tutor disini baik baik kok, dan enak kalu diajak diskusi" (CW.6.13)
14. "Sebenarnya kalau dari segi sarana dan prasana tidak sih mbak, yan penting masih bisa digunakan untuk pembelajaran saja" (CW.6.14)
15. "Tidak terlalu mbak, soalnya kan biasanya jadwla sudah disesuaikan dengan yang kerja dan tutornya" (CW.6.15)
16. "Kalau cara mengatasi enggak ada sih mbak, soalnya saya kan tidak ada masalah dengan tutor"(CW.6.16)
17. "Jadwal saya sudah enjoy karna pemilihan dengan jam kerja saya juga cocok"(CW.6.17)

## Catatan Wawancara 7

### I. IDENTITAS

Nama : SW  
Hari dan tanggal : Jum'at, 26 Februari 2016  
Jam : 14.45-16.00 WIB  
Lokasi : PKBM Upaya Terampil

### III. PERTANYAAN

1. "Ada mbak, itu digudang banyak sekali"(CW.7.1)
2. "Kalau mau ngambil digudang semua warga belajar dapat kok mbak, soalnya banyak sekali, tapi kan anyak warga belajar yang enggak mau"(CW.7.2.)
3. "Tidak ada mbak, biasanya tutor hanya menggunakan modul akalu enggak paling Cuma foto kopian aja" (CW.7.3.)
4. "Ya faham mbak soalnya kalau modul kan bisa sambil dibaca dirumah jadi lebih enak" (CW.7.4)
5. "Sudah mbak" (CW.7.5)
6. "Bisa kok mbak soalnya menjelaskanya dengan jelas dan banyak yang mengerti termasuk saya." (CW.7.6)
7. "Tepat waktu mbak, malah yang sering telat itu warga belajarnya kok heheheh" (CW.7.7)
8. "Evaluasi pembelajaran tidak ada mbak, paling Cuma mid semester, dan semesteran aja" (CW.7.8)
9. "Kalau yang berkala dan terjadwal biasanya mid semester dan semesteran mbak, itu kan sudah dijadwal oleh PKBM juga"(CW.7.9)
10. "Bagus kok mbak, paling Cuma ada beberapa kursi yang udah agak buluk"(CW.7.10)
11. "Mendukung kok mbak, buktinya masih ada pemeblajaran disini." (CW.7.11)
12. "Sedikit mbak, karena digudang dan tidak dirapikan jadi susah pas nyarinya aja" (CW.7.12)
13. "Tidak ada, disini tutor-tutornya enak-anak kok mbak, semuanya bisa diajak bercanda." (CW.7.13)
14. "Tidak mbak, disini saya yang peting ikut pembelajaran, pemeblajaran disini juga fleksibel kok jadi tidak terlalu membutuhkan sarana dan prasaran yang bagus kayak di sekolah formal" (CW.7.14)
15. "Tidak mbak, saya kan masuk paket b juga biar bebas sekolahnya" (CW.7.15)
16. "Saya sih diam aja mbak, yang penting saya mengikuti pelajaran yang tutor berikan gitu aja."(CW.7.16)
17. "Kalau masalah jadwal kan saya ngak ada masalah, tapi kalau yang lain ada masalah mungkin aja nie bisa disesuaikan dengn yang lain dulu gitu"(CW.7.17)

## Catatan Wawancara 8

### I. IDENTITAS

Nama : OW  
Hari dan tanggal : Jumat, 26 Februari 2016  
Jam : 14.45-16.00 WIB  
Lokasi : PKBM Upaya Terampil

### II. PERTANYAAN

1. “Sebenarnya ada mbak, tapi saya enggak ambil soalnya males mbawanya, berat”(CW.8.1)
2. “Kalau enggak ambil ya enggak dapat mbak, kan biasanya pembagian cuma pas masuk pembelajaran aja”(CW.8.2.)
3. “Media pembelajaran kalau sama tutor enggak ada mbak, paling kalau pas ada pelatihan itu paling aja cuma pake LCD” (CW.8.3.)
4. “Kalau pas pake LCD ya jelas juga kok, kita juga enggak cepet bosen pas kayak ceramah aja” (CW.8.4)
5. “Sudah kali ya mbak, soalnya ya jelas kok njelasinya” (CW.8.5)
6. “Pastinya iya kali ya mbak. Soale yang dijelake saya juga mudeng kok” (CW.8.6)
7. “Palah seringnya warga belajarnya yang sering telat mbak.” (CW.8.7)
8. “Ulangan gitu pa mbak, walah enggak pernah ada mbak” (CW.8.8)
9. “Kalau yang dijdwal ada mbak tapi biasanya cuma mid semeser sama semesteran ja itu kok”(CW.8.9)
10. “Kalau meja kursi masih bagus mbak, dibuat belajar juga msih nyaman kali ya mbak”(CW.8.10)
11. “Iya lah mbak, kalau enggak ada sarana dan prasarana trus pembelajaranya gimana.... masak mau dilapangan” (CW.8.11)
12. “Enggak sih mbak, banyak modul kok sebenarnya alu mau injem dan baca ” (CW.8.12)
13. “Tutor sini mah gokil-gokil mbak, enggak sepaneng kok.” (CW.8.13)
14. “Tidak terlalu mbak, soalnya kan biasanya juga diusahakan sama pengelola kok” (CW.8.14)
15. “Jadwal mah saya enggak mbak, soalnya saya kan sudah menikah, dan enggak ada kesibukan juga” (CW.8.15)
16. “Jangan bikin mood tutor sebel aja sama kitanya, pasti juga tutornya enak kok”(CW.8.16)
17. “Ya jadwal mah disesuaikan aja sama PKBM menyesuaikan dengan yang kerja dan tutor”(CW.8.17)

## Catatan Wawancara 9

### I. IDENTITAS

Nama : HW  
Jabatan : Pengelola PKBM Kuncup Mekar  
Hari, Tanggal : Selasa, 1 Maret 2016  
Jam : 09.00-10.00 WIB  
Lokasi : PKBM Kuncup Mekar

### II. PERTANYAAN

1. "Masih mbak, tapi ya ada juga yang sudah kerja. Kalau enggak kerja biasnay sudah pada menikah" (CW.9.1)
2. "Tiap tahun ajaran baru sekitar 40 orang aja mbak, itu saja kadnag terpenuhi kadang juga endak." (CW.9.2)
3. "Kalau dari kelas VII, VIII, dan IX kira kira 80 an mbak, nanati coba liat di data saja biar lebih jelas. (CW.9.3)
4. "Ada berapa ya mbak, kalau sama ruang tutor ini sekitar 7 ruangan mbak" (CW.9.4)
5. "Kalau itu mah lagu lama ya mbak, jelas ada lah mbak, ditambah yang sekolah disini kan mayoritas sudah pada bekerja, jadi ya tidak dipungkiri banyak yang tidak aktif." (CW.9.5)
6. "Hampir semuanya saya ikutkan mbak, itu saja biasanya saat ujian Nasional kadang juga tetep aja yang tidak datang dengan berbagai alasan, padahal sayang ya kan tinggal ujian saja. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya sendiri yang tidak mau, kita sebagai pengelola ya hanya bisa mengarahkan saja" (CW.9.6)
7. "Gedung kita dipinjami pemerintah kota mbak, tapi kalau untuk perizinan dan yang lain sebagainya kita berada di Dinas pendidikan kota masihan. " (CW.9.7)
8. "Secara kasar sudah mbak, kalau dilihat dari perhitungan SKLnya tapi kalau dari kualitas saya rasa belum mbak. " CW.9.8)
9. "Nanti bisa dilihat dari data saja ya mbak, takut salah kalau masalah prosentase. Nanti saya kasih data tahun lalu, bisa dilihat sisitu." (CW. 9.9)
10. "Kalau yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kalau untuk tahun ini yang saya tahu itu ada 4 mbak, di MAN magelang, MUTUAL purworejo, Paket C di sini ada 2 mbak ." (CW.9.10)
11. "14 mbak sesuai dengan mata pelajaran yang ada untuk paket B saja" (CW.9.11)
12. "Semuanya palah dari pendidikan formal mbak, yang mengajar hanya disini itu kayaknya cuma 1 mbak" (CW.9.12)
13. "Ya itu mbak dari 14 tutor, 1 tutor berasal dari pendidikan formal semua" (CW.9.13)
14. "Terpenuhi mbak dan disini termasuk yang sesuai dengan kebutuhan"(CW.9.14)
15. "13 tutor" (CW.9.15)

16. "Kalau berbicara kualifikasi untuk tutor untuk mengajar disini yang ada nantinya pada ngak mau ngajar disini mbak, soalnya disini tidak dibayar, kalau tuntutan yang diajukan banyak ya bagaimana gitu kan ya mbak"(CW.9.16)
17. "Itu kali ya mbak sering ada pelatihan diklat, pameran yang diadakan pemerintah, itu juga snagt membantu kita sebagai tutor"(CW.9.17)
18. "Ya itu lah pasti lah mbak, kalau sarana dan prasarana lengkap kan warga belajar juga nyaman. Sebagai pengelola an juga puas."(CW.9.18)
19. "Sebagai pengelola, kita kan hanya memeberikan dukungan media pemebelajarannya saja, tapi kan kalau dalam proses pembelajaran semua kan diserahkan sama tutor langsung selaku pemegang kelas to mbak. "(CW. 9.19)
20. "Sudah disesuaikan sih mbak sesuai yang dibutuhkan sama warga belajarnya." (CW.9.20)
21. "Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran."(CW.9.21)
22. "Tutor sering saya ikutkan di pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran mbak, yang ngadaain dari dinas pendidikan kota maupun dari yang P2PNFI Semarang."(CW.9.22)
23. "Banyak mbak, tapi kalau saya bilang semua itu banyak masalah dari warga belajar yang masih sangat labil." (CW.9.23)
24. "Warga belajar mbak, ya bagaimana ya warga belajar kan sebagai subjek dari proses pembelajaran ini to mbak. Kalau ngaka da warga belajar ya kita tidak ada program ini" (CW.9.24)
25. "Kalau untuk pembelajaran ya pasti jadi kendala lah mbak, tapi ya jadinya diusahakan buat lebih enak aja pas dipakai." (CW.9.25)
26. "Tidak saya jadikan masalah mbak, soalnya walaupun tutor sesuai dengan kualifikasi nasional pembelajaran juga masih dalam keterbatasan" (CW.9.26)
27. "Tidak mbak, kendala dalam proses pemebelajran biasanya karna warga belajar datangnya terlambat . bukan ada masalah dengan peraturan pemerintah" (CW.9.27)
28. "Perlu adanya pelatihan yang lebih serius dan mendalam tentang SPM itu sendiri." (CW.9.28)
29. "Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi, dari segi manajemen keuangan dan manajemen sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik " CW.9.29)
30. "Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik"(CW.9.30)
31. "Mungkin bisa mengajukan sebuah saran agar peraturan pemerintah juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. "(CW.9.31)

## **Catatan Wawancara 10**

### **I. IDENTITAS**

Nama : MH  
Jabatan : Staf PNF  
Hari dan Tanggal : Senin, 7 Maret 2016  
Jam : 10.30-12.00 WIB

### **II. PERTANYAAN**

1. "Data tahun 2015 ada 42 mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX." (CW.10.1)
2. "Kalau yang di kot amagelang saja itu ada 3 aja mbak, semua di lembaga PKBM di bawah anungan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Magelang" (CW.10.2)
3. "Dinas tidak ada anggaran mbak kalau untuk pengadaan modul, biasanya itu dari pemerintah pusat, dan dinas kota hanya sebagai distributor ke PKBM saja" (CW.10.3)
4. "Apalagi alat-alat laboratorium, semua itu biasnay pemerintah pusat yang ada nggaran mbak" (CW.10.4)
5. "Kalau setahu saya tahun 2014 pernah mbak pengadaan mebeler untuk PKBM permata, " (CW.10.5)
6. "Kalau pengelola lembaga yang aktif paling disetiap lembaga cuma 2 mbak tapi kalau di struktur orgamnisasi biasanya yang dicantumin ada banyak bisa sampe 8 orangan" (CW.10.6)
7. "Kalau tutor terpenuhi mbak sesuai dengan kelas dan mata pelajaran juga kok, kalau dilihat dilapangan seperti itu"(CW.10.7)
8. "Tidak mbak, biasanya PKBM merekrut untuk jadi tutor yang penting kan mau ngajar, bukan berasal dari kualifikasi yang ada " (CW. 10.8)
9. "Belum juga mbak, masih banyak yang kurang, tapi asal pembelajaran lancar sih kadang tidak jadi masalah ko mbak." (CW.10.9)
10. "Sudah disesuaikan mbak, tapi kalu penerapan ya kurang tau di setiap PKBMnya bagaimana" (CW.10.10)
11. "Kalau dari dinas belum pernah ada mbak, pernah itu yang mengadakan dari pihak P2PNFI Semarang" (CW.10.11)
12. "Kalau disetiap rencana kerja selalu memenuhi SPM mbak, tapi kalau pelaksanaan pasti kan ada masalah dan kadang banyak kendala jadi tidak terpenuhi dengan baik biasanya. Di ketiga PKBM yang ada juga hampir sama seperti itu" (CW.10.12)
13. "Dari ketiga PKBM yang ada yang standar kerjanya bagus itu hanya satu mbak di PKBM Kuncup mekar, kalau yang lain masih kurang bagus dan tidak mencapai SPM yang seharusnya" (CW.10.13)
14. "Pengukuran kinerja pengelola PKBM kita lakukan setiap tahun mbak, ada tim khusus biasanya yang menangani hal ini"(CW.10.14)
15. "Kalau soal laporan dari ketiga PKBM pasti tepat waktu mbak, soalnya berkaitan dengan anggran dan yang lainnya yang dipertanggungjawabkan di dinas pendidikan" (CW.10.15)



16. “Karena dari ketiga PKBM yang tutornya sesuai dengan SMP tidak ada, jadi sering menjadi kendala masalah dengan kurikulum dan cara mengajarnya yang masih tradisional mbak” (CW.10.16)
17. “Di setiap PKBM beda-beda mbak permasalahannya, tapi kalau untuk sarana dan prasarana tidak terlalu menjadi kendala, soalnya keadaan di sarana dan prasarana di ketiga PKBM juga masih layak” (CW.10.17)
18. “Kalau itu juga sedang dibicarakan mbak, soalnya kalau kita juga menuntut terlalu banyak pada tutor kan juga harus berbanding terbalik dengan gaji to. Tapi kan tau sendiri tutor saja hanya mendapat gaji dari APBD 2 saja” (CW.10.18)
19. “Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.10.19)

## Catatan Wawancara 11

### I. IDENTITAS

Nama : RH  
Hari dan tanggal : Selasa, 1 Maret 2016  
Jam : 11.00-12.00 WIB  
Lokasi : PKBM Permata

### II. PERTANYAAN

1. “Ada mbak, biasanya dibagikan saat awal pembelajaran itu lho, pas pertama kali masuk”(CW.11.1)
2. “Ya kalau yang pas hari itu masuk ya dapat mbak, kalau yang engak masuk bisa ambil di pengelola biasanya”(CW.11.2.)
3. “Ngajarnya biasanya cuma pake buku kok mbak” (CW.11.3.)
4. “Paham kok mbak, kaau pake buku mah enak tinggal nunggu ceramah aja dari tutornya” (CW.11.4)
5. “Ya sesuai lah mbak” (CW.11.5)
6. “Ya pastinya menguasai lah mbak, kalau enggak kita pun ya enggak terlalu ngerti hahah” (CW.11.6)
7. “Tepat waktu sih mbak, palah yang sering telat itu kan warga belajarnya kok” (CW.11.7)
8. “Kalau ulangan-ulangan kayak di sekolah formal enggak ada mbak, paling ya itu yang sesuai jadwal dari PKBM” (CW.11.8)
9. “Kalau dari PKBM ada mbak, itu lho mid semester sama semesteran itu aja, kalau yang lainnya mah enggak ada”(CW.11.9)
10. “Masih kok mbak, kita jug amasih nyaman”(CW.11.10)
11. “Mendukung lah mbak, kalau enggak ada kita belajarnya dimana” (CW.11.11)
12. “Enggak mbak, kan kalau enggak ada tinggal minta sama pengelola aja” (CW.11.12)
13. “Tidak ada, tutornya enak kok mbak” (CW.11.13)
14. “Tidak masalah mbak, maklum lah mbak kan juga disekoalh non formal, beda sama sekolah formal yang lengkap” (CW.11.14)
15. “Jadwal mah kadang mbak kalau pas ujian biasanya, soalnya kan saya kerja jadi harus izin juga sama bosnya” (CW.11.15)
16. “Jangan membuat tutor marah aja, pasti ngak ada masalah kok sama tutor”(CW.11.16)
17. “Kalau saya biasanya minta izin sama bos saya mbak kalau pas ujian ”(CW.11.17)

## Catatan Wawancara 12

### I. IDENTITAS

Nama : MB  
Jabatan : PKBM Permata  
Hari, Tanggal : Rabo, 9 Maret 2016  
Jam : 13.00-14.00 WIB

### II. PERTANYAAN

1. “Hanya 30 persen mbak yang aktif disini dari julaha warga belajar yang ada. Kebanyakan pada seibuk kerja . kalau hadir semua itu pas ujian semesteran itu aja mbak.” (CW.12.1)
2. “Kalau daftar hadir 70 persen terpenuhi, bisa mengikuti ujian nasional mbak. ” (CW.12.2)
3. “Kalau di sini ada beberapa yang enggak sesuai bidangnya mbak, udah mau ngajar aja ya sukur mbak kalau disini, hitung-hitung cari pahala aja” (CW.12.3)
4. “Pembekalan biasanya ada mbak setiap semester itu ngirim ke P2PNFI disemarang mbak, biasanya juga digilir juga mata pelajaran atau pelatihanya.” (CW.12.4)
5. “Kalau dulu saya enggak ada mbak pas masuk disini, tinggal masuk aja, yang penting mau ngajar dan bisa ngajar.” (CW.12.5)
6. “Sarana dan prasarana kurang lengkap ya mbak, tidak ada lab dan alat-alat pendukung praktikum. Ya maklum ya namanya juga pendidikan non formal” (CW.12.6)
7. “Kurang sesuai mbak kalau disini, masih jauh sekali dari standar teknisa yang ada dilapangan, dilihat dari jumlah murid dan ruangan saja sudah jelas kurang mbak .” (CW.12.7)
8. “Media pembelajaran jarang menggunakan mbak, meskipun ada, soslany terbatas juga dengan waktu dan pemahaman dari setiap tutor juga berbeda kan mbak, beda kalau sekolah formal, waktunya kan jelas dan tertata dengan rapi. ” (CW.12.8)
9. “Kalau dibilang sesuai sih sebenarnya sudah sesuai kok mbak, tapi karena tidak di gunakan dengan baik ya bagaimana ya.” (CW.12.9)
10. “Kalau saat pelatihan biasanya disediakan oleh PKBM mbak, tapi kalau pas pembelajaran biasa ya, tutor sendiri yang menyiapkan dibantu dengan warga belajar saja.” (CW.12.10)
11. “Kendala saat pengimplementasian biasanya karena keterbatasan anggaran mbak untuk PKBM itu jadi kurang optimal.” (CW.12.11)
12. “Tidak terlalu signifikan mbak, soalnya yang penting tutor mampu mengajar dengan baik dan warga belajar juga suka dengan tutor tersebut.” (CW.12.12)
13. “Ya bagaimana ya, pasti iya lah, kalau alat-alat yang tidak lengkap kan juga menyusahkan para tutor juga mbak pas pembelajaran.” (CW.12.13)“Wah disini usia sekolah ada, yang sudah menikah juga ada, yang kerja juga ada. Kendalanya ya nanti dari cara berfikir itu to mbak, la gimana lagi yang difikirin juga udah beda-beda” (CW.12.14)

14. “Dalam pengimplementasiana perlu anggaran yang tidak sedikit, namun dalam hal ni juga harus ditunjang sama pengelola yang bagus to mbak biar implementasinya juga bagus” (CW.12.15)
15. “Solusinya perlu adanya kualifikasi yang jelas dan terstruktur dengan baik oleh dinas maupun dari PKBM to ya mbak” (CW.12.16)
16. “Ya, kalau ada anggaran yang lebih besar bisa saja mbak jadi lebih baik. Dari media pembelajaran yang lebih baik juga. Biar setara juga dengan pendidikan formal” (CW.12.17)
17. “Metode belajarnya mbak biasanya yangaya lakukan berbeda antara yang tua dengan yang usia masih belajar. ” (CW.12. 18)

### Catatan Wawancara 13

#### I. IDENTITAS

Nama : JK  
Jabatan : PKBM Permata  
Hari, Tanggal : Rabo, 9 Maret 2016  
Jam :13.00-14.00 WIB

#### II. PERTANYAAN

1. "Kalau masalah keaktifan di kelas masih kurang mbak, ya maklum saja kan banyak warga belajar yang beda umurnya mbak, " (CW.13.1)
2. "Semua bisa mbak, kalau yang mau " (CW.13.2)
3. "Ada yang sesuai ada juga yang enggak kok mbak, yang penting bisa ngajar kok" (CW.13.3)
4. "Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. " (CW.13.4)
5. "Selama saya mengajar disini tidak ada kok mbak, biasanya yang penting bisa ngajar. " (CW.13.5)
6. "Kalau di PKBM sini belum mbak, dari sarana dan prasana masih kurang." (CW.13.6) "Belum mbak, dari jumlah sarana dan prasarana juga belum
7. terpenuhi kok." (CW.13.7)
8. "Media pembelajaran disini kurang mbak, jadi ya kalau mau pake media pemebelajaran biasanya buat sendiri. " (CW.13.8)
9. "Karena media saja masih kurang berarti kan banyak juga media yang kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk warga belajar." (CW.13.9)
10. "Media yang disediakan sama PKBM Cuma modul aja mbak, kalau mau pake media biasnaya saya bawa sendiri pinjam dari sekolah yang saya ngajar pagi." (CW.13.10)
11. "Kendala banyak mbak disini, kalau saya sebagai tutor mah. Apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang." (CW.13.11)
12. "Kalau dalam pembelajaran tidak mbak, kualifikasi tutor biasanaya kendala sama gaji mbak. Padahal gaji disini juga enggak seberapa." (CW.13.12)
13. "Sarana dan prasana ya iya lah mbak. Soalnya kan pengaruh sama pembelajaran to ya." (CW.13.13)
14. "Kalau namanya di paket ya kendala usia warga belajar itu mbak yang beda-beda, pemikiranya juga udah jarang yang bener-bener mau sekolah. Orientasinya kan juga udah beda ya mbak sama yang sekolah formal." (CW.13.14)
15. "Pembenahan mah masih terus berlangsung mbak, solusinya kita sih terus menyamakan standar. " (CW.13.15)

16. “Kualifikasi tutor itu masalah kebijakan ya mbak, ya bagaimana kita sebagai tutor cuma bisa nerapin kebijakan ya. Semaksimalnya ya kita mengusahakan aja.” (CW.13.16)
17. “Sarana dan prasarana mah masalah anggaran ya mbak, kalau kebijakan anggaran juga ditambah ya otomatis nanti sarana dan prasaran juga bisa lebih baik mbak,” (CW.13.17)
18. “Relatif itu ya mbak, masalah yang sanagt klise sekali kalau didunia non formal. Jadi kalau untuk masalah hal itu sih kita sebagai tutor cuma bisa ngandelin metode pembelajaran aja yang dibedakan.” (CW.13. 18)

## Catatan Wawancara 14

### I. IDENTITAS

Nama : ND  
Jabatan : PKBM Upaya Terampil  
Hari, Tanggal : Jum'at 11 Maret 2016  
Jam : 12.00-13.00 WIB

### II. PERTANYAAN

1. "Kalau dilihat dari jumlahnya ya mbak, paling kalau pemebelajatan biasa gitu Cuma 40 persen aja yang hadir tapi kalau mau mendekati mid semester apa semesteran biasanya 90 persenan itu yang hadir." (CW.14.1)
2. "Syarat terpenuhi semua warga belajar bisa ikut ujian mbak. Taopi kalau ada yang enggak lengkap biasanay diikutkan tahun depan." (CW.14.2)
3. "Kalau saya iya mbak, soalnya saya juga dari Pendidikan formal ya jadi bagaimana " (CW.14.3)
4. "Kalau dari dinas untuk tutor sendiri ngak ada mbak. " (CW.14.4)
5. "Enggak mbak, pertama saya disini sampai sekarang juga syaratnya masih sama. Yang penting bisa ngajar gitu aja." (CW.14.5)
6. "Kalau disini ya mbak, dibilang lengkap ya jauh dari kata lengkap, tapi paling tidak bisa buat pembelajaran dan waraga belajar juga nyaman." (CW.14.6)
7. "Belum lah mbak, dilihat seko jumlahe aja belum nyukupi kok mbak." (CW.14.7)
8. "Terkadang menggunakan mbak, tapi ya seadanya yang dibisa oleh para tentor." (CW.14.8)
9. "Media ya kalau bisa disesuaikan mbak, soalnya kan tutor juga mengusahakan agar warga belajar juga berpartisipasi dan mudeng." (CW.14.9)
10. "Ada yang disediakan mk, tapi enggak seberapa. Kalau media enggak ada di PKBM biasanya membawa sendiri mbak." (CW.14.10)
11. "Warga belajar mbak, kan dilihat dari orientasi belajare wes beda to. Na itu sebagian besar disitu." (CW.14.11)
12. "Proses pembelajaran ngak ada hubunganya sama kualifikasi tutor biasanya mbak. Kualifikasi tutor kan biasanya hanya administrasi aja kok." (CW.14.12)
13. "Ya pastinya iya mbak, tapi ya bagaimana lagi disini anggaran juga sanagt minim. Jadi ya pasrah aja." (CW.14.13)
14. "Itu masalah mbak di proses pembelajaran. Kadang kalau yang tua-tua yang sering kurang jelas. Kalau yang usia sekolah biasanya lebih cepat." (CW.14.14)
15. "Kalau sebagai tutor kita Cuma bisa memberikan pembelajaran yang baik mbak, soalnya kita juga ngak memiliki wewenang yang lebih disini." (CW.14.15)

16. “Biasanya setelah diterima dan mengajar disini kita disuruh oleh pengelola untuk melengkapi mbak. Tapi ya suma alakadarnya seperti itu.” (CW.14.16)
17. “Sebagai tutor, solusinya mungkin pengelola bisa mengajukan anggraan yang lebih dibanding tahun sebelumnya. Jadi bisa melengkapi sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih baik.” (CW.14.17)
18. “Masalah yang selalau ada itu mbak dari zaman dulu. Ya bagaimana pun bukan jadi masalah lagi, karena pemebelajaran selalu dua arah kok mbak metode pemebelajaran juga berubah-ubah jadi antara yang usianya sudah matang dan usia sekolah juga enggak terlalu jauh cara berfikirnya” (CW.14. 18)



## Catatan Wawancara 15

### I. IDENTITAS

Nama : KL  
Jabatan : PKBM Upaya Terampil  
Hari, Tanggal : Jum'at 11 Maret 2016  
Jam :13.00-13.40 WIB

### III. PERTANYAAN

1. "Kalau udah mulai ujian seperti ini udah muli banyak yang masuk mbak, tapi kalau pas pembelajaran yang biasa ya sedikit mbak." (CW.15.1)
2. "Dapat mbak, syaratnya terpenuhi biasanya kami ikutkan semua." (CW.15.2)
3. "Di PKBM upaya terampil ini semua sesuai dengan bidang pendidikannya mbak." (CW.15.3)
4. "Kalau dari Dinas pendidikan jarang mbak ada pelatihan." (CW.15.4)
5. "Saat perekrutan awal ada mbak, tapi dari beberapa kualifikasi biasanya hanya beberapa yang terpenuhi." (CW.15.5)
6. "Disini belum mbak, Gedung saja masih numpang mbak." (CW.15.6)
7. "Belum mbak, masih sangat minim disini. Tapi ya lumayan lah untuk pembelajaran sudah layak kok" (CW.15.7)
8. "Ngomongin media pemebelajaran disini pinjam mbak kalau mau pake." (CW.15.8)
9. "Belum mbak, la media saja masih pinjam to." (CW.15.9)
10. "Pinjam mbak. Kalau yang disediakan oleh PKBM ada modul dan beberapa media saja." (CW.15.10)
11. "Sarana dan prasarana mbak kalau menurut saya yang sebagai tutor." (CW.15.11)
12. "Tidak lah mbak. Yang penting warga belajar mengerti sama pa yang kita sampaikan saja sudah syukur mbak." (CW.15.12)
13. "Ya jelas mbak. Soalnya kan memberi motivasi juga to mbak kalau sarana dan prasarana" (CW.15.13)
14. "Warga belajar tidak terlalu masalah mbak. Soalnya kan memang kalau di paket ya usia kan memang relatif ngak sama ya." (CW.15.14)
15. "Kalau sarana dan prasarana diperbaiki paling tidak sudah memperbaiki kok mbak dari beberapa aspek saja." (CW.15.15)
16. "Sebagai tutor yang dituntut ngajar ya kita hanya bisa memberikan yang terbaik to mbak." (CW.15.16)
17. "Ya mungkin dari pihak pengelola bisa mengajukan anggran to mbak ya, yang nantinya untuk kelengkapan saran dan prasarana." (CW.15.17)
18. "Dari metode pembelajaran aja mbak, usia beda kan pemikiran dari setiap individu juga beda. Apalagi dengan daya serapnya juga beda." (CW.15.18)

## Catatan Wawancara 16

### I. IDENTITAS

Nama : IK  
Jabatan : PKBM Kuncup Mekar  
Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2016  
Jam :14.00-14.40 WIB

### II. PERTANYAAN

1. “Ada yang aktif ada yang harus terganggu dengan kerjaan mbak biasanya.” (CW.16.1)
2. “Bisa mbak, asalkan memenuhi persyaratan kaya kehadiran dan yang lainnya.” (CW.16.2)
3. “Iya mbak kalau disini, soalnya tutor juga biasnay dari pendidikan formal yang ada.” (CW.16.3)
4. “Pembekalan itu biasanya ada mbak, persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)
5. “Tidak mbak, waktu saya Cuma yang penting mata pelajaran sesuai denga bidang pendidikan dan yang penting bisa mengajar saja.” (CW.16.5)
6. “Jauh dari kata lengkap mbak, tapi ya masih bisa untuk pembelajaran saja mbak.” (CW.1.6)
7. “Walah jauh mbak. Belum.” (CW.16.7)
8. “Media pembelajaa masih sanagt menggunakan metode modul mbak.” (CW.16.8)
9. “Belum mbak, media pembelajran masih kurang untuk mendukung proses belajar mengajar disini.” (CW.16.9)
10. “Kalau ada media pembelajaran saja kita biasanya pinjam mbak, jarang yang ada di PKBM.”CW.16.10)
11. “Banyak mbak, yang paling krusial ya anggaran to mbak. La mau gimana lagi anggaran yang menjalankan e mbak” (CW.16.11)
12. “Dibilang tidak juga sebenarnya memberatkan juga mbak, tapi juga dari dinas juga tidak ada kejelasan kok mbak, ya kami sebagai tutor juga santai saja to. Yang penting tugas mengajar kita terpenuhi gitu aja.” (CW.16.12)
13. “Kendala sih tidak terlalu ya mbak, toh kalau disini pembelajaranya juga tidak terlalu sering dan waktunya juga fleksibel.” (CW.16.13)
14. “Sebagai tutor di PKBM saya tidak terlalu kesulitan mbak, yang menjadi kendala palah tingkat kehadirannya saja mbak.” (CW.16.14)
15. “Pengimplementasian banyak kendala mbak, kalau tutor mah yang penting selalu ada pendampingan saja dari dinas.” (CW.16.15)
16. “Memberikan pelatihan agar sama dengan kualifikasi tutor nasional.” (CW.16.16)
17. “Menggunakan sarana dan prasarana yang ada biasany mbak kalau tutor mah, tau sendiri juga kondisi PKBM bagaimana.” (CW.16.17)

18. “Metode pembelajarany yang beda biasanya mbak, dari pendekatan maupun cara ngajarnya aja mbak. Kalau yang lain tidak mbak.” (CW.16. 18)

## Catatan Wawancara 17

### I. IDENTITAS

Nama : TT  
Hari dan tanggal : Sabtu, 12 Maret 2016  
Jam : 15.00-16.00 WIB  
Lokasi : PKBM Kuncup Mekar

### II. PERTANYAAN

1. "Menyediakan mbak, kalau mau dibawa pulang bukunya tinggal bilang saja sama pengelolanya kok."(CW.17.1)
2. "Biasanya yang mau aja mbak yang dapat, soalnya kadang juga ada yang udah diberikan sama pengelola atau tutor, kadang malah ditinggal gitu aja dikelas, ndak dibawa pulang"(CW.17.2.)
3. "Kalau media pembelajaran, paling Cuma buku mbak yang sering dipake, kalau hanya jarang kok kalau disini" (CW.17.3.)
4. "Paham mbak, wong tutornya jelasinya sampe kita mudeng kok" (CW.17.4)
5. "Udah kali ya mbak, soalnya aku nya juga ngak terlalu mudeng masalah begituan" (CW.17.5)
6. "Itu iya mbak, biasanya materi kan dari modul aja kok" (CW.17.6)
7. "Kalau disini iya mbak, kalau telat biasanya waktunya ditambah menyesuaikan sam tutor mbak" (CW.17.7)
8. "Ulangan gt paw mbak, disini ngak ada ulangan mbak. Paling paling ya PR gt aja" (CW.17.8)
9. "Kalau yang terjadwal ngikuti dari PKBM ada mbak, mid semester sama semesteran itu lho... yang biasanya berengan sama PKBM yang lain juga"(CW.17.9)
10. "Ya masih layak aja kayae mbak, lek digawe sinau jeh patut"(CW.17.10)
11. "Ya mendukung to mbak, lek ngak ana ya gimana gitu." (CW.17.11)
12. "Engak sih mbak sebenarnya, toh dah disiapkan sama pengelola juga" (CW.17.12)
13. "Engak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok" (CW.17.13)
14. "Kedala masalah sarana dan prasarana engak ada mbak. Yang penting mah masih bisa buat belajar aja to mbak" (CW.17.14)
15. "Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain" (CW.17.15)
16. "Nurut aja sama perintahperintah tutor gt aja pasti ngak ada masalah kok mbak"(CW.17.16)
17. "Kalau jadwal biasanya saya naruh bayi saya ke rumah simbahe to mbak. Kalau pas ngak ada yang dititipi ya terpaksa ngak ikut pembelajaran gitu aja"(CW.7.17)

## Catatan Wawancara 18

### I. IDENTITAS

Nama : ZU  
Jabatan : Pengelola PKBM Permata  
Hari, Tanggal : Senin, 14 Maret 2016  
Jam : 11.30-12.10  
Lokasi : PKBM Permata

### II. PERTANYAAN

1. “Masih mbak, disini lebih banyak yang usia sekolah, biasanya pindahan dari sekolah formal.” (CW.18.1)
2. “Kalau disini untuk satu ajaran pemeblajaran tidak dikuota biasanya mbak, kalau masih bisa ditampung biasanya juga kami tampung kok.” (CW.18.2)
3. “Untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 92 warga belajar mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW.18.3)
4. “Kalau ruangan belajarnya hanya ada 4 kelas mbak, tapi kalau dengan PAUD dan kantor sekitar ada 8 ruangan.” (CW.18.4)
5. “Sebenarnya bukan seperti itu mbak, tapi kan ada mereka ada yang kerja ya, jadi biasanay jarang datang kalau pembelajaran normal.” (CW.18.5)
6. “Bisa mbak, asalkan kehadiran harus 70% dari jumlah keseluruhan.” (CW.18.6)
7. “Untuk tempat ini dipinjami sama Pemerintah Kota Magelang mbak, tapi kalau peanggunjawabnya masih dibawah Dinas pendidikan Kota kok.” (CW.18.7)
8. “Kalau boleh jujur mah mbak, sangat kurang tapi ya kalau masih bisa dibantu kami bantu mbak.” CW.18.8)
9. “Menurut data tahun lalu ya mbak itu ada banyak sekali yang masuk dunia kerja dibandingkan dunia pendidikan selanjutnya.” (CW.18.9)
10. “Tahun kemarin itu yang masuk data di PKBM cuma ada 4 orang kalau enggak salah mbak, itu yang lapor mbak.” (CW.18.10)
11. “Yang di PKBM banyak mbak, kalau yang khusus Paket B itu ada sekitar 14 orang mbak.” (CW.18.11)
12. “Tidak ada mbak, ” (CW.18.12)
13. “Semua tutor dari pendidikan formal mbak.” (CW.18.13)
14. “Sudah mbak, sudah sesuai dengan mata pelajaran juga.”(CW.18.14)
15. “14 tutor mbak.” (CW.18.15)
16. “Tidak ada mbak, dulu berbekal yang mau mengajar disini aja mbak, soalnya gaji juga kita tidak ada awalnya.”(CW.18.16)
17. “Aduh mbak, Dukungan pemerintah masih kurang mbak, kita saja untuk mengaji tutor saja masih kurang-kurang kok.” (CW.18.17)
18. “Masih kurang mbak, dilihat dari jumlah ruanagn saja kalau disini kurang mbak.” (CW.18.18)
19. “Media pemeblajaran yang digunakan paling yang ada hanya modul mbak.” (CW.18.19)

20. "Kalau cuma menggunakan modul saja sih sudah sesuai dengan kebutuhan mbak, tapi ya kalau didukung dengan yang lain ya belum ya."(CW.18.20)
21. "Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak."CW.20.21)
22. "Biasanya ada mbak, tapi yang ngadain bukan dinas pendidikan tapi P2PNFI Semarang."CW.18.22)
23. "Lagu lama mbak, masalahnya ya anggaran lah mbak kalau anggaran sedikit ya kita sebagai pengelola juga susah."CW.18.23)
24. "Pemerintah mbak kalau dirasa-rasa kurang mendukung PKBM secara penuh." (CW.18.24)
25. "Ya jelas to mbak, kalau lengkap kan warga belajar juga semangat, tutor pun juga semangat." (CW.18.25)
26. "Tidak mbak, tutor yang penting bisa mengajar dan bisa dipercaya to mbak." (CW.18.26)
27. "Terkadang iya mbak, contohnya saja kalau pas lagi pembuatan proposal dan pelaporan anggaran." (CW.18.27)
28. "Anggaran ditambah mungkin bisa mengurangi sedikit kendala yang ada di PKBM kok mbak." (CW.18.28)
29. "Sarana dan prasarana bisa tidak terlalu dipusingkan, yang penting media pembelajaran lebih lengkap." CW.18.29)
30. "Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas." (CW.18.30)
31. "Ya dilaksanakan semampu kita aja to mbak, paling tidak untuk administrasi dari pemerintah saja." (CW.18.31)

## Catatan Wawancara 19

### I. IDENTITAS

Nama : RA  
Hari, Tanggal : Senin, 14 Maret 2016  
Jam : 13.00-14.00 WIB  
Lokasi : PKBM Upaya Terampil

### II. PERTANYAAN

1. “Kalau disini kebanyakan palah usia sekolah mbak, biasanya pindahan dari sekoah formal. ” (CW.19.1)
2. “Kalau tiap angkatan kalau disini tidak dibatasi mbak, kalau ada yang daftar 60 ya kita terima semua. Kalau Cuma ada 20 ya kita terima.” (CW.19.2)
3. “Dari kelas VII, VIII, dan IX itu disini ada 112 warga belajar mbak. ” (CW.19.3)
4. “Kalau ruangan pembelajaranya disini masih barengan sama SD wates 4 mbak. ” (CW.19.4)
5. “Banyak itu mbak, maklum ya mbak namanya juga sekolah non formal. Tapi biasanya akan aktif kalau udah mau mendekati ujian mid semester sama semesteran gitu mbak.” (CW.19.5)
6. “Ya harus to mbak. Semua syarat ok kita bisa mbak, tapi kalau syarat aja masih kurang-kurang ya biasanya suruh melengkapi dulu.” (CW.19.6)
7. “Tempatnya milik Pemerintah Kota Magelang mbak tapi masih dibawah wenangan Dinas Pendidikan Kota Magelang.” (CW.19.7)
8. “Dari standar kelulusan minimal disini termasuk yang baik mbak. Sudah memenuhi lah ya. ” CW.19.8)
9. “Dilihat dari tahan lalu ya mbak jumlahnya itu ada 30 anak dari jumlah totalnya 45 anak. ” (CW. 19.9)
10. “Yang masuk data saya itu ada 4 anak saja mbak, soalnya kan biasanya jarang juga yang konfirmasi kalau sudah lulus mbak.” (CW.19.10)
11. “Tutor sisini ada 13 mbak.” (CW.19.11)
12. “Ya tidak lah mbak, kalau cuma disini saja enak cukup lah mbak untuk makan.” (CW.9.12)
13. “Semua tutor disini mengajar di pendidikan formal mbak.” (CW.19.13)
14. “Untuk paket B sudah terpenuhi mbak. Ditambah lagi kan ada juga tutor paket yang lain juga yang biasanya membantu juga. ”(CW.19.14)
15. “Semua tutor mbak.” (CW.19.15)
16. “Kualifikasi untuk semua tutor ada mbak, hahah yang penting pendidikan sesuia dengan yang diajar dan yang penting lagi bisa ngajar to mbak.”(CW.19.16)
17. “Dukungan dari pemerintah mah kurang mbak, apalagi masalah gaji. Sanagt kurang sekali bagi tutor.” (CW.19.17)

18. “Ya kalau lengkap sarana dan prasarana nya ya pasti mendukung mbak, tapi disini masih kurang mendukung mbak.” (CW.19.18)
19. “Media pemebelajaran kita seringnya pinjam mbak, soalnya kita kan juga tempatnya barenagn sama SD Wates 4 juga to.” (CW.19.19)
20. “Media enggak ada mbak, jadi ya belum sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan tutor to mbak.”(CW.19.20)
21. “Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.”CW.19.21)
22. “Biasanya tiap semester ad ambak dari P2PNFI Semarang,”CW.19.22)
23. “Kendala banyak mbak, anggaran lah ya yang paling biasanya berperan penting banget.”(CW.19.23)
24. “Banyak mbak, dari anggaran, tutor, dan warga belajar punya kendala masing-masing mbak.” (CW.19.24)
25. “Ya jelas ya mbak. Gimana pembelajaran bisa berjalan lancar kalau tidak ada sarana dan prasarana yang memadai.” (CW.19.25)
26. “Kualifikasi tutor selama ini tidak terlalu mennjadi kendala mbak, soalnya. Yang penting mah bisa ngajar aja mbak. ” (CW.19.26)
27. “Iya mbak, apalagi kebijakan masalah anggaran. ” (CW.19.27)
28. “Sebagai pengelola sering lah ya mengadakan audiensi dan penanganan yang lain. Biar lebih baik” (CW.19.28)
29. “Sebagai pengelola kita cuma bisa mengusahakan anggran yang mana bisa digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana.” CW.19.29)
30. “Mengikutsertakkan dalam berbagai kualifikasi tutor agar dapat terpenuhi” (CW.19.30)
31. “Mengikuti kebijakan yang ada mbak. Yang penting pembelajaran masih bisa berlangsung dengan lancar” (CW.19.31)



## Catatan Wawancara 20

### I. IDENTITAS

Nama : AG  
Hari, Tanggal : Jum'at 18 Maret 2016  
Jam : 15.00-16.00 WIB  
Lokasi : PKBM Kuncup Mekar

### II. PERTANYAAN

1. "Usia sekolah banyak mbak, yang diluar usia sekolah juga banyak kok mbak." (CW.20.1)
2. "Tiap tahun berbeda beda mbak tergantung anggaran saja." (CW.20.2)
3. "Kalau keseluruhan untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 112 warga belajar" (CW.20.3)
4. "Disini masih pinjem mbak kalau untuk runag pembelajarannya" (CW.20.4)
5. "Banyak mbak, apalagi kalau cuma pemebelajaran biasa biasanya hanya sedikit yang hadir" (CW.20.5)
6. "Diikutkan semua mbak, karena kan masih usia wajib belajar juga to." (CW.20.6)
7. "Milik Pemerintah Kota mbak, tapi masih dibawah bimbingan Dinas Pendidikan Kota Magelang." (CW.20.7)
8. "Ujian Nasional sudah sesuai dengan SKL mbak, kalau enggak sesuai kan ya pada ngak lulus ya." CW.20.8)
9. "Hampir semuanya masuk dunia kerja mbak, soalnya biasanya mereka sebelum masuk sini udah bekerja juga." (CW. 20.9)
10. "Kalau yang laporan ya mbak itu Cuma ada 4 warga belajar saja mbak." (CW.20.10)
11. "13 mbak." (CW.20.11)
12. "Tidak mbak. Biasanya palah saya ngambilnya dari guru-guru pendidikan formal kok." (CW.20.12)
13. "Semuanya mbak" (CW.20.13)
14. "Sudah mbak. Sesuai juga dengan mata pelajaranya."(CW.20.14)
15. "13 tutor semuanya mbak" (CW.20.15)
16. "Tidak mbak. Yang penting bisa ngajar aja mbak."(CW.20.16)
17. "Sedikit mbak kalau dukungan dari pemerintah. Gaji saja masih kurang dari kata cukup." (CW.20.17)
18. "Masih kurang mbak. Maklum PKBM sini kan juga masih numpang ya." (CW.20.18)
19. "Kalau dari PKBM cuma pake modul aja mbak." (CW.20.19)
20. "Ya disesuaikan saja mbak sesuai kemampuan daya serap warga bwlajar juga to mbak."(CW.20.20)
21. "Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak."CW.20.21)
22. "Sebenarnya ada mbak, biasanya dari P2PNFI Semarang."CW.20.22)

23. “Banyak mbak, semua masalah biasanya dari keterbatasan anggran.”(CW.20.23)
24. “Warga belajar mbak. Terkadang tidak bisa diajak untuk maju.” (CW.20.24)
25. “Pastinya mbak. Sarana dan prasarana lengkap kan enak juga buat belajar.” (CW.20.25)
26. “Tidak mbak disini mah, yang penting bisa menagajr sesuai dengan mata pelajaran dan tanggung jawab aja.” (CW.20.26)
27. “Tidak mbak” (CW.20.27)
28. “Ya kalau masalah anggran mah dari pemerintahnya bagaimana t mbak, kita sebagai pengelola Cuma bisa menjalankan apa instruksi dari atsa to.” (CW.20.28)
29. “Mengajukan anggran to mbak biar bisa memperbaiki sarana dan prasarana.” CW.20.29)
30. “Mengikutkan dalam berbagai pelatihan dan mengusahakan untuk memenuhi kalifikasi dengan waktu tertentu.” (CW.20.30)
31. “Ya mengikuti peraturan saja mbak, sebisa mungkin untuk yang bisa dilaksanakan.” (CW.20.31)

Lampiran.Rekap data Hasil Wawancara

Tabel.Rekap data

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
Tingkat Implementasi Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang		
1.	Berapa angka putus sekolah di Kota Magelang pada usia 12-16 tahun?	SH: "Dari data tahun 2015, ada 42 siswa." (CW. 5.1) MH: "Data tahun 2015 ada 42 mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX." (CW. 10.1)
2.	Apakah warga belajar masih usia sekolah?	NN: "Iya, tapi masih ada juga yang sudah tidak usia sekolah, selain itu biasanya mereka juga bekerja, prosentasenya sekitar 70% dan 30 % dari usia sekolah dan yang tidak usia sekolah." (CW.1.1) IN: "Banyak yang usia sekolah mbak, diabndingkan yang tidak, tapi ya itu biasanya mereka sudah bekerja atau sudah menikah." (CW.2.1) HW: "Masih mbak, tapi ya ada juga yang sudah kerja. Kalu enggak kerja biasnay sudah pada menikah" (CW.9.1) RA: "Kalau disini kbanyakan palah usia sekolah mbak, biasanya pindahan dari sekoah formal. " (CW.19.1) AG: "Usia sekolah banyak mbak, yang diluar usia sekolah juga banyak kok mbak. " (CW.20.1) ZU: "Masih mbak, disini lebih banyak yang usia sekolah, biasnaya pindahan dari sekolah formal." (CW.18.1)
3.	Berapa lembaga yang menyediakan program kesetaraan di Kota Magelang?	SH: "Ada 3 mbak, PKBM upaya terampil, PKBM kuncup mekar dan PKBM Permata saja. " (CW. 5.2) MH: "Kalau yang di kot amagelang saja itu ada 3 aja mbak, semua di lembaga PKBM di bawah anungan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Magelang" (CW.10.2)
4.	Apakah warga belajar masih usia sekolah?	NN: "Iya, tapi masih ada juga yang sudah tidak usia sekolah, selain itu biasanya mereka juga bekerja, prosentasenya sekitar 70% dan 30 % dari usia sekolah dan yang tidak usia sekolah." (CW.1.1) IN: "Banyak yang usia sekolah mbak, diabndingkan yang tidak, tapi ya itu biasanya mereka sudah bekerja atau sudah menikah." (CW.2.1)

		<p>HW: “Masih mbak, tapi ya ada juga yang sudah kerja. Kalu enggak kerja biasnay sudah pada menikah” (CW.9.1)</p> <p>RA: “Kalau disini kbanyakan palah usia sekolah mbak, biasanya pindahan dari sekoah formal. ” (CW.19.1)</p> <p>AG: “Usia sekolah banyak mbak, yang diluar usia sekolah juga banyak kok mbak. ” (CW.20.1)</p> <p>ZU: “Masih mbak, disini lebih banyak yang usia sekolah, biasnaya pindahan dari sekolah formal.” (CW.18.1)</p>
5.	Berapa kuota untuk warga belajar kesetaraan paket B di PKBM?	<p>NN: “Dalam satu tahun ajaran PKBM hanya menyediakan 40 kursi untuk warga belajar dengan jumlah dua kelas saja.” (CW.1.2)</p> <p>IN: “Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga.” (CW.2.2)</p> <p>HW: “Tiap tahun ajaran baru sekitar 40 orang aja mbak, itu saja kadnag terpenuuhi kadang juga endak.” (CW.9.2)</p> <p>RA: “Kalau tiap angkatan kalau disini tidak dibatasi mbak, kalau ada yang daftar 60 ya kita terima semua. Kalau Cuma ada 20 ya kita terima.” (CW.19.2)</p> <p>AG: “Tiap tahun berbeda beda mbak tergantung anggaran saja.” (CW.20.2)</p> <p>ZU: “Kalau disini untuk satu ajaran pemebelajaran tidak dikuota biasanya mbak, kalau masih bisa ditampung biasnaya juga kami tampung kok.” (CW.18.2)</p>
6.	Berapa jumlah Warga belajar di lembaga PKBM?	<p>NN: “Untuk Kesetaraan paket B sekitar 92 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.1.3)</p> <p>IN: “Untuk Kesetaraan paket B sekitar 89 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.2.3)</p> <p>HW: “Kalau dari kelas VII, VIII, dan IX kira kira 80 an mbak, nanati coba liat di data saja biar lebih jelas. (CW.9.3)</p> <p>RA: “Dari kelas VII, VIII, dan IX itu disini ada 112 warga</p>

		<p>belajar mbak. ” (CW.19.3)</p> <p>AG:</p> <p>“Kalau keseluruhan untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 112 warga belajar” (CW.20.3)</p> <p>ZU:</p> <p>“Untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 92 warga belajar mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW.18.3)</p>
7.	Berapa Jumlah ruangan yang ada ?	<p>NN:</p> <p>“ 8 ruangan” (CW.1.4)</p> <p>IN:</p> <p>“ 7 ruangan” (CW.2.4)</p> <p>HW:</p> <p>“Ada berapa ya mbak, kalau sama ruang tutor ini sekitar 7 ruangan mbak” (CW.9.4)</p> <p>RA:</p> <p>“Kalau ruangan pembelajarannya disini masih barengan sama SD wates 4 mbak. ” (CW.19.4)</p> <p>AG:</p> <p>“Disini masih pinjem mbak kalau untuk runag pembelajarannya” (CW.20.4)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kalau ruangan belajarnya hanya ada 4 kelas mbak, tapi kalau dengan PAUD dan kantor sekitar ada 8 ruangan.” (CW.18.4)</p>
8.	Apakah ada warga belajar yang tidak aktif namun namanya terdaftar?	<p>NN:</p> <p>“Ada, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 8 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 22 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 38 yang tidak aktif 10 orang.” (CW.1.5)</p> <p>IN:</p> <p>“Pasti ada mbak, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 7 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 14 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 35 yang tidak aktif 13 orang.” (CW.2.5)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau itu mah lagu lama ya mbak, jelas ada lah mbak, ditambah yang sekolah disini kan mayoritas sudah pada bekerja, jadi ya tidak dipungkiri banyak yang tidak aktif.” (CW.9.5)</p> <p>RA:</p> <p>“Banyak itu mbak, maklum ya mbak namanya juga sekolah non formal. Tapi biasanya akan aktif kalau udah mau mendekati ujian mid semester sama semesteran gitu mbak.” (CW.19.5)</p> <p>AG:</p> <p>“Banyak mbak, apalagi kalau cuma pemebelajaran</p>

		<p>biasa biasanya hanya sedikit yang hadir” (CW.20.5)</p> <p>ZU:</p> <p>“Sebenarnya bukan seperti itu mbak, tapi kan ada mereka ada yang kerja ya, jadi biasanay jarang datang kalau pembelajaran normal.” (CW.18.5)</p>
9.	Apakah warga belajar dapat mengikuti ujian Nasional kesetaraan paket B?	<p>NN:</p> <p>“Bisa mbak, asalkan semua persyaratan memenuhi” (CW.1.6)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau memenuhi persyaratan ujian selalu kami ikutkan mbak.” (CW.2.6)</p> <p>HW:</p> <p>“Hampir semuanya saya ikutkan mbak, itu saja biasanya saat ujian Nasional kadang juga tetep aja yang tidak datang dengan berbagai alasan, padahal sayang ya kan tinggal ujian saja. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya sendiri yang tidak mau, kita sebagai pengelola ya hanya bisa mengarahkan saja” (CW.9.6)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya harus to mbak. Semua syarat ok kita bisa mbak, tapi kalau syarat aja masih kurang-kurang ya biasanya suruh melengkapi dulu.” (CW.19.6)</p> <p>AG:</p> <p>“Diikutkan semua mbak, karena kan masih usia wajib belajar juga to.” (CW.20.6)</p> <p>ZU:</p> <p>“Bisa mbak, asalkan kehadiran harus 70% dari jumlah keseluruhan.” (CW.18.6)</p> <p>KS:</p> <p>“Hampir semua warga belajar mengikuti mbak, untuk ujian kesetaraan kalau sayarat kehadiran memenuhi.” (CW.3.2)</p> <p>MB:</p> <p>“Kalau daftar hadir 70 persen terpenuhi, bisa mengikuti ujian nasional mbak. ” (CW.12.2)</p> <p>JK:</p> <p>“Semua bisa mbak, kalau yang mau ” (CW.13.2)</p> <p>ND:</p> <p>“Syarat terpenuhi semua warga belajar bisa ikut ujian mbak. Taopi kalau ada yang enggak lengkap biasanay diikutkan tahun depan.” (CW.14.2)</p> <p>KL:</p> <p>“Dapat mbak, syaratnya terpenuhi biasanya kami ikutkan semua.” (CW.15.2)</p> <p>IK:</p> <p>“Bisa mbak, asalkan memenuhi persyaratan kaya kehadiran dan yang lainnya.” (CW.16.2)</p>
10.	Berapa prosentase warga belajar yang memasuki dunia	<p>NN:</p> <p>“60 persen dari 40 warga belajar masuk dunia kerja</p>

	kerja?	<p>mbak, soalnya banyak dari warga belajar Paket B yang sudah disambi kerja.” (CW. 1.9)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau dilihat dari jumlah warga belajar tahun lalu sekitar 75 persen dari 38 anak memasuki dunia kerja mbak, soalnya kan memeng sebagian dari mereka sudah bekerja sebelumnya.” (CW. 2.9)</p> <p>HW:</p> <p>“Nanti bisa dilihat dari data saja ya mbak, takut salah kalau masalah prosentase. Nanti saya kasih data tahun lalu, bisa dilihat sisitu.” (CW. 9.9)</p> <p>RA:</p> <p>“Dilihat dari tahun lalu ya mbak jumlahnya itu ada 30 anak dari jumlah totalnya 45 anak. ” (CW. 19.9)</p> <p>AG:</p> <p>“Hampir semuanya masuk dunia kerja mbak, soalnya biasanya mereka sebelum masuk sini udah bekerja juga.” (CW. 20.9)</p> <p>ZU:</p> <p>“Menurut data tahun lalu ya mbak itu ada banyak sekali yang masuk dunia kerja dibandingkan dunia pendidikan selanjutnya.” (CW.18.9)</p>
11	Berapa prosentase warga belajar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?	<p>NN:</p> <p>“20 persen mbak dari 40 jumlah warga belajar, dan sissanya biasanya sudah menikah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mbak.” (CW.1.10)</p> <p>IN:</p> <p>“Dari 38 siswa tahun lalu hanya 10 persen saja mbak, itu saja dengan berbagai bujukan sayang sudah saya lakukan.” (CW.2.10)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kalau untuk tahun ini yang saya tahu itu ada 4 mbak, di MAN magelang, MUTUAL purworejo, Paket C di sini ada 2 mbak.” (CW.9.10)</p> <p>RA:</p> <p>“Yang masuk data saya itu ada 4 anak saja mbak, soalnya kan biasanya jarang juga yang konfirmasi kalau sudah lulus mbak.” (CW.19.10)</p> <p>AG:</p> <p>“Kalau yang laporan ya mbak itu Cuma ada 4 warga belajar saj mbak.” (CW.20.10)</p> <p>ZU:</p> <p>“Tahun kemarin itu yang masuk data di PKBM cuma ada 4 orang kalau enggak salah mbak, itu yang lapor mbak.” (CW.18.10)</p>
12.	Apakah Dinas menyediakan modul pembelajaran?	<p>SH:</p> <p>“Kalau dari dinas pendidikan sendiri tidak ada mbak, karena keterbatasan anggaran.” (CW. 5.3)</p>

		<p>MH:  “Dinas tidak ada anggaran mbak kalau untuk pengadaan modul, biasanya itu dari pemerintah pusat, dan dinas kota hanya sebagai distributor ke PKBM saja” (CW.10.3)</p>
13.	Apakah Dinas Pendidikan menyediakan Alat-Alat Laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran?	<p>SH:  “Tidak ada anggaran mbak untuk pengadaan alat dan yang lainnya” (CW.5.4)  MH:  “Apalagi alat-alat laboratorium, semua itu biasnay pemerintah pusat yang ada nggaran mbak” (CW.10.4)</p>
14.	Apakah pihak PKBM menyediakan modul untuk proses pemebelajaran?	<p>SA:  “Menyediakan mbak, biasanya ada yang dibagikan ada yang mengambil di TBM.” (CW.4.1)  FO:  “Ada mbak, biasanya setiap semester kita dibagikan modul kok”(CW.6.1)  SW:  “Ada mbak, itu digudang banyak sekali”(CW.7.1)  OW:  “Sebenarnya ada mbak, tapi saya enggak ambil soalnya males mbawanya, berat”(CW.8.1)  RH:  “Ada mbak, biasanya dibagikan saat awal pembelajaran itu lho, pas pertama kali masuk”(CW.11.1)  TT:  “Menyediakan mbak, kalau mau dibawa pulang bukunya tinggal bilang saja sama pengelolanya kok.”(CW.17.1)</p>
15.	Apakah warga belajar mendapatkan semua modul?	<p>SA:  “Seharusnya mendapatkan mbak, tapi kadang ada warga belajar yang tidak mau membawa modulnya.”(CW.4.2.)  FO:  “Kalau hadir pas pembagian dapat mbak, kalau yang enggak hadir biasany bisa ngambil tapi nemui pengelola gitu”(CW.6.2.)  SW:  “Kalau mau ngambil digudang semua warga belajar dapat kok mbak, soalnya banyak sekali, tapi kan anyak warga belajar yang enggak mau ”(CW.7.2.)  OW:  “Kalau enggak ambil ya enggak dapat mbak, kan biasanya pembagian cuma pas masuk pembelajaran aja”(CW.8.2.)  RH:  “Ya kalau yang pas hari itu masuk ya dapat mbak, kalau yang enggak masuk bisa ambil di pengelola</p>



		<p>biasanya”(CW.11.2.)</p> <p>TT:</p> <p>“Biasanya yang mau aja mbak yang dapat, soalnya kadang juga ada yang udah diberikan sama pengelola atau tutor, kadang palah ditinggal gitu aja dikelas, ndak dibawa pulang”(CW.17.2.)</p>
16.	Apakah ada media yang digunakan selama proses pembelajaran?	<p>SA:</p> <p>“Jarang mbak, paling paling Cuma modul kalau enggak ya LCD itu saja biasanya kalau pertemuan yang banyak atau pelatihan saja kok mbak,” (CW.4.3.)</p> <p>FO:</p> <p>“Engak ada mbak, paling pake buku aja kok para tutor njelasinya” (CW.6.3.)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak ada mbak, biasanya tutor hanya menggunakan modul akalu enggak paling Cuma foto kapian aja” (CW.7.3.)</p> <p>OW:</p> <p>“Media pembelajaran kalau sama tutor enggak ada mbak, paling kalau pas ada pelatihan itu paling aja cuma pake LCD” (CW.8.3.)</p> <p>RH:</p> <p>“Ngajarnya biasanya cuma pake buku kok mbak” (CW.11.3.)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau media pembelajaran, paling cuma buku mbak yang sering dipake, kalau hanya jarang kok kalau disini” (CW.17.3.)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasnaya tergantung dengan tutor sih mbak, kadang ada yang menggunakan kadang juga hanya menggunakan modul saja. (CW. 1.19)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau disini pemebelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasnaya menggunakan LCd atau modul pemebllaajatron yang da di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p> <p>HW:</p> <p>“Sebagai pengelola, kita kan hanya memeberikan dukungan media pemebelajarannya saja, tapi kan kalau dalam proses pembelajaran semua kan diserahkan sama tutor langsung selaku pemegang kelas to mbak. ” (CW. 9.19)</p> <p>RA:</p> <p>“Media pemebelajaran kita seringnya pinjam mbak, soalnya kita kan juga tempatnya barenagn sama SD Wates 4 juga to.” (CW.19.19)</p>

		<p>AG: “Kalau dari PKBM cuma pake modul aja mbak.” (CW.20.19)</p> <p>ZU: “Media pemebelajaran yang digunakan paling yang ada hanya modul mbak.” (CW.18.19)</p> <p>KS: “Karena saya mengajar bahasa indonesia, saya tidak terlalu banyak media pembelajaran mbak, dan itupun media pemebelajaran saya disini juga tidak ada.” (CW. 3.8)</p> <p>MB: “Media pembelajaran jarang menggunakan mbak, meskipun ada, soslany terbatas juga dengan waktu dan pemahaman dari setiap tutor juga berbeda kan mbak, beda kalau sekolah formal, waktunya kan jelas dan tertata dengan rapi. ” (CW.12.8)</p> <p>JK: “Media pembelajaran disini kurang mbak, jadi ya kalau mau pake media pemebelajaran biasanya buat sendiri. ” (CW.13.8)</p> <p>ND: “Terkadang menggunkan mbak, tapi ya seadanya yang dibisa oleh para tentor.” (CW.14.8)</p> <p>KL: “Ngomongin media pemebelajaran disini pinjam mbak kalau mau pake.” (CW.15.8)</p> <p>IK: “Media pembelajaa masih sanagt menggunakan metode modul mbak.” (CW.16.8)</p>
17.	Apakah tutor menguasai media pembelajaran yang ada?	<p>NN: “Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>IN: “Ada 2 tutor yang kurang mahir dalam menggunakan media pemebelajaran yang moderen mbak, karena memang sudah tua.” (CW.2.21)</p> <p>HW: “Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran.”(CW.9.21)</p> <p>RA: “Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.”CW.19.21)</p> <p>AG: “Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.”CW.20.21)</p>

		<p>ZU:  “Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.”(CW.20.21)</p>
18.	Apakah ada pelatihan khusus tentang media pembelajaran?	<p>NN:  “Ada mbak, biasanya P2PNF semarang yang mengadakan secara berkala.” (CW.1.22)</p> <p>IN:  “Ada mbak, setiap setengah tahun sekali biasanya PKBM selalu mengirim tutor untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh P2PNFI di Semarang.” (CW.2.22)</p> <p>HW:  “Tutor sering saya ikutkan di pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran mbak, yang ngadaain dari dinas pendidikan kota maupun dari yang P2PNFI Semarang.”(CW.9.22)</p> <p>RA:  “Biasanya tiap semester ad ambak dari P2PNFI Semarang,”(CW.19.22)</p> <p>AG:  “Sebenarnya ada mbak, biasanya dari P2PNFI Semarang.”(CW.20.22)</p> <p>ZU:  “Biasanya ada mbak, tapi yang ngadain bukan dinas pendidikan tapi P2PNFI Semarang.”(CW.18.22)</p> <p>KS:  “Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)</p> <p>MB:  “Pembekalan biasanya ada mbak setiap semester itu ngirim ke P2PNFI disemarang mbak, biasanya juga digilir juga mata pelajaran atau pelatihanya.” (CW.12.4)</p> <p>JK:  “Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. ” (CW.13.4)</p> <p>ND:  “Kalau dari dinas untuk tutor sendiri ngak ada mbak. ” (CW.14.4)</p> <p>KL:  “Kalau dari Dinas pendidikan jarang mbak ada pelatihan. ” (CW.15.4)</p> <p>IK:  “Pembekalan itu biasanya ada mbak, persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)</p>
19.	Apakah warga belajar memahami pembelajaran selama penggunaan media	<p>SA:  “Kalau tutor-tutor yang sudah tua biasanya cuma pake modul mbak, tapi kalau pae media pembelajaran</p>

	pembelajaran tersebut?	<p>biasanay lebih jelas” (CW.4.4)</p> <p>FO:</p> <p>“Faham mbak, kan cuma pake modl aja” (CW.6.4)</p> <p>“faham mbak, kan cuma pake modl aja” (CW.6.4)</p> <p>SW:</p> <p>“Ya faham mbak soalnya kalau modul kan bisa sambil dibaca dirumah jadi lebih enak” (CW.7.4)</p> <p>OW:</p> <p>“Kalau pas pake LCD ya jelas juga kok, kita juga enggak cepet bosen pas kayak ceramah aja” (CW.8.4)</p> <p>RH:</p> <p>“Paham kok mbak, kaau pake buku mah enak tinggal nunggu ceramah aja dari tutornya” (CW.11.4)</p> <p>TT:</p> <p>“Paham mbak, wong tutornya jelasinya sampe kita mudeng kok” (CW.17.4)</p>
20.	Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar?	<p>SA:</p> <p>“Sesuai mbak kan biasanya petemuan sebelumnya sudah dijelaskan dahulu, seperti apa media yang akan digunakan dalam pertemuan selanjutnya.” (CW.4.5)</p> <p>FO:</p> <p>“Sesuai mbak, kan yang dibutuhkan warga belajar kan biasanya penjelasan saja dari modul yang ada” (CW.6.5)</p> <p>SW:</p> <p>“ Sudah mbak” (CW.7.5)</p> <p>OW:</p> <p>“Sudah kali ya mbak, soalnya ya jelas kok njelasinya” (CW.8.5)</p> <p>RH:</p> <p>“Ya sesuai lah mbak” (CW.11.5)</p> <p>TT:</p> <p>“Udah kali ya mbak, soalnya aku nya juga ngak terlalu mudeng masalah begituan” (CW.17.5)</p> <p>SH:</p> <p>“ Media pembelajaran yang sudah diajarkan biasanya yang dibutuhkan oleh warga belajar, namun kalau pengimplementasian kan tergantung dengan tutornya mbak.” (CW. 5.10)</p> <p>MH:</p> <p>“Sudah disesuaikan mbak, tapi kalau penerapan ya kurang tau di setiap PKBMnya bagaimana” (CW.10.10)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasnaya tergantung dengan tutor sih mbak, kadang ada yang menggunakan kadang juga hanya menggunakan modul saja. (CW. 1.19)</p>

		<p>IN:  “Kalau disini pemebelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan LCd atau modul pemebllaajatron yang da di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p> <p>HW:  “Sebagai pengelola, kita kan hanya memeberikan dukungan media pemebelajarannya saja, tapi kan kalau dalam proses pembelajaran semua kan diserahkan sama tutor langsung selaku pemegang kelas to mbak. ” (CW. 9.19)</p> <p>RA:  “Media pemebelajaran kita seringnya pinjam mbak, soalnya kita kan juga tempatnya barenagn sama SD Wates 4 juga to.” (CW.19.19)</p> <p>AG:  “Kalau dari PKBM cuma pake modul aja mbak.” (CW.20.19)</p> <p>ZU:  “Media pemebelajaran yang digunakan paling yang ada hanya modul mbak.” (CW.18.19)</p> <p>KS:  “Biasnaya sudah disesuaikan mbak dari kurikulum yang ada, kita sebagai tutor hanya menyampaikan saja.” (CW. 3.9)</p> <p>MB:  “Kalau dibilang sesuai sih sebenarnya sudah sesuai kok mbak, tapi karena tidak di gunakan dengan baik ya bagaimana ya.” (CW.12.9)</p> <p>JK:  “Karena media saja masih kurang berarti kan banyak juga media yang kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk warga belajar.” (CW.13.9)</p> <p>ND:  “Media ya kalau bisa disesuaikan mbak, soalnya kan tutor juga mengusahakan agar warga belajar juga berpartisipasi dan mudeng.” (CW.14.9)</p> <p>KL:  “Belum mbak, la media saja masih pinjam to.” (CW.15.9)</p> <p>IK:  “Belum mbak, media pembelajran masih kurang untuk mendukung proses belajar mengajar disini.” (CW.16.9)</p>
21.	Berapa pengelola disetiap lembaga yang ada?	<p>SH:  “ Disetiap PKBM biasanya yang terlapor di dinas pendidikan sekitar 7-8 orang.” (CW.5.6)</p> <p>MH:  “Kalau pengelola lembaga yang aktif paling disetiap</p>

		lembaga cuma 2 mbak tapi kalau di struktur organisasi biasanya yang dicantumin ada banyak bisa sampe 8 orang” (CW.10.6)
22.	Apakah tutor murni mengajar di PKBM saja?	<p>NN:  “Tidak lah mbak, biasanya diambil dari guru-guru yang mengajar di formal kok,” (CW.1.12)</p> <p>IN:  “Jelas tidak mbak, biasanya kita ambil dari pendidikan formal biar sesuai dengan mata pelajaran.” (CW.2.12)</p> <p>HW:  “Semuanya palah dari pendidikan formal mbak, yang mengajar hanya disini itu kayaknya cuma 1 mbak” (CW.9.12)</p> <p>RA:  “Ya tidak lah mbak, kalau cuma disini saja enak cukup lah mbak untuk makan.” (CW.9.12)</p> <p>AG:  “Tidak mbak. Biasanya palah saya ngambilnya dari guru-guru pendidikan formal kok.” (CW.20.12)</p> <p>ZU:  “Tidak ada mbak,” (CW.18.12)</p>
2.3	Apakah ada tutor yang mengajar di pendidikan formal?	<p>NN:  “Hampir semua tutor mengajar di pendidikan formal mbak, dan biasanya di PKBM hanya untuk menambah waktu atau hanya berupa pelayanan sosial” (CW.1.13)</p> <p>IN:  “Hanya 1 orang saja mbak yang hanya ngajar di sini saja, biasanya mereka juga mengajar di pendidikan formal ” (CW.2.13)</p> <p>HW:  “Ya itu mbak dari 14 tutor, 1 tutor berasal dari pendidikan formal semua” (CW.9.13)</p> <p>RA:  “Semua tutor disini mengajar di pendidikan formal mbak.” (CW.19.13)</p> <p>AG:  “Semuanya mbak” (CW.20.13)</p> <p>ZU:  “Semua tutor dari pendidikan formal mbak.” (CW.18.13)</p>
24.	Berapakah tutor yang berasal dari pendidikan formal?	<p>NN:  “Semuanya mbak dari 14 tutor semuanya dari pendidikan formal semua” (CW. 1. 15)</p> <p>IN:  “13 orang ” (CW. 2. 15)</p> <p>HW:  “13 tutor” (CW.9.15)</p> <p>RA:</p>

		<p>“Semua tutor mbak.” (CW.19.15)</p> <p>AG:</p> <p>“13 tutor semuanya mbak” (CW.20.15)</p> <p>ZU:</p> <p>“14 tutor mbak.” (CW.18.15)</p>
25.	Apakah ada kualifikasi tertentu untuk menjadi tutor di PKBM ini?	<p>NN:</p> <p>“Sebenarnya sih ada mbak, tapi ya bagaimana ya sekarang yang penting mau ngajar aja dan sesuai dengan mata pelajarannya.” (CW.1.16)</p> <p>IN:</p> <p>“Ada lah mbak pastinya, namun kalau harus sesuai dengan kualifikasi pasti pada ngak mau soalnya kan sukarela ya, jadi ya biasanya yang mau aja jadi tutor disini.” (CW.2.16)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau berbicara kualifikasi untuk tutor untuk mengajar disini yang ada nantinya pada ngak mau ngajar disini mbak, soalnya disini tidak dibayar, kalau tuntutan yang diajukan banyak ya bagaimana gitu kan ya mbak”(CW.9.16)</p> <p>RA:</p> <p>“Kualifikasi untuk semua tutor ada mbak, hahah yang penting pendidikan sesuai dengan yang diajar dan yang penting lagi bisa ngajar to mbak.”(CW.19.16)</p> <p>AG:</p> <p>“Tidak mbak. Yang penting bisa ngajar aja mbak.”(CW.20.16)</p> <p>ZU:</p> <p>“Tidak ada mbak, dulu berbekal yang mau mengajar disini aja mbak, soalnya gaji juga kita tidak ada awalnya.”(CW.18.16)</p> <p>KS:</p> <p>“Kalau saya dulu ngak ada mbak, langsung ngajar aja kok mbak.” (CW. 3.5)</p> <p>MB:</p> <p>“Kalau dulu saya enggak ada mbak pas masuk disini, tinggal masuk aja, yang penting mau ngajar dan bisa ngajar.” (CW.12.5)</p> <p>JK:</p> <p>“Selama saya mengajar disini tidak ada kok mbak, biasanya yang penting bisa ngajar.” (CW.13.5)</p> <p>ND:</p> <p>“Enggak mbak, pertama saya disini sampai sekarang juga syaratnya masih sama. Yang penting bisa ngajar gitu aja.” (CW.14.5)</p> <p>KL:</p> <p>“Saat perekrutan awal ada mbak, tapi dari beberapa kualifikasi biasanya hanya beberapa yang terpenuhi.” (CW.15.5)</p> <p>IK:</p>

		<p>“Tidak mbak, waktu saya Cuma yang penting mata pelajaran sesuai dengan bidang pendidikan dan yang penting bisa mengajar saja.” (CW.16.5)</p> <p>SH:</p> <p>“kebanyakan dari semua PKBM tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi tutor, yang penting mau mengajar saja” (CW. 5.8)</p> <p>MH:</p> <p>“tidak mbak, biasanya PKBM merekrut untuk jadi tutor yang penting kan mau ngajar, bukan berasal dari kualifikasi yang ada ” (CW. 10.8)</p>
26.	Apakah tutor mendapat pelatihan dan pembekalan dari Dinas Pendidikan?	<p>KS:</p> <p>“Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)</p> <p>MB:</p> <p>“Pembekalan biasanya ada mbak setiap semester itu ngirim ke P2PNFI disemarang mbak, biasanya juga digilir juga mata pelajaran atau pelatihanya.” (CW.12.4)</p> <p>JK:</p> <p>“Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. ” (CW.13.4)</p> <p>ND:</p> <p>“Kalau dari dinas untuk tutor sendiri ngak ada mbak. ” (CW.14.4)</p> <p>KL:</p> <p>“Kalau dari Dinas pendidikan jarang mbak ada pelatihan. ” (CW.15.4)</p> <p>IK:</p> <p>“Pembekalan itu biasanya ada mbak, persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)</p>
27.	Bagaimana dukungan pemerintah dalam menunjang kinerja tutor?	<p>NN:</p> <p>“Biasanya dukungan hanya berbrntuk pelatihan atau diklat saja mbak, sednagkan dari segi keuangan juga masih kurang.” (CW. 1.17)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau dari pemerintah mungkin bisa dibilang ngak ada kali ya mbak, yang banyak itu dari P2PNFI biasanya mengadakan banyak pelatihan untuk tutor.” (CW. 2.17)</p> <p>HW:</p> <p>“Itu kali ya mbak sering ada pelatihan diklat, pameran yang diadakan pemerintah, itu juga snagt membantu kita sebagai tutor” (CW.9.17)</p> <p>RA:</p> <p>“Dukungan dari pemerintah mah kurang mbak, apalagi masalah gaji. Sanagt kurang sekali bagi tutor.” (CW.19.17)</p>



		<p>AG: “Sedikit mbak kalau dukungan dari pemerintah. Gaji saya masih kurang dari kata cukup.” (CW.20.17)</p> <p>ZU: “Aduh mbak, Dukungan pemerintah masih kurang mbak, kita saja untuk mengaji tutor saja masih kurang-kurang kok.” (CW..1718)</p>
28.	Apakah jumlah tutor terpenuhi?	<p>SH: “Terpenuhi mbak, bisa dicek langsung disetiap PKBM yang bersangkutan”(CW.5.7)</p> <p>MH: “Kalau tutor terpenuhi mbak sesuai dengan kelas dan mata pelajaran juga kok, kalau dilihat dilapangan seperti itu”(CW.10.7)</p> <p>NN: “Jelas sesuai dengan kebutuhan ya mbak, sesuai juga dengan latar pendidikan yang ada.” (CW. 1.14)</p> <p>IN: “Ada yang terpenuhi ada yang tidak mbak, dari 14 tutor yang ada ada 4 tutor yang tidak sesuai dengan mata pelajaran.” (CW. 2.14)</p> <p>HW: “Terpenuhi mbak dan disini termasuk yang sesuai dengan kebutuhan ”(CW.9.14)</p> <p>RA: “Untuk paket B sudah terpenuhi mbak. Ditambah lagi kan ada juga tutor paket yang lain juga yang biasanya membantu juga. ”(CW.19.14)</p> <p>AG: “Sudah mbak. Sesuai juga dengan mata pelajarannya.”(CW.20.14)</p> <p>ZU: “Sudah mbak, sudah sesuai dengan mata pelajaran juga.”(CW.18.14)</p>
29.	Apakah tutor menguasai materi yang diajarkan?	<p>SA: “Menguasai kali ya mbak, soalnya saya juga ngak ngerti heheheh..” (CW.4.6)</p> <p>FO: “Hampir semua tutor menguasai mbak, soalnya saya juga mudeng kalau pas diajari” (CW.6.6)</p> <p>SW: “Bisa kok mbak soalnya menjelaskanya dengan jelas dan banyak yang mengerti termasuk saya.” (CW.7.6)</p> <p>OW: “Pastinya iya kali ya mbak. Soale yang dijelake saya juga mudeng kok” (CW.8.6)</p> <p>RH: “Ya pastinya menguasai lah mbak, kalau enggak kita pun ya ngak terlalu ngerti hahah” (CW.11.6)</p> <p>TT:</p>

		<p>“Itu iya mbak, biasanya materi kan dari modul aja kok” (CW.17.6)</p> <p>NN:</p> <p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>IN:</p> <p>“Ada 2 tutor yang kurang mahir dalam menggunakan media pembelajaran yang moderen mbak, karena memang sudah tua.” (CW.2.21)</p> <p>HW:</p> <p>“Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran.” (CW.9.21)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.” (CW.19.21)</p> <p>AG:</p> <p>“Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.” (CW.20.21)</p> <p>ZU:</p> <p>“Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.” (CW.20.21)</p>
30.	Apakah tutor datang tepat waktu?	<p>SA:</p> <p>“Tepat waktu mbak mungkin satu atau dua tutor sja yng sering telat, katanya beliau juga ngajar di SMP formal, jadi biasanay waktu juga ditambah kok kalau beliau telat.” (CW4.7)</p> <p>FO:</p> <p>“Kadang ada tutor yang sering teat mbak, jadinya waktunya kebuang banyak, tapi kan biasanya warga belajar palah suka” (CW.6.7)</p> <p>SW:</p> <p>“Tepat waktu mbak, malah yang sering telat itu warga belajarnya kok heheheh” (CW.7.7)</p> <p>OW:</p> <p>“Palah seringnya warga belajarnya yang sering telat mbak.” (CW.8.7)</p> <p>RH:</p> <p>“Tepat waktu sih mbak, palah yang sering telat itu kan warga belajarnya kok” (CW.11.7)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau disini iya mbak, kalau telat biasanya waktunya ditambah menyesuaikan sam tutor mbak” (CW.17.7)</p>
31.	Apakah tutor selalu memberikan evaluasi proses pembelajaran?	<p>SA:</p> <p>“Evaluasinya itu Mid semester dan ulangan-ualang tidak ya mbak? Kalau itu sih ada”</p>

		<p>(CW.4.8)</p> <p>FO:</p> <p>“Evaluasinya ada mbak, yaitu paling Cuma midsemester sama semesteran aja” (CW.6.8)</p> <p>SW:</p> <p>“Evaluasi pembelajaran tidak ada mbak, paling Cuma mid semester, dan semesteran aja” (CW.7.8)</p> <p>OW:</p> <p>“Ulangan gitu pa mbak, walah enggak pernah ada mbak” (CW.8.8)</p> <p>RH:</p> <p>“Kalau ulangan-ulangan kayak di sekolah formal enggak ada mbak, paling ya itu yang sesuai jadwal dari PKBM” (CW.11.8)</p> <p>TT:</p> <p>“Ulangan gt paw mbak, disini ngak ada ulangan mbak. Paling paling ya PR gt aja” (CW.17.8)</p>
31.	Apakah diadakan evaluasi pembelajaran secara berkala dan terjadwal?	<p>SA:</p> <p>“Evaluasi pembelajaran itu kan dijadwal dari PKBM mbak, kalau yang dari tutor langsung jarang ada mbak.” (CW.4.9)</p> <p>FO:</p> <p>“Ada mbak, kan kalau yang berkala dan terjadwal biasanya langsung dari PKBM ”(CW.6.9)</p> <p>SW:</p> <p>“Kalau yang berkala dan terjadwal biasanya mid semester dan semesteran mbak, itu kan sudah dijadwal oleh PKBM juga”(CW.7.9)</p> <p>OW:</p> <p>“Kalau yang dijdwal ada mbak tapi biasanya cuma mid semeser sama semesteran ja itu kok”(CW.8.9)</p> <p>RH:</p> <p>“Kalau dari PKBM ada mbak, itu lho mid semester sama semesteran itu aja, kalau yang lainnya mah enggak ada”(CW.11.9)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau yang terjadwal ngikuti dari PKBM ada mbak,mid semester sama semesteran itu lho... yang biasanya berengan sama PKBM yang lain juga”(CW.17.9)</p>
32.	Apakah PKBM ini milik pemerintah atau yayasan?	<p>NN:</p> <p>“PKBM ini pinjaman dari Pemerintah Kota Magelang mbak, tapi berada di bawah naunagn dari Dinas Pendidikan mbak.” (CW.1.7)</p> <p>IN:</p> <p>“Semua gedung yang ada di PKBM kota magelang semua milik Pamerintah Kota magelang namun berada dibawah naunagn Dinas pendidikan Kota Megelang.” (CW.2.7)</p>

		<p>HW:          “Gedung kita dipinjam pemerintah kota mbak, tapi kalau untuk perizinan dan yang lain sebagainya kita berada di Dinas pendidikan kota masihan.” (CW.9.7)</p> <p>RA:          “Tempatnya milik Pemerintah Kota Magelang mbak tapi masih dibawah wenangan Dinas Pendidikan Kota Magelang.” (CW.19.7)</p> <p>AG:          “Milik Pemerintah Kota mbak, tapi masih dibawah bimbingan Dinas Pendidikan Kota Magelang.” (CW.20.7)</p>
33.	Apakah sarana dan prasarana yang ada di PKBM dalam kondisi yang baik?	<p>SA:          “Masih baik kok mbak, layak lah untuk pembelajaran.”(CW.4.10)</p> <p>FO:          “Baik kok mbak, yang penting masih bisa buat belajar kok”(CW.6.10)</p> <p>SW:          “Bagus kok mbak, paling Cuma ada beberapa kursi yang udah agak buluk”(CW.7.10)</p> <p>OW:          “Kalau meja kursi masih bagus mbak, dibuat belajar juga msih nyaman kali ya mbak”(CW.8.10)</p> <p>RH:          “Masih kok mbak, kita jug amasih nyaman”(CW.11.10)</p> <p>TT:          “Ya masih layak aja kayae mbak, lek digawe sinau jeh patut”(CW.17.10)</p> <p>SH:          “Dinas pernah mengadakan sarana dan prasanana di salah satu pkb saja, yaitu PKBM permata yaitu pengadaan meja dan kursi” (CW. 5.5)</p> <p>MH:          “Kalau setahu saya tahun 2014 pernah mbak pengadaan mebeler untuk PKBM permata, ” (CW.10.5)</p> <p>KS:          “Belum mbak, namanya juga PKBM, semuanya masih minjam mbak, media pembelajaran saja masih minim.” (CW.3.6)</p> <p>MB:          “Sarana dan prasarana kurang lengkap ya mbak, tidak ada lab dan alat-alat pendukung praktikum. Ya maklum ya namanya juga pendidikan non formal” (CW.12.6)</p> <p>JK:          “Kalau di PKBM sini belum mbak, dari sarana dan</p>

		<p>prasana masih kurang.” (CW.13.6)</p> <p>ND:</p> <p>“Kalau disini ya mbak, dibidang lengkap ya jauh dari kata lengkap, tapi paling tidak bisa buat pembelajaran dan waraga belajar juga nyaman.” (CW.14.6)</p> <p>KL:</p> <p>“Disini belum mbak, Gedung saja masih numpang mbak.” (CW.15.6)</p> <p>IK:</p> <p>“Jauh dari kata lengkap mbak, tapi ya masih bisa untuk pembelajaran saja mbak.” (CW.1.6)</p>
34.	Apakah sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran?	<p>SA:</p> <p>“Iya kali ya mbak, kalau enggak ada meja dan kursi gimana saya belajarnya.” (CW.4.11)</p> <p>FO:</p> <p>“Kalau disini masih mendukung mbak.” (CW.6.11)</p> <p>SW:</p> <p>“Mendukung kok mbak, buktinya masih ada pembelajaran disini.” (CW.7.11)</p> <p>OW:</p> <p>“Iya lah mbak, kalau enggak ada sarana dan prasarana trus pembelajarannya gimana.... masak mau dilapangan” (CW.8.11)</p> <p>RH:</p> <p>“Mendukung lah mbak, kalau enggak ada kita belajarnya dimana” (CW.11.11)</p> <p>TT:</p> <p>“Ya mendukung to mbak, lek ngak ana ya gimana gitu.” (CW.17.11)</p> <p>SH:</p> <p>“Dari ketiga PKBM yang ada belum ada yang sesuai dengan standar SPM mbak,” (CW.5.9)</p> <p>MH:</p> <p>“Belum juga mbak, masih banyak yang kurang, tapi asal pembelajaran lancar sih kadang tidak jadi masalah ko mbak.” (CW.10.9)</p> <p>NN:</p> <p>“Ya beginilah mbak keadaan di PKBM, mau dibidang sudah ya belum tapi ya cukup dan layak untuk pembelajaran.” (CW.1 18)</p> <p>IN:</p> <p>“Sudah mbak, bisa dilihat saja modul, alat peraga semua ada dan semua digunakan untuk proses pembelajaran.” (CW.2. 18)</p> <p>HW:</p> <p>“Ya itu lah pasti lah mbak, kalau sarana dan prasarana lengkap kan warga belajar juga nyaman. Sebagai pengelolaan an juga puas.” (CW.9.18)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya kalau lengkap sarana dan prasarana nya ya pasti</p>

		<p>mendukung mbak, tapi disini masih kurang mendukung mbak.” (CW.19.18)</p> <p>AG:</p> <p>“Masih kurang mbak. Maklum PKBM sini kan juga masih numpang ya.” (CW.20.18)</p> <p>ZU:</p> <p>“Masih kurang mbak, dilihat dari jumlah ruanagn saja kalau disini kurang mbak.” (CW.18.18)</p> <p>KS:</p> <p>“Belum kayaknya mbak, bisa dilihat saja dilapangan seperti apa.” (CW. 3.7)</p> <p>MB:</p> <p>“Kurang sesuai mbak kalau disini, masih jauh sekali dari standar teknisa yang ada dilapangan, dilihat dari jumlah murid dan ruangan saja sudah jelas kurang mbak .” (CW.12.7)</p> <p>JK:</p> <p>“Belum mbak, dari jumlah sarana dan prasarana juga belum terpenuhi kok.” (CW.13.7)</p> <p>ND:</p> <p>“Belum lah mbak, dilihat seko jumlahe aja belum nyukupi kok mbak.” (CW.14.7)</p> <p>KL:</p> <p>“Belum mbak, masih sangat minim disini. Tapi ya lumayan lah untuk pembelajaran sudah layak kok” (CW.15.7)</p> <p>IK:</p> <p>“Walah jauh mbak. Belum.” (CW.16.7)</p>
35.	Apakah ada pembinaan dalam Standar Pelayanan Minimal?	<p>SH:</p> <p>“Pembinaan dari Dians kota belum pernah ada mbak, tapi kalau dari PNFI semarang sudah pernah mbak, namun hanya perwakilan saja.” (CW.5.11)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau dari dians belum pernah ada mbak, pernah itu yang mengadakan dari piak P2PNFI Semarang” (CW.10.11)</p>
36.	Apakah penyusunan rencana kerja mencapai target SPM?	<p>SH:</p> <p>“Rencana kerja biasanay sudah sesuai dan SPM, namun karena banyak kendala sehingga tidak bisa mencapai target” (CW.5.12)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau disetiap rencana kerja selalu memenuhi SPM mbak, tapi kalau pelaksanaan pasti kan ada masalah dan kadang banyak kendala jadi tidak terpenuhi dengn baik biasanya. Di ketiga PKBM yang ada juga hampir sama seperti itu” (CW.10.12)</p>
37.	Apakah penyusunan Standar kerja mencapai target SPM?	<p>SH:</p> <p>“Standar kerja setiap lembaga mencapai target SPM dilihat dari pengelolaan dan lulusan yang dihasilkan” (CW.5.13)</p>

		<p>MH:</p> <p>“Dari ketiga PKBM yang ada yang standar kerjanya bagus itu hanya satu mbak di PKBM Kuncup mekar, kalau yang lain masih kurang bagus dan tidak mencapai SPM yang seharusnya” (CW.10.13)</p>
38.	Apakah ada penilaian pengukuran kinerja?	<p>SH:</p> <p>“Ada mbak, tapi dari ketiga lembaga yang ada yang pernah dinilai adalah PKBM kuncup mekar pada tahun 2015 dan tahun 2016 ini rencananya adalah upaya terampil.” (CW.5.14)</p> <p>MH:</p> <p>“Pengukuran kinerja pengelola PKBM kita lakukan setiap tahun mbak, ada tim khusus biasanya yang menangani hal ini”(CW.10.14)</p>
<b>Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang.</b>		
39.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?	<p>NN:</p> <p>“Kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal adalah keuangan mbak, ya kalau keuangan sedikit bagaimana bisa menjalankan program dengan baik.” (CW. 1.23)</p> <p>IN:</p> <p>“Banyak mbak kalau bicara kendala, salah satunya ya masalah anggaran lah ya pastinya. Karna memang kalau anggaran itu masalah yang sangat krusial untuk menunjang kelancaran.” (CW. 2.23)</p> <p>HW:</p> <p>“Banyak mbak, tapi kalau saya bilang semua itu banyak masalah dari warga belajar yang masih sangat labil.” (CW.9.23)</p> <p>RA:</p> <p>“Kendala banyak mbak, anggaran lah ya yang paling biasanya berperan penting banget.”(CW.19.23)</p> <p>AG:</p> <p>“Banyak mbak, semua masalah biasanya dari keterbatasan anggaran.”(CW.20.23)</p> <p>ZU:</p> <p>“Lagu lama mbak, masalahnya ya anggaran lah mbak kalau anggaran sedikit ya kita sebagai pengelola juga susah.”CW.18.23)</p>
40.	Apakah ada pihak-pihak tertentu yang menghambat pengimplementasian standar pelayanan minimal dalam kesetaraan paket B di kota magelang?	<p>NN:</p> <p>“Kalau pihak lain sih ngak ada mbak.” (CW.1.24)</p> <p>IN:</p> <p>“Ada mbak, warga belajar yang terdaftar namun tidak aktif itu lo. Jadi membuat data yang ada sering tidak valid.” (CW.2.24)</p> <p>HW:</p> <p>“Warga belajar mbak, ya bagaimana ya warga belajar kan sebagai subjek dari proses pembelajaran ini to mbak. Kalau ngak da warga belajar ya kita tidak ada</p>

		<p>program ini” (CW.9.24)</p> <p>RA:</p> <p>“Banyak mbak, dari anggaran, tutor, dan warga belajar punya kendala masing-masing mbak.” (CW.19.24)</p> <p>AG:</p> <p>“Warga belajar mbak. Terkadang tidak bisa diajak untuk maju.” (CW.20.24)</p> <p>ZU:</p> <p>“Pemerintah mbak kalau dirasa-rasa kurang mendukung PKBM secara penuh.” (CW.18.24)</p>
41.	Apakah penentuan kualifikasi tutor menjadi kendala dalam pemenuhan SPM?	<p>SH:</p> <p>“Seharusnya tidak menjadi kendala asalkan kualifikasi itu dipenuhi oleh setiap lembaga, namun karena tidak dipenuhinya itu menjadi kendala saat akreditasi ataupun penilaian yang lainnya.” (CW.5.16)</p> <p>MH:</p> <p>“Karena dari ketiga PKBM yang tutornya sesuai dengan SMP tidak ada, jadi sering menjadi kendala masalah dengan kurikulum dan cara mengajarnya yang masih tradisional mbak” (CW.10.16)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI Semarang untuk menyetarakan standar sesuai kualifikasi Nasional.” (CW.1.30)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau masalah tutor yang ada kita mengikutsertakan dalam pelatihan pengajaran yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan maupun dari swasta.” (CW.2.30)</p> <p>HW:</p> <p>“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik” (CW.9.30)</p> <p>RA:</p> <p>“Mengikutsertakan dalam berbagai kualifikasi tutor agar dapat terpenuhi” (CW.19.30)</p> <p>AG:</p> <p>“Mengikutkan dalam berbagai pelatihan dan mengusahakan untuk memenuhi kualifikasi dengan waktu tertentu.” (CW.20.30)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)</p>
42.	Apakah anda kesulitan dalam mencari modul?	<p>SA:</p> <p>“Tidak mbak soalnya ditaruh di TBM kok, jadi</p>



		<p>mudah mengambilnya.” (CW.4.12)</p> <p>FO:</p> <p>“Tidak kok mbak,” (CW.6.12)</p> <p>SW:</p> <p>“Sedikit mbak, karena digudang dan tidak dirapikan jadi susah pas nyarinya aja” (CW.7.12)</p> <p>OW:</p> <p>“Enggak sih mbak, banyak modul kok sebenarnya alu mau injem dan baca ” (CW.8.12)</p> <p>RH:</p> <p>“Enggak mbak, kan kalau enggak ada tinggal minta sama pengelola aja” (CW.11.12)</p> <p>TT:</p> <p>“Enggak sih mbak sebenarnya, toh dah disiapkan sama pengelola juga” (CW.17.12)</p>
43.	Apakah anda mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan tutor?	<p>SA:</p> <p>“Tekadang iya mbak, kalau tutornya pas dapat yang galak, kadang ada juga tutornya yang judesnya minta ampun,” (CW.4.13)</p> <p>FO:</p> <p>“Tidak mbak, tutor disini baik baik kok, dan enak kalau diajak diskusi” (CW.6.13)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak ada, disini tutor-tutornya enak-anak kok mbak, semuanya bisa diajak bercanda.” (CW.7.13)</p> <p>OW:</p> <p>“Tutor sini mah gokil-gokil mbak, enggak sepaneng kok.” (CW.8.13)</p> <p>RH:</p> <p>“Tidak ada, tutornya enak kok mbak” (CW.11.13)</p> <p>TT:</p> <p>“Enggak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok” (CW.17.13)</p>
44.	Apakah anda mengalami kendala dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai?	<p>SA:</p> <p>“Tidak mbak, soalnya yang penting bagi saya proses pembelajaran ada, dan modul juga ada, kalau saya gitu.” (CW.4.14)</p> <p>FO:</p> <p>“Sebenarnya kalau dari segi sarana dan prasana tidak sih mbak, yang penting masih bisa digunakan untuk pembelajaran saja” (CW.6.14)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak mbak, disini saya yang penting ikut pembelajaran, pembelajaran disini juga fleksibel kok jadi tidak terlalu membutuhkan sarana dan prasarana yang bagus kayak di sekolah formal” (CW.7.14)</p> <p>OW:</p> <p>“Tidak terlalu mbak, soalnya kan biasanya juga diusahakan sama pengelola kok” (CW.8.14)</p> <p>RH:</p>

		<p>“Tidak masalah mbak, maklum lah mbak kan juga disekolah non formal, beda sama sekolah formal yang lengkap” (CW.11.14)</p> <p>TT:</p> <p>“Kedala masalah sarana dan prasarana enggak ada mbak. Yang penting mah masih bisa buat belajar aja to mbak” (CW.17.14)</p> <p>SH:</p> <p>“Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)</p> <p>MH:</p> <p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan kalaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.10.19)</p> <p>NN:</p> <p>“Salah satunya iya, sarana dan prasana kan juga masih minjam dan inventaris disini juga.” (CW.1.25)</p> <p>IN:</p> <p>“Pasti iya, kalau sarana dan prasaran kurang bagaimana proses pembelajaran yang ada berlangsung dengan lancar. .” (CW.2.25)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau untuk pembelajaran ya pasti jadi kendala lah mbak, tapi ya jadinya diusahakan buat lebih enak aja pas dipakai.” (CW.9.25)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya jelas ya mbak. Gimana pembelajaran bisa berjalan lancar kalau tidak ada sarana dan prasarana yang memadai.” (CW.19.25)</p> <p>AG:</p> <p>“Pastinya mbak. Sarana dan prasarana lengkap kan enak juga buat belajar.” (CW.20.25)</p> <p>ZU:</p> <p>“Ya jelas to mbak, kalau lengkap kan warga beajar juga semangat, tutor pun juga semanagt.” (CW.18.25)</p>
45.	Apakah peraturan dari dinas pendidikan menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran?	<p>NN:</p> <p>“Tidak ada lah mbak, soalnya semua wewenang proses pembelajaran diserahkan langsung pada pengelola PKBM. (CW.1.27)</p> <p>IN:</p> <p>“Peraturan dari dinas pendidikan sangat membantu proses pengelolaan PKBM dalam proses pembelajaran yang ada kok mbak.” (CW.2.27)</p> <p>HW:</p> <p>“Tidak mbak, kendala dalam proses pemebelajran biasanya karna warga belajar</p>

		<p>datangnya terlambat . bukan ada masalah dengan peraturan pemerintah” (CW.9.27)</p> <p>RA:</p> <p>“Iya mbak, apalagi kebijakan masalah anggaran.” (CW.19.27)</p> <p>AG:</p> <p>“Tidak mbak” (CW.20.27)</p> <p>ZU:</p> <p>“Terkadang iya mbak, contohnya saja kalau pas lagi pembuatan proposal dan pelaporan anggaran.” (CW.18.27)</p>
46.	Apakah anda mengalami kendala dengan jadwal pembelajaran?	<p>SA:</p> <p>“Iya mbak, soalnya saya kan sudah kerja jadi seminggu di jadwal masuk 3 kali saya hanya bisa masuk 2 hai saja.” (CW.4.15)</p> <p>FO:</p> <p>“Tidak terlalu mbak, soalnya kan biasanya jadwla sudah disesuaikan dengan yang kerja dan tutornya” (CW.6.15)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak mbak, saya kan masuk paket b juga biar bebas sekolahnya” (CW.7.15)</p> <p>OW:</p> <p>“Jadwal mah saya enggak mbak, soalnya saya kan sudah menikah, dan enggak ada kesibukan juga” (CW.8.15)</p> <p>RH:</p> <p>“Jadwal mah kadang mbak kalau pas ujian biasanya, soalnya kan saya kerja jadi harus izin juga sama bosnya” (CW.11.15)</p> <p>TT:</p> <p>“Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain” (CW.17.15)</p>
<p align="center"><b>Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang</b></p>		
47.	Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?	<p>NN:</p> <p>“Solusinya ya mbak, kalau anggaran ditambah aja, pasti pengimplementasian juga akan maksimal.” (CW.1.28)</p> <p>IN:</p> <p>“Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi dari anggaran, kualifikasi tutor dan pengelolaan PKBM itu sendiri ya mbak.” (CW.2.28)</p> <p>HW:</p> <p>“Perlu adanya pelatihan yang lebih serius dan mendalam tentang SPM itu sendiri.” (CW.9.28)</p> <p>RA:</p>

		<p>“Sebagai pengelola sering lah ya mengadakan audiensi dan penanganan yang lain. Biar lebih baik” (CW.19.28)</p> <p>AG:</p> <p>“Ya kalau masalah anggran mah dari pemerintahnya bagaimana t mbak, kita sebagai pengelola Cuma bisa menjalankan apa instruksi dari atsa to.” (CW.20.28)</p> <p>TT:</p> <p>“Anggaran ditambah mungkin bisa mengurangi sedikit kendala yang ada di PKBM kok mbak.” (CW.18.28)</p> <p>KS:</p> <p>“Banyak mbak, gaji saya sebagai tutor saja kurang, sarana dan prasana disini juga kurang mendukung dan warga belajar juga kurang kondusif” (CW. 3.11)</p> <p>MB:</p> <p>“Kendala saat pengimplementasian biasanya karena keterbatasan anggaran mbak untuk PKBM itu jadi kurang optimal.” (CW.12.11)</p> <p>JK:</p> <p>“Kendala banyak mbak disini, kalau saya sebagai tutor mah. Apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang.” (CW.13.11)</p> <p>ND:</p> <p>“Warga belajar mbak, kan dilihat dari orientasi belajare wes beda to. Na itu sebagian besar disitu.” (CW.14.11)</p> <p>KL:</p> <p>“Sarana dan prasarana mbak kalau menurut saya yang sebagai tutor.” (CW.15.11)</p> <p>IK:</p> <p>“Banyak mbak, yang paling krusial ya anggaran to mbak. La mau gimana lagi anggaran yang menjalankan e mbak” (CW.16.11)</p>
48.	Bagaimana cara mengatasi kendala kualifikasi tutor untuk pemenuhan SPM?	<p>SH:</p> <p>“Penegasan dari pusat mengenai kulifikasi tutor dan kejelasan peraturan yan ada.” (CW.5.18)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau itu juga sedang dibicarakan mbak,soalnya kalu kita juga menuntut terlalu banyak pada tutor kan juga harus berbanding terbalik dengan gaji to. Tapi kan tau sendiri tutor saja hanya mendapat gaji dari APBD 2 saja” (CW.10.18)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI semarang untuk menyetarakan standar sesuai kulifikasi Nasional.” (CW.1.30)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau masalah tutor yang ada kita mengikutsertakan</p>

		<p>dalam pelatihan pengajaran yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan maupun dari swasta.” (CW.2.30)</p> <p>HW:</p> <p>“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik” (CW.9.30)</p> <p>RA:</p> <p>“Mengikutsertakkan dalam berbagai kualifikasi tutor agar dapat terpenuhi” (CW.19.30)</p> <p>AG:</p> <p>“Mengikutkan dalam berbagai pelatihan dan mengusahakan untuk memenuhi kalifikasi dengan waktu tertentu.” (CW.20.30)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)</p> <p>KS:</p> <p>“Tidak lah mbak, yang penting pembelajaran terlaksana aja.” (CW. 3.12)</p> <p>MB:</p> <p>“Tidak terlalu signifikan mbak, soalnya yang penting tutor mampu mengajar dengan baik dan warga belajar juga suka dengan tutor tersebut.” (CW.12.12)</p> <p>JK:</p> <p>“Kalau dalam pembelajaran tidak mbak, kualifikasi tutor biasanya kendala sama gaji mbak. Padahal gaji disini juga enggak seberapa.” (CW.13.12)</p> <p>ND:</p> <p>“Proses pembelajaran ngak ada hubunganya sama kualifikasi tutor biasanya mbak. Kualifikasi tutor kan biasanya hanya administrasi aja kok.” (CW.14.12)</p> <p>KL:</p> <p>“Tidak lah mbak. Yang penting warga belajar mengerti sama pa yang kita sampaikan saja sudah syukur mbak.” (CW.15.12)</p> <p>IK:</p> <p>“Dibilang tidak juga sebenarnya memberatkan juga mbak, tapi juga dari dinas juga tidak ada kejelasan kok mbak, ya kami sebagai tutor juga santai saja to. Yang penting tugas mengajar kita terpenuhi gitu aja.” (CW.16.12)</p>
49.	Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam hal sarana dan prasarana?	<p>SH:</p> <p>“ Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)</p> <p>MH:</p>

		<p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan kalau ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.5.19)</p> <p>NN:</p> <p>“Sarana dan prasarana ditambah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada aja mbak.” (CW.1.29)</p> <p>IN:</p> <p>“Pembenahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana aja kali ya mbak biar bisa digunakan semaksimal mungkin.” (CW.2.29)</p> <p>HW:</p> <p>“Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi, dari segi manajemen keuangan dan manajemen sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik ” (CW.9.29)</p> <p>RA:</p> <p>“Sebagai pengelola kita cuma bisa mengusahakan anggaran yang mana bisa digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana.” (CW.19.29)</p> <p>AG:</p> <p>“Mengajukan anggaran to mbak biar bisa memperbaiki sarana dan prasarana.” (CW.20.29)</p> <p>ZU:</p> <p>“Sarana dan prasarana bisa tidak terlalu dipusingkan, yang penting media pembelajaran lebih lengkap.” (CW.18.29)</p> <p>KS:</p> <p>“Kalau yang ini jelas lah ya mbak, soalnya kan tempat pembelajaran gabung dengan SD wates 4, jadi banyak endala kalau pas bersamaan penggunaanya.” (CW.3.13)</p> <p>MB:</p> <p>“Ya bagaimana ya, pasti iya lah, kalau alat-alat yang tidak lengkap kan juga menyusahkan para tutor juga mbak pas pembelajaran.” (CW.12.13)</p> <p>JK:</p> <p>“Sarana dan prasana ya iya lah mbak. Soalnya kan pengaruh sama pembelajaran to ya.” (CW.13.13)</p> <p>ND:</p> <p>“Ya pastinya iya mbak, tapi ya bagaimana lagi disini anggaran juga sangat minim. Jadi ya pasrah aja.” (CW.14.13)</p> <p>KL:</p> <p>“Ya jelas mbak. Soalnya kan memberi motivasi juga to mbak kalau sarana dan prasarana” (CW.15.13)</p> <p>IK:</p> <p>“Kendala sih tidak terlalu ya mbak, toh kalau disini pembelajarannya juga tidak terlalu sering dan</p>
--	--	---

		waktunya juga fleksibel.” (CW.16.13)
50.	Apakah usia warga belajar yang sangat berbeda menjadi kendala dalam proses pembelajaran?	<p>KS:  “Terkadang iya mbak, soalnya pasti daya tangkap setiap umur juga relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya.” (CW. 3.14)</p> <p>MB:  “Wah disini usia sekolah ada, yang sudah menikah juga ada, yang kerja juga ada. Kendalanya ya nanti dari cara berfikir itu to mbak, la gimana lagi yang difikirin juga udah beda-beda” (CW.12.14)</p> <p>JK:  “Kalau namanya di paket ya kendala usia warga belajar itu mbak yang beda-beda, pemikiranya juga udah jarang yang bener-bener mau sekolah. Orientasinya kan juga udah beda ya mbak sama yang sekolah formal.” (CW.13.14)</p> <p>ND:  “Itu masalah mbak di proses pembelajaran. Kadang kalau yang tua-tua yang sering kurang jelas. Kalau yang usia sekolah biasanya lebih cepat.” (CW.14.14)</p> <p>KL:  “Warga belajar tidak terlalu masalah mbak. Soalnya kan memang kalau di paket ya usia kan memang relatif ngak sama ya.” (CW.15.14)</p> <p>IK:  “Sebagai tutor di PKBM saya tidak terlalu kesulitan mbak, yang menjadi kendala palah tingkat kehadirannya saja mbak.” (CW.16.14)</p>
51.	Bagaimana mengatasi kendala dalam berkomunikasi dengan tutor?	<p>SA:  “Kadang via telepon mbak, soalnya kan zaman sudah canggih”(CW.4.16)</p> <p>FO:  “Kalau cara mengatasi enggak ada sih mbak, soalnya saya kan tidak ada masalah dengan tutor”(CW.6.16)</p> <p>SW:  “Saya sih diam aja mbak, yang penting saya mengikuti pelajaran yang tutor berikan gitu aja.”(CW.7.16)</p> <p>OW:  “Jangan bikin mood tutor sebel aja sama kitanya, pasti juga tutornya enak kok”(CW.8.16)</p> <p>RH:  “Jangan membuat tutor marah aja, pasti ngak ada masalah kok sama tutor”(CW.11.16)</p> <p>TT:  “Nurut aja sama perintahperintah tutor gt aja pasti ngak ada masalah kok mbak”(CW.17.16)</p>
52.	Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah jadwal	<p>SA:  “Kalau jadwal kerja saya kan ngak bisa diganti mbak,</p>

	pembelajaran?	<p>jadi ya pinginya jadwal aja menyesuaikan dengan kita yang bekerja”(CW.4.17)</p> <p>FO:</p> <p>“Jadwal saya sudah enjoy karna pemilihan dengan jam kerja saya juga cocok”(CW.6.17)</p> <p>SW:</p> <p>“Kalau masalah jadwal kan saya ngak ada masalah, tapi kalau yang lain ada masalah mungkin aja nie bisa disesuaikan dengn yang lain dulu gitu”(CW.7.17)</p> <p>OW:</p> <p>“Ya jadwal mah disesuaikan aja sama PKBM menyesuaikan dengan yang kerja dan tutor”(CW.8.17)</p> <p>RH:</p> <p>“Kalau saya biasanya minta izin sama bos saya mbak kalau pas ujian ”(CW.11.17)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau jadwal biasanya saya naruh bayi saya ke rumah simbahe to mbak. Kalau pas ngak ada yang dititipi ya terpaksa ngak ikut pembelajaran gitu aja”(CW.7.17)</p>
53.	Bagaimana solusi untuk mengatasi peraturan pemerintah yang ada demi terlaksannya proses pembelajaran?	<p>NN:</p> <p>“Solusinya ya biasanya kita tetep jalan mbak, yang penting proses pemebelajaran tetep berlangsung dengan baik saja .”(CW.1.31)</p> <p>IN:</p> <p>“Agar pembelajaran yang penting berlanjut maka sering kita mengabaikan peraturan dari pemerintah.”(CW.2.31)</p> <p>HW:</p> <p>“Mungkin bisa mengajukan sebuah saran agar peraturan pemerintah juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. ”(CW.9.31)</p> <p>RA:</p> <p>“Mengikuti kebijakan yang ada mbak. Yang penting pembelajaran masih bisa berlangsung dengan lancar”(CW.19.31)</p> <p>AG:</p> <p>“Ya mengikuti peraturan saja mbak, sebisa mungkin untuk yang bisa dilaksanakan.”(CW.20.31)</p> <p>ZU:</p> <p>“Ya dilaksanakan semampu kita aja to mbak, paling tidak untuk administrasi dari pemerintah saja.”(CW.18.31)</p>



Tabel. Reduksi, Display dan Kesimpulan

No.	Data	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan
<b>Tingkat Implementasi Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang</b>				
1.	<p>Berapa angka putus sekolah di Kota Magelang pada usia 12-16 tahun?</p> <p>SH: "Dari data tahun 2015, ada 42 siswa." (CW. 5.1)</p> <p>MH: "Data tahun 2015 ada 42 mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX." (CW. 10.1)</p>	<p>"Data tahun 2015 ada 42 mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX." (CW. 10.1)</p>	<p>"Data tahun 2015 ada 42 mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX." (CW. 10.1)</p>	<p>Angka putus Sekolah di Kota magelang pada tahun 2015 adalah 42 anak.</p>
2.	<p>Apakah warga belajar masih usia sekolah?</p> <p>NN: "Iya, tapi masih ada juga yang sudah tidak usia sekolah, selain itu biasanya mereka juga bekerja, prosentasenya sekitar 70% dan 30 % dari usia sekolah dan yang tidak usia sekolah." (CW.1.1)</p> <p>IN: "Banyak yang usia sekolah mbak, dibandingkan yang tidak, tapi ya itu biasanya mereka sudah bekerja atau sudah menikah." (CW.2.1)</p> <p>HW: "Masih mbak, tapi ya ada juga yang sudah kerja. Kalu enggak kerja biasnay sudah pada menikah" (CW.9.1)</p> <p>RA: "Kalau disini kbanyakan palah usia sekolah mbak, biasanya pindahan dari sekoah formal. " (CW.19.1)</p> <p>AG: "Usia sekolah banyak mbak, yang diluar usia sekolah juga banyak kok mbak. " (CW.20.1)</p> <p>ZU: "Masih mbak, disini lebih banyak yang usia sekolah, biasnaya pindahan dari</p>	<p>"Iya, tapi masih ada juga yang sudah tidak usia sekolah, selain itu biasanya mereka juga bekerja, prosentasenya sekitar 70% dan 30 % dari usia sekolah dan yang tidak usia sekolah." (CW.1.1)</p> <p>"Banyak yang usia sekolah mbak, dibandingkan yang tidak, tapi ya itu biasanya mereka sudah bekerja atau sudah menikah." (CW.2.1)</p> <p>"Masih mbak, disini lebih banyak yang usia sekolah, biasnaya pindahan dari sekolah formal." (CW.18.1)</p>	<p>"Iya, tapi masih ada juga yang sudah tidak usia sekolah, selain itu biasanya mereka juga bekerja, prosentasenya sekitar 70% dan 30 % dari usia sekolah dan yang tidak usia sekolah." (CW.1.1)</p> <p>"Banyak yang usia sekolah mbak, dibandingkan yang tidak, tapi ya itu biasanya mereka sudah bekerja atau sudah menikah." (CW.2.1)</p> <p>"Masih mbak, disini lebih banyak yang usia sekolah, biasnaya pindahan dari sekolah formal." (CW.18.1)</p>	<p>Kebanyakan warga belajar masih usia sekolah. Dilihat dari ketika lembaga biasnaya mereka pindahan dari sekolah formal.</p>

	sekolah formal.” (CW.18.1)			
3.	<p>Berapa lembaga yang menyediakan program kesetaraan di Kota Magelang?</p> <p>SH:</p> <p>“Ada 3 mbak, PKBM upaya terampil, PKBM kuncup mekar dan PKBM Permata saja.” (CW. 5.2)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau yang di kota magelang saja itu ada 3 aja mbak, semua di lembaga PKBM di bawah Nanungan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Magelang” (CW.10.2)</p>	<p>“Ada 3 mbak, PKBM upaya terampil, PKBM kuncup mekar dan PKBM Permata saja.” (CW. 5.2)</p>	<p>“Ada 3 mbak, PKBM upaya terampil, PKBM kuncup mekar dan PKBM Permata saja.” (CW. 5.2)</p>	<p>Lembaga yang menyediakan program kesetaraan ada 3 lembaga.</p>
4.	<p>Berapa kuota untuk warga belajar kesetaraan paket B di PKBM?</p> <p>NN:</p> <p>“Dalam satu tahun ajaran PKBM hanya menyediakan 40 kursi untuk warga belajar dengan jumlah dua kelas saja.” (CW.1.2)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga.” (CW.2.2)</p> <p>HW:</p> <p>“Tiap tahun ajaran baru sekitar 40 orang aja mbak, itu saja kadnag terpenuhi kadang juga endak.” (CW.9.2)</p> <p>RA:</p> <p>“Kalau tiap angkatan kalau disini tidak dibatasi mbak, kalau ada yang daftar 60 ya kita terima semua. Kalau Cuma ada 20 ya kita terima.” (CW.19.2)</p> <p>AG:</p> <p>“Tiap tahun berbeda beda mbak tergantung anggaran</p>	<p>“Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga.” (CW.2.2)</p> <p>“Kalau tiap angkatan kalau disini tidak dibatasi mbak, kalau ada yang daftar 60 ya kita terima semua. Kalau cuma ada 20 ya kita terima.” (CW.19.2)</p> <p>“Tiap tahun berbeda beda mbak tergantung anggaran saja.” (CW.20.2)</p>	<p>“Kalau disini dalam satu tahun ajaran paling banyak hanya 40 warga belajar saja mbak, karena terbatas dengan tutor juga.” (CW.2.2)</p> <p>“Kalau tiap angkatan kalau disini tidak dibatasi mbak, kalau ada yang daftar 60 ya kita terima semua. Kalau cuma ada 20 ya kita terima.” (CW.19.2)</p> <p>“Tiap tahun berbeda beda mbak tergantung anggaran saja.” (CW.20.2)</p>	<p>Setiap lembaga biasanya menyesuaikan dengan ruangan dan tutor yang ada.</p>

	<p>saja.” (CW.20.2)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kalau disini untuk satu ajaran pembelajaran tidak dikuota biasanya mbak, kalau masih bisa ditampung biasanya juga kami tampung kok.” (CW.18.2)</p>			
5.	<p>Berapa jumlah Warga belajar di lembaga PKBM?</p> <p>NN:</p> <p>“Untuk Kesetaraan paket B sekitar 92 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.1.3)</p> <p>IN:</p> <p>“Untuk Kesetaraan paket B sekitar 89 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.2.3)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau dari kelas VII, VIII, dan IX kira kira 80 an mbak, nanati coba liat di data saja biar lebih jelas. (CW.9.3)</p> <p>RA:</p> <p>“Dari kelas VII, VIII, dan IX itu disini ada 112 warga belajar mbak.” (CW.19.3)</p> <p>AG:</p> <p>“Kalau keseluruhan untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 112 warga belajar” (CW.20.3)</p> <p>ZU:</p> <p>“Untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 92 warga belajar mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW.18.3)</p>	<p>“Untuk Kesetaraan paket B sekitar 89 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.2.3)</p> <p>“Dari kelas VII, VIII, dan IX itu disini ada 112 warga belajar mbak.” (CW.19.3)</p> <p>“Untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 92 warga belajar mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW.18.3)</p>	<p>“Untuk Kesetaraan paket B sekitar 89 warga belajar yang terbagi menjadi kelas VII, VIII, dan IX.” (CW.2.3)</p> <p>“Dari kelas VII, VIII, dan IX itu disini ada 112 warga belajar mbak.” (CW.19.3)</p> <p>“Untuk tahun ajaran 2015-2016 ini sekitar 92 warga belajar mbak, itu dari kelas VII, VIII dan IX.” (CW.18.3)</p>	<p>Dari ketiga lembaga yang ada jumlah warga belajar yang ada berbedabeda namun jika dirata-rata kisaran antara 90an anak.</p>
6.	<p>Berapa Jumlah ruangan yang ada ?</p> <p>NN:</p> <p>“ 8 ruangan” (CW.1.4)</p> <p>IN:</p> <p>“ 7 ruangan” (CW.2.4)</p> <p>HW:</p>	<p>“8 ruangan” (CW.1.4)</p> <p>“Ada berapa ya mbak, kalau sama ruang tutor ini sekitar 7 ruangan mbak” (CW.9.4)</p> <p>“Kalau ruangan</p>	<p>“8 ruangan” (CW.1.4)</p> <p>“Ada berapa ya mbak, kalau sama ruang tutor ini sekitar 7 ruangan mbak” (CW.9.4)</p> <p>“Kalau ruangan pembelajaranya disini</p>	<p>Jumlah ruanagn antara 3 lembaga yang ada berbedabeda, PKBM permata ada 7 ruangan, PKBM</p>

	<p>“Ada berapa ya mbak, kalau sama ruang tutor ini sekitar 7 ruangan mbak” (CW.9.4)</p> <p>RA:</p> <p>“Kalau ruangan pembelajarannya disini masih barengan sama SD wates 4 mbak.” (CW.19.4)</p> <p>AG:</p> <p>“Disini masih pinjem mbak kalau untuk runag pembelajarannya” (CW.20.4)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kalau ruangan belajarnya hanya ada 4 kelas mbak, tapi kalau dengan PAUD dan kantor sekitar ada 8 ruangan.” (CW.18.4)</p>	<p>pembelajarannya disini masih barengan sama SD wates 4 mbak. ” (CW.19.4)</p>	<p>masih barengan sama SD wates 4 mbak. ” (CW.19.4)</p>	<p>kuncup mekar ada 8 Ruanagn dan PKBM upaya terampil ada 4 ruanagn dan yang lainnya masih pinjam dengan SD Wates 4.</p>
7.	<p>Apakah ada warga belajar yang tidak aktif namun namanya terdaftar?</p> <p>NN:</p> <p>“Ada, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 8 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 22 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 38 yang tidak aktif 10 orang.” (CW.1.5)</p> <p>IN:</p> <p>“Pasti ada mbak, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 7 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 14 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 35 yang tidak aktif 13 orang.” (CW.2.5)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau itu mah lagu lama ya mbak, jelas ada lah mbak, ditambah yang sekolah disini kan</p>	<p>“Ada, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 8 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 22 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 38 yang tidak aktif 10 orang.” (CW.1.5)</p> <p>“Banyak itu mbak, maklum ya mbak namanya juga sekolah non formal. Tapi biasanya akan aktif kalau udah mau mendekati ujian mid semester sama semesteran gitu mbak.” (CW.19.5)</p> <p>“Banyak mbak, apalagi kalau cuma pembelajaran biasa biasanya hanya sedikit yang hadir” (CW.20.5)</p>	<p>“Ada, dikelas VII dari jumlah warga belajar 20 orang yang tidak aktif sebanyak 8 orang, dikelas VIII dari jumlah warga belajar 34 yang tidak aktif sebanyak 22 orang, di kelas IX dari jumlah warga belajar 38 yang tidak aktif 10 orang.” (CW.1.5)</p> <p>“Banyak itu mbak, maklum ya mbak namanya juga sekolah non formal. Tapi biasanya akan aktif kalau udah mau mendekati ujian mid semester sama semesteran gitu mbak.” (CW.19.5)</p> <p>“Banyak mbak, apalagi kalau cuma pembelajaran biasa biasanya hanya sedikit yang hadir” (CW.20.5)</p>	<p>Dalam setiap pembelajaran yang ada biasanya memiliki kendala yaitu salah satunya keaktifan warga belajar yang baik.</p>

	<p>mayoritas sudah pada bekerja, jadi ya tidak dipungkiri banyak yang tidak aktif.” (CW.9.5)</p> <p>RA:</p> <p>“Banyak itu mbak, maklum ya mbak namanya juga sekolah non formal. Tapi biasanya akan aktif kalau udah mau mendekati ujian mid semester sama semesteran gitu mbak.” (CW.19.5)</p> <p>AG:</p> <p>“Banyak mbak, apalagi kalau cuma pembelajaran biasa biasanya hanya sedikit yang hadir” (CW.20.5)</p> <p>ZU:</p> <p>“Sebenarnya bukan seperti itu mbak, tapi kan ada mereka ada yang kerja ya, jadi biasanay jarang datang kalau pembelajaran normal.” (CW.18.5)</p>			
8.	<p>Apakah warga belajar dapat mengikuti ujian Nasional kesetaraan paket B?</p> <p>NN:</p> <p>Bisa mbak, asalkan semua persyaratan memenuhi” (CW.1.6)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau memenuhi persyaratan ujian selalu kami ikutkan mbak.” (CW.2.6)</p> <p>HW:</p> <p>“Hampir semuanya saya ikutkan mbak, itu saja biasanya saat ujian Nasional kadang juga tetep aja yang tidak datang dengan berbagai alasan, padahal sayang ya kan tinggal ujian saja. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya sendiri yang tidak mau, kita sebagai pengelola ya hanya</p>	<p>“Hampir semua warga belajar mengikuti mbak, untuk ujian kesetaraan kalau sayarat kehadiran memenuhi.” (CW.3.2)</p> <p>“Hampir semuanya saya ikutkan mbak, itu saja biasanya saat ujian Nasional kadang juga tetep aja yang tidak datang dengan berbagai alasan, padahal sayang ya kan tinggal ujian saja. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya sendiri yang tidak mau, kita sebagai pengelola ya hanya bisa mengarahkan saja” (CW.9.6)</p> <p>“Kalau daftar hadir 70 persen terpenuhi, bisa</p>	<p>“Hampir semua warga belajar mengikuti mbak, untuk ujian kesetaraan kalau sayarat kehadiran memenuhi.” (CW.3.2)</p> <p>“Hampir semuanya saya ikutkan mbak, itu saja biasanya saat ujian Nasional kadang juga tetep aja yang tidak datang dengan berbagai alasan, padahal sayang ya kan tinggal ujian saja. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya sendiri yang tidak mau, kita sebagai pengelola ya hanya bisa mengarahkan saja” (CW.9.6)</p> <p>“Kalau daftar hadir 70 persen terpenuhi, bisa mengikuti ujian</p>	<p>Semua warga belajar paket B mengikuti ujian Nasional dengan persyaratan yang sudah ada dipenuhi terlebih dahulu.</p>

	<p>bisa mengarahkan saja” (CW.9.6)</p> <p>RA: “Ya harus to mbak. Semua syarat ok kita bisa mbak, tapi kalau syarat aja masih kurang-kurang ya biasanya suruh melengkapi dulu.” (CW.19.6)</p> <p>AG: “Diikutkan semua mbak, karena kan masih usia wajib belajar juga to.” (CW.20.6)</p> <p>ZU: “Bisa mbak, asalkan kehadiran harus 70% dari jumlah keseluruhan.” (CW.18.6)</p> <p>KS: “Hampir semua warga belajar mengikuti mbak, untuk ujian kesetaraan kalau sayarat kehadiran memenuhi.” (CW.3.2)</p> <p>MB: “Kalau daftar hadir 70 persen terpenuhi, bisa mengikuti ujian nasional mbak. ” (CW.12.2)</p> <p>JK: “Semua bisa mbak, kalau yang mau ” (CW.13.2)</p> <p>ND: “Syarat terpenuhi semua warga belajar bisa ikut ujian mbak. Taopi kalau ada yang enggak lengkap biasanya diikutkan tahun depan.” (CW.14.2)</p> <p>KL: “Dapat mbak, syaratnya terpenuhi biasanya kami ikutkan semua.” (CW.15.2)</p> <p>IK: “Bisa mbak, asalkan memenuhi persyaratan kaya kehadiran dan yang lainnya.” (CW.16.2)</p>	<p>mengikuti ujian nasional mbak. ” (CW.12.2)</p>	<p>nasional mbak. ” (CW.12.2)</p>	
9.	Berapa prosentase warga	“Menurut data tahun	“Menurut data tahun	Bisa dilihat dari

	<p>belajar yang memasuki dunia kerja?</p> <p>NN:</p> <p>“60 persen dari 40 warga belajar masuk dunia kerja mbak, soalnya banyak dari warga belajar Paket B yang sudah disambi kerja.” (CW. 1.9)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau dilihat dari jumlah warga belajar tahun lalu sekitar 75 persen dari 38 anak memasuki dunia kerja mbak, soalnya kan memeng sebagian dari mereka sudah bekerja sebelumnya.” (CW. 2.9)</p> <p>HW:</p> <p>“Nanti bisa dilihat dari data saja ya mbak, takut salah kalau masalah prosentase. Nanti saya kasih data tahun lalu, bisa dilihat sisitu.” (CW. 9.9)</p> <p>RA:</p> <p>“Dilihat dari tahan lalu ya mbak jumlahnya itu ada 30 anak dari jumlah totalnya 45 anak.” (CW. 19.9)</p> <p>AG:</p> <p>“Hampir semuanya masuk dunia kerja mbak, soalnya biasanya mereka sebelum masuk sini udah bekerja juga.” (CW. 20.9)</p> <p>ZU:</p> <p>“Menurut data tahun lalu ya mbak itu ada banyak sekali yang masuk dunia kerja dibandingkan dunia pendidikan selanjutnya.” (CW.18.9)</p>	<p>lalu ya mbak itu ada banyak sekali yang masuk dunia kerja dibandingkan dunia pendidikan selanjutnya.” (CW.18.9)</p> <p>“60 persen dari 40 warga belajar masuk dunia kerja mbak, soalnya banyak dari warga belajar Paket B yang sudah disambi kerja.” (CW. 1.9)</p> <p>“Dilihat dari tahan lalu ya mbak jumlahnya itu ada 30 anak dari jumlah totalnya 45 anak.” (CW. 19.9)</p>	<p>lalu ya mbak itu ada banyak sekali yang masuk dunia kerja dibandingkan dunia pendidikan selanjutnya.” (CW.18.9)</p> <p>“60 persen dari 40 warga belajar masuk dunia kerja mbak, soalnya banyak dari warga belajar Paket B yang sudah disambi kerja.” (CW. 1.9)</p> <p>“Dilihat dari tahan lalu ya mbak jumlahnya itu ada 30 anak dari jumlah totalnya 45 anak.” (CW. 19.9)</p>	<p>data bahwa warga belajar banyak yang masuk kedunia kerja dibandingkan dengan melanjutkan pada pendidikan selanjutnya.</p>
10.	<p>Berapa prosentase warga belajar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?</p> <p>NN:</p> <p>“20 persen mbak dari 40 jumlah warga belajar, dan</p>	<p>“Dari 38 siswa tahun lalu hanya 10 persen saja mbak, itu saja dengan berbagai bujukan sayang sudah saya lakukan.” (CW.2.10)</p>	<p>“Dari 38 siswa tahun lalu hanya 10 persen saja mbak, itu saja dengan berbagai bujukan sayang sudah saya lakukan.” (CW.2.10)</p>	<p>Jumlah dari data yang ada jumlah warga belajar yang ada sangat sedikit sekali.</p>

	<p>siswanya biasanya sudah menikah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mbak.” (CW.1.10)</p> <p>IN:</p> <p>“Dari 38 siswa tahun lalu hanya 10 persen saja mbak, itu saja dengan berbagai bujukan sayang sudah saya lakukan.” (CW.2.10)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kalau untuk tahun ini yang saya tahu itu ada 4 mbak, di MAN magelang, MUTUAL purworejo, Paket C di sini ada 2 mbak.” (CW.9.10)</p> <p>RA:</p> <p>“Yang masuk data saya itu ada 4 anak saja mbak, soalnya kan biasanya jarang juga yang konfirmasi kalau sudah lulus mbak.” (CW.19.10)</p> <p>AG:</p> <p>“Kalau yang laporan ya mbak itu Cuma ada 4 warga belajar saj mbak.” (CW.20.10)</p> <p>ZU:</p> <p>“Tahun kemarin itu yang masuk data di PKBM cuma ada 4 orang kalau enggak salah mbak, itu yang lapor mbak.” (CW.18.10)</p>	<p>“Yang masuk data saya itu ada 4 anak saja mbak, soalnya kan biasanya jarang juga yang konfirmasi kalau sudah lulus mbak.” (CW.19.10)</p> <p>“Tahun kemarin itu yang masuk data di PKBM cuma ada 4 orang kalau enggak salah mbak, itu yang lapor mbak.” (CW.18.10)</p>		
11.	<p>Apakah Dinas menyediakan modul pembelajaran?</p> <p>SH:</p> <p>“Kalau dari dinas pendidikan sendiri tidak ada mbak, karena keterbatasan anggaran.” (CW. 5.3)</p> <p>MH:</p> <p>“Dinas tidak ada anggaran mbak kalau untuk pengadaan modul, biasanya</p>	<p>Dinas tidak ada anggaran mbak kalau untuk pengadaan modul, biasanya itu dari pemerintah pusat, dan dinas kota hanya sebagai distributor ke PKBM saja” (CW.10.3)</p>	<p>Dinas tidak ada anggaran mbak kalau untuk pengadaan modul, biasanya itu dari pemerintah pusat, dan dinas kota hanya sebagai distributor ke PKBM saja” (CW.10.3)</p>	<p>Dinas pendidikan kotmagelang tidak ada anggrn untuk penyediaan modul belajar, Biasanya penyediaan biasanya dari pemerintah pusat.</p>



	itu dari pemerintah pusat, dan dinas kota hanya sebagai distributor ke PKBM saja” (CW.10.3)			
12.	<p>Apakah Dinas Pendidikan menyediakan Alat-Alat Laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran?</p> <p>SH: “Tidak ada anggaran mbak untuk pengadaan alat dan yang lainnya” (CW.5.4)</p> <p>MH: “Apalagi alat-alat laboratorium, semua itu biasanya pemerintah pusat yang ada anggaran mbak” (CW.10.4)</p>	“Tidak ada anggaran mbak untuk pengadaan alat dan yang lainnya” (CW.5.4)	“Tidak ada anggaran mbak untuk pengadaan alat dan yang lainnya” (CW.5.4)	Tidak ada anggaran untuk dari dinas pendidikan.
13.	<p>Apakah pihak PKBM menyediakan modul untuk proses pembelajaran?</p> <p>SA: “Menyediakan mbak, biasanya ada yang dibagikan ada yang mengambil di TBM.” (CW.4.1)</p> <p>FO: “Ada mbak, biasanya setiap semester kita dibagikan modul kok” (CW.6.1)</p> <p>SW: “Ada mbak, itu digudang banyak sekali” (CW.7.1)</p> <p>OW: “Sebenarnya ada mbak, tapi saya enggak ambil soalnya males mbawanya, berat” (CW.8.1)</p> <p>RH: “Ada mbak, biasanya dibagikan saat awal pembelajaran itu lho, pas pertama kali masuk” (CW.11.1)</p> <p>TT: “Menyediakan mbak, kalau mau dibawa pulang bukunya tinggal bilang saja</p>	<p>“Ada mbak, biasanya dibagikan saat awal pembelajaran itu lho, pas pertama kali masuk” (CW.11.1)</p> <p>“Ada mbak, biasanya setiap semester kita dibagikan modul kok” (CW.6.1)</p>	<p>“Ada mbak, biasanya dibagikan saat awal pembelajaran itu lho, pas pertama kali masuk” (CW.11.1)</p> <p>“Ada mbak, biasanya setiap semester kita dibagikan modul kok” (CW.6.1)</p>	Pasti disediakan mbak, namun itu kan diselenggarakan oleh lembaga masing masing.

	sama pengelolaanya kok.”(CW.17.1)			
14.	<p>Apakah warga belajar mendapatkan semua modul?</p> <p>SA: “Seharusnya mendapatkan mbak, tapi kadang ada warga belajar yang tidak mau membawa modulnya.” (CW.4.2.)</p> <p>FO: “Kalau hadir pas pembagian dapat mbak, kalau yang enggak hadir biasanya bisa ngambil tapi nemui pengelola gitu”(CW.6.2.)</p> <p>SW: “Kalau mau ngambil digudang semua warga belajar dapat kok mbak, soalnya banyak sekali, tapi kan banyak warga belajar yang enggak mau”(CW.7.2.)</p> <p>OW: “Kalau enggak ambil ya enggak dapat mbak, kan biasanya pembagian cuma pas masuk pembelajaran aja”(CW.8.2.)</p> <p>RH: “Ya kalau yang pas hari itu masuk ya dapat mbak, kalau yang enggak masuk bisa ambil di pengelola biasanya”(CW.11.2.)</p> <p>TT: “Biasanya yang mau aja mbak yang dapat, soalnya kadang juga ada yang udah diberikan sama pengelola atau tutor, kadang palah ditinggal gitu aja dikelas, ndak dibawa pulang”(CW.17.2.)</p>	<p>“Seharusnya mendapatkan mbak, tapi kadang ada warga belajar yang tidak mau membawa modulnya.” (CW.4.2.)</p> <p>“Biasanya yang mau aja mbak yang dapat, soalnya kadang juga ada yang udah diberikan sama pengelola atau tutor, kadang palah ditinggal gitu aja dikelas, ndak dibawa pulang”(CW.17.2.)</p> <p>“Kalau enggak ambil ya enggak dapat mbak, kan biasanya pembagian cuma pas masuk pembelajaran aja”(CW.8.2.)</p>	<p>“Seharusnya mendapatkan mbak, tapi kadang ada warga belajar yang tidak mau membawa modulnya.” (CW.4.2.)</p> <p>“Biasanya yang mau aja mbak yang dapat, soalnya kadang juga ada yang udah diberikan sama pengelola atau tutor, kadang palah ditinggal gitu aja dikelas, ndak dibawa pulang”(CW.17.2.)</p> <p>“Kalau enggak ambil ya enggak dapat mbak, kan biasanya pembagian cuma pas masuk pembelajaran aja”(CW.8.2.)</p>	<p>Seharusnya mendapat semua mbak, tapi terkadang warga belajar juga tidak berminat.</p>
15.	Apakah ada media yang digunakan selama proses	“Jarang mbak, paling paling cuma modul	“Jarang mbak, paling paling cuma modul	Kurangnya media

<p>pembelajaran? SA: “Jarang mbak, paling paling cuma modul kalau enggak ya LCD itu saja biasanya kalau pertemuan yang banyak atau pelatihan saja kok mbak,” (CW.4.3.) FO: “Engak ada mbak, paling pake buku aja kok para tutor njelasinya” (CW.6.3.) SW: “Tidak ada mbak, biasanya tutor hanya menggunakan modul kalau enggak paling cuma foto kapian aja” (CW.7.3.) OW: “Media pembelajaran kalau sama tutor enggak ada mbak, paling kalau pas ada pelatihan itu paling aja cuma pake LCD” (CW.8.3.) RH: “Ngajarnya biasanya cuma pake buku kok mbak” (CW.11.3.) TT: “Kalau media pembelajaran, paling cuma buku mbak yang sering dipake, kalau hanya jarang kok kalau disini” (CW.17.3.) NN: “Biasanya tergantung dengan tutor sih mbak, kadang ada yang menggunakan kadang juga hanya menggunakan modul saja. (CW. 1.19) IN: “Kalau disini pembelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan LCD atau modul pembelajaran yang ada di</p>	<p>kalau enggak ya LCD itu saja biasanya kalau pertemuan yang banyak atau pelatihan saja kok mbak,” (CW.4.3.) “Media pembelajaran kalau sama tutor enggak ada mbak, paling kalau pas ada pelatihan itu paling aja cuma pake LCD” (CW.8.3.) “Media pembelajaran jarang menggunakan mbak, meskipun ada, soalnya terbatas juga dengan waktu dan pemahaman dari setiap tutor juga berbeda kan mbak, beda kalau sekolah formal, waktunya kan jelas dan tertata dengan rapi. ” (CW.12.8) “Kalau disini pembelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan LCD atau modul pembelajaran yang ada di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p>	<p>kalau enggak ya LCD itu saja biasanya kalau pertemuan yang banyak atau pelatihan saja kok mbak,” (CW.4.3.) “Media pembelajaran kalau sama tutor enggak ada mbak, paling kalau pas ada pelatihan itu paling aja cuma pake LCD” (CW.8.3.) “Media pembelajaran jarang menggunakan mbak, meskipun ada, soalnya terbatas juga dengan waktu dan pemahaman dari setiap tutor juga berbeda kan mbak, beda kalau sekolah formal, waktunya kan jelas dan tertata dengan rapi. ” (CW.12.8) “Kalau disini pembelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan LCD atau modul pembelajaran yang ada di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p>	<p>pembelajaran yang disediakan oleh pengelola mengakibatkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang seadanya.</p>
---	--	--	---

	<p>PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p> <p>HW:</p> <p>“Sebagai pengelola, kita kan hanya memberikan dukungan media pembelajarannya saja, tapi kan kalau dalam proses pembelajaran semua kan diserahkan sama tutor langsung selaku pemegang kelas to mbak. ” (CW. 9.19)</p> <p>RA:</p> <p>“Media pembelajaran kita seringnya pinjam mbak, soalnya kita kan juga tempatnya barenagn sama SD Wates 4 juga to.” (CW.19.19)</p> <p>AG:</p> <p>“Kalau dari PKBM cuma pake modul aja mbak.” (CW.20.19)</p> <p>ZU:</p> <p>“Media pemebelajaran yang digunakan paling yang ada hanya modul mbak.” (CW.18.19)</p> <p>KS:</p> <p>“Karena saya mengajar bahasa indonesia, saya tidak terlalu banyak media pembelajaran mbak, dan itupun media pemebelajaran saya disini juga tidak ada.” (CW. 3.8)</p> <p>MB:</p> <p>“Media pembelajaran jarang menggunakan mbak, meskipun ada, soalnya terbatas juga dengan waktu dan pemahaman dari setiap tutor juga berbeda kan mbak, beda kalau sekolah formal, waktunya kan jelas dan tertata dengan rapi. ” (CW.12.8)</p> <p>JK:</p> <p>“Media pembelajaran disini kurang mbak, jadi ya kalau mau pake media</p>			
--	---	--	--	--

	<p>pembelajaran biasanya buat sendiri.” (CW.13.8)</p> <p>ND:</p> <p>“Terkadang menggunakan mbak, tapi ya seadanya yang dibisa oleh para tentor.” (CW.14.8)</p> <p>KL:</p> <p>“Ngomongin media pembelajaran disini pinjam mbak kalau mau pake.” (CW.15.8)</p> <p>IK:</p> <p>“Media pembelajarana masih sangat menggunakan metode modul mbak.” (CW.16.8)</p>			
16.	<p>Apakah tutor menguasai media pembelajaran yang ada?</p> <p>NN:</p> <p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>IN:</p> <p>“Ada 2 tutor yang kurang mahir dalam menggunakan media pembelajaran yang moderen mbak, karena memang sudah tua.” (CW.2.21)</p> <p>HW:</p> <p>“Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran.”(CW.9.21)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.”CW.19.21)</p> <p>AG:</p> <p>“Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya</p>	<p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>“Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.” CW.19.21)</p> <p>“Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran.”(CW.9.21)</p>	<p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>“Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.”CW.19.21)</p> <p>“Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran.”(CW.9.21)</p>	<p>Kurangnya media pembelajaran dan seringkali pembelajaran menggunakan media membuat banyak tutor juga mengalami kesulitan dengan cara menguasai media pembelajaran yang ada, meskipun sudah diadakan pelatihan.</p>

	mbak.”CW.20.21) ZU: “Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.”CW.20.21)			
17.	Apakah ada pelatihan khusus tentang media pembelajaran? NN: “Ada mbak, biasanya P2PNFI Semarang yang mengadakan secara berkala.” (CW.1.22) IN: “Ada mbak, setiap setengah tahun sekali biasanya PKBM selalu mengirim tutor untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh P2PNFI di Semarang.” (CW.2.22) HW: “Tutor sering saya ikutkan di pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran mbak, yang ngadaain dari dinas pendidikan kota maupun dari yang P2PNFI Semarang.”(CW.9.22) RA: “Biasanya tiap semester ada mbak dari P2PNFI Semarang,”CW.19.22) AG: “Sebenarnya ada mbak, biasanya dari P2PNFI Semarang.”CW.20.22) ZU: “Biasanya ada mbak, tapi yang ngadain bukan dinas pendidikan tapi P2PNFI Semarang.”(CW.18.22) KS: “Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4) MB: “Pembekalan biasanya ada mbak setiap semester itu	“Ada mbak, biasanya P2PNFI Semarang yang mengadakan secara berkala.” (CW.1.22) “Biasanya ada mbak, tapi yang ngadain bukan dinas pendidikan tapi P2PNFI Semarang.” (CW.18.22) “Tutor sering saya ikutkan di pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran mbak, yang ngadaain dari dinas pendidikan kota maupun dari yang P2PNFI Semarang.”(CW.9.22)	“Ada mbak, biasanya P2PNFI Semarang yang mengadakan secara berkala.” (CW.1.22) “Biasanya ada mbak, tapi yang ngadain bukan dinas pendidikan tapi P2PNFI Semarang.” (CW.18.22) “Tutor sering saya ikutkan di pelatihan-pelatihan tentang media pembelajaran mbak, yang ngadaain dari dinas pendidikan kota maupun dari yang P2PNFI Semarang.”(CW.9.22) )	Pelatihan mengenai pembelajaran biasanya diadakan setiap semester sekali oleh P2PNFI yang ada di Semarang.

	<p>ngirim ke P2PNFI disemarang mbak, biasanya juga digilir juga mata pelajaran atau pelatihanya.” (CW.12.4)</p> <p>JK:</p> <p>“Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. ” (CW.13.4)</p> <p>ND:</p> <p>“Kalau dari dinas untuk tutor sendiri ngak ada mbak. ” (CW.14.4)</p> <p>KL:</p> <p>“Kalau dari Dinas pendidikan jarang mbak ada pelatihan.” (CW.15.4)</p> <p>IK:</p> <p>“Pembekalan itu biasanya ada mbak, persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)</p>			
18.	<p>Apakah warga belajar memahami pembelajaran selama penggunaan media pembelajaran tersebut?</p> <p>SA:</p> <p>“Kalau tutor-tutor yang sudah tua biasanya cuma pake modul mbak, tapi kalau pake media pembelajaran biasanay lebih jelas” (CW.4.4)</p> <p>FO:</p> <p>“Faham mbak, kan cuma pake modul aja” (CW.6.4)</p> <p>SW:</p> <p>“Ya faham mbak soalnya kalau modul kan bisa sambil dibaca dirumah jadi lebih enak” (CW.7.4)</p> <p>OW:</p> <p>“Kalau pas pake LCD ya jelas juga kok, kita juga enggak cepet bosen pas</p>	<p>“Ya faham mbak soalnya kalau modul kan bisa sambil dibaca dirumah jadi lebih enak” (CW.7.4)</p> <p>“Kalau pas pake LCD ya jelas juga kok, kita juga enggak cepet bosen pas kayak ceramah aja” (CW.8.4)</p> <p>“Paham mbak, wong tutornya jelasinya sampe kita mudeng kok” (CW.17.4)</p>	<p>“Ya faham mbak soalnya kalau modul kan bisa sambil dibaca dirumah jadi lebih enak” (CW.7.4)</p> <p>“Kalau pas pake LCD ya jelas juga kok, kita juga enggak cepet bosen pas kayak ceramah aja” (CW.8.4)</p> <p>“Paham mbak, wong tutornya jelasinya sampe kita mudeng kok” (CW.17.4)</p>	<p>Warga belajar memahami setiap pembelajaran dari tutor yang karena menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.</p>

	<p>kayak ceramah aja” (CW.8.4)</p> <p>RH: “Paham kok mbak, kaau pake buku mah enak tinggal nunggu ceramah aja dari tutornya” (CW.11.4)</p> <p>TT: “Paham mbak, wong tutornya jelasinya sampe kita mudeng kok” (CW.17.4)</p>			
19.	<p>Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar?</p> <p>SA: “Sesuai mbak kan biasanya pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan dahulu, seperti apa media yang akan digunakan dalam pertemuan selanjutnya.” (CW.4.5)</p> <p>FO: “Sesuai mbak, kan yang dibutuhkan warga belajar kan biasanya penjelasan saja dari modul yang ada” (CW.6.5)</p> <p>SW: “Sudah mbak” (CW.7.5)</p> <p>OW: “Sudah kali ya mbak, soalnya ya jelas kok njelasinya” (CW.8.5)</p> <p>RH: “Ya sesuai lah mbak” (CW.11.5)</p> <p>TT: “Udah kali ya mbak, soalnya aku nya juga ngak terlalu mudeng masalah begituan” (CW.17.5)</p> <p>SH: “Media pembelajaran yang sudah diajarkan biasanya yang dibutuhkan oleh warga belajar, namun kalau pengimplementasian kan</p>	<p>“Sesuai mbak kan biasanya pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan dahulu, seperti apa media yang akan digunakan dalam pertemuan selanjutnya.” (CW.4.5)</p> <p>“Media pembelajaran yang sudah diajarkan biasanya yang dibutuhkan oleh warga belajar, namun kalau pengimplementasian kan tergantung dengan tutornya mbak.” (CW. 5.10)</p> <p>“Kalau disini pemebelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasnaya menggunakan LCD atau modul pemebelajaran yang da di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p> <p>“Biasnaya sudah disesuaikan mbak dari kurikulum yang ada, kita sebagai tutor hanya menyampaikan saja.” (CW. 3.9)</p>	<p>“Sesuai mbak kan biasanya pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan dahulu, seperti apa media yang akan digunakan dalam pertemuan selanjutnya.” (CW.4.5)</p> <p>“Media pembelajaran yang sudah diajarkan biasanya yang dibutuhkan oleh warga belajar, namun kalau pengimplementasian kan tergantung dengan tutornya mbak.” (CW. 5.10)</p> <p>“Kalau disini pemebelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasnaya menggunakan LCD atau modul pemebelajaran yang da di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p> <p>“Biasnaya sudah disesuaikan mbak dari kurikulum yang ada, kita sebagai tutor hanya menyampaikan saja.” (CW. 3.9)</p>	<p>Sudah disesuaikan dengan kebutuhan karena kurikulum juga sudah disesuaikan dengan maslah yang akan dihadapi dalam duni akerja maupun dalam dunia pendidikan selanjutnya.</p>



<p>tergantung dengan tutornya mbak.” (CW. 5.10)</p> <p>MH:</p> <p>“Sudah disesuaikan mbak, tapi kalau penerapan ya kurang tau di setiap PKBMnya bagaimana” (CW.10.10)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasanya tergantung dengan tutor sih mbak, kadang ada yang menggunakan kadang juga hanya menggunakan modul saja. (CW. 1.19)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau disini pembelajaran biasanya banyak yang menggunakan media pembelajaran mbak, paling tidak biasanya menggunakan LCD atau modul pembelajaran yang ada di PKBM mbak.” (CW. 2.19)</p> <p>HW:</p> <p>“Sebagai pengelola, kita kan hanya memberikan dukungan media pembelajarannya saja, tapi kan kalau dalam proses pembelajaran semua kan diserahkan sama tutor langsung selaku pemegang kelas to mbak. ” (CW. 9.19)</p> <p>RA:</p> <p>“Media pembelajaran kita seringkali pinjam mbak, soalnya kita kan juga tempatnya bareng sama SD Wates 4 juga to.” (CW.19.19)</p> <p>AG:</p> <p>“Kalau dari PKBM cuma pake modul aja mbak.” (CW.20.19)</p> <p>ZU:</p> <p>“Media pembelajaran yang digunakan paling yang ada hanya modul mbak.”</p>			
---	--	--	--

	<p>(CW.18.19)</p> <p>KS:</p> <p>“Biasnaya sudah disesuaikan mbak dari kurikulum yang ada, kita sebagai tutor hanya menyampaikan saja.” (CW.3.9)</p> <p>MB:</p> <p>“Kalau dibilang sesuai sih sebenarnya sudah sesuai kok mbak, tapi karena tidak di gunakan dengan baik ya bagaimana ya.” (CW.12.9)</p> <p>JK:</p> <p>“Karena media saja masih kurang berarti kan banyak juga media yang kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk warga belajar.” (CW.13.9)</p> <p>ND:</p> <p>“Media ya kalau bisa disesuaikan mbak, soalnya kan tutor juga mengusahakan agar warga belajar juga berpartisipasi dan mudeng.” (CW.14.9)</p> <p>KL:</p> <p>“Belum mbak, la media saja masih pinjam to.” (CW.15.9)</p> <p>IK:</p> <p>“Belum mbak, media pembelajran masih kurang untuk mendukung proses belajar mengajar disini.” (CW.16.9)</p>			
20.	<p>Berapa pengelola disetiap lembaga yang ada?</p> <p>SH:</p> <p>“Disetiap PKBM biasanya yang terlapor di dinas pendidikan sekitar 7-8 orang.” (CW.5.6)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau pengelola lembaga yang aktif paling disetiap lembaga cuma 2 mbak tapi kalau di struktur</p>	<p>“Disetiap PKBM biasanya yang terlapor di dinas pendidikan sekitar 7-8 orang.” (CW.5.6)</p>	<p>“Disetiap PKBM biasanya yang terlapor di dinas pendidikan sekitar 7-8 orang.” (CW.5.6)</p>	<p>Menurut data yng ada dan terlapor di Dinas pendidikan kota Magelang adalah sebanyak 7 dan 8 orang disetiap lembaga.</p>

	orgamnisasi biasanya yang dicantumin ada banyak bisa sampe 8 orangan” (CW.10.6)			
21.	<p>Apakah tutor murni mengajar di PKBM saja? Apakah tutor murni mengajar di PKBM saja?</p> <p>NN:</p> <p>“Tidak lah mbak, biasanya diambil dari guru-guru yang mengajar di formal kok,.” (CW.1.12)</p> <p>IN:</p> <p>“Jelas tidak mbak, biasanya kita ambil dari pendidikan formal biar sesuai dengan mata pelajaran.” (CW.2.12)</p> <p>HW:</p> <p>“Semuanya palah dari pendidikan formal mbak, yang mengajar hanya disini itu kayaknya cuma 1 mbak” (CW.9.12)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya tidak lah mbak, kalau cuma disini saja enak cukup lah mbak untuk makan.” (CW.9.12)</p> <p>AG:</p> <p>“Tidak mbak. Biasnaya palah saya ngambilnya dari guru-guru pendidikan formal kok.” (CW.20.12)</p> <p>ZU:</p> <p>“Tidak ada mbak, ” (CW.18.12)</p>	<p>“Tidak lah mbak, biasanya diambil dari guru-guru yang mengajar di formal kok,.” (CW.1.12)</p> <p>“Jelas tidak mbak, biasanya kita ambil dari pendidikan formal biar sesuai dengan mata pelajaran.” (CW.2.12)</p> <p>“Tidak mbak. Biasnaya palah saya ngambilnya dari guru-guru pendidikan formal kok.” (CW.20.12)</p>	<p>“Tidak lah mbak, biasanya diambil dari guru-guru yang mengajar di formal kok,.” (CW.1.12)</p> <p>“Jelas tidak mbak, biasanya kita ambil dari pendidikan formal biar sesuai dengan mata pelajaran.” (CW.2.12)</p> <p>“Tidak mbak. Biasnaya palah saya ngambilnya dari guru-guru pendidikan formal kok.” (CW.20.12)</p>	Tutor PKBM hampir semuanya diambil dari pendidikan formal yang ada.
22.	<p>Apakah ada tutor yang mengajar di pendidikan formal?</p> <p>NN:</p> <p>“Hampir semua tutor mengajar di pendidikan formal mbak, dan biasanya di PKBM hanya untuk menambah waktu atau hanya berupa pelayanan sosial” (CW.1.13)</p> <p>IN:</p> <p>“Hanya 1 orang saja mbak</p>	<p>“Hampir semua tutor mengajar di pendidikan formal mbak, dan biasanya di PKBM hanya untuk menambah waktu atau hanya berupa pelayanan sosial” (CW.1.13)</p> <p>“Hanya 1 orang saja mbak yang hanya ngajar di sini saja, biasanya mereka juga</p>	<p>“Hampir semua tutor mengajar di pendidikan formal mbak, dan biasanya di PKBM hanya untuk menambah waktu atau hanya berupa pelayanan sosial” (CW.1.13)</p> <p>“Hanya 1 orang saja mbak yang hanya ngajar di sini saja, biasanya mereka juga</p>	Tutor yang ada di PKBM semuanya diambilkan dari pendidikan forma yang ada.

	<p>yang hanya ngajar di sini saja, biasanya mereka juga mengajar di pendidikan formal ” (CW.2.13)</p> <p>HW: “Ya itu mbak dari 14 tutor, 1 tutor berasal dari pendidikan formal semua” (CW.9.13)</p> <p>RA: “Semua tutor disini mengajar di pendidikan formal mbak.” (CW.19.13)</p> <p>AG: “Semuanya mbak” (CW.20.13)</p> <p>ZU: “Semua tutor dari pendidikan formal mbak.” (CW.18.13)</p>	<p>mengajar di pendidikan formal ” (CW.2.13)</p> <p>“Semua tutor disini mengajar di pendidikan formal mbak.” (CW.19.13)</p>	<p>mengajar di pendidikan formal ” (CW.2.13)</p> <p>“Semua tutor disini mengajar di pendidikan formal mbak.” (CW.19.13)</p>	
23.	<p>Berapakah tutor yang berasal dari pendidikan formal?</p> <p>NN: “Semuanya mbak dari 14 tutor semuanya dari pendidikan formal semua” (CW. 1. 15)</p> <p>IN: “13 orang ” (CW. 2. 15)</p> <p>HW: “13 tutor” (CW.9.15)</p> <p>RA: “Semua tutor mbak.” (CW.19.15)</p> <p>AG: “13 tutor semuanya mbak” (CW.20.15)</p> <p>ZU: “14 tutor mbak.” (CW.18.15)</p>	<p>“Semuanya mbak dari 14 tutor semuanya dari pendidikan formal semua” (CW. 1. 15)</p> <p>“Semua tutor mbak.” (CW.19.15)</p>	<p>“Semuanya mbak dari 14 tutor semuanya dari pendidikan formal semua” (CW. 1. 15)</p> <p>“Semua tutor mbak.” (CW.19.15)</p>	<p>Tutor yang ada di PKBM semuanya diambilkan dari pendidikan formal yang ada.</p>
24.	<p>Apakah ada kualifikasi tertentu untuk menjadi tutor di PKBM ini?</p> <p>NN: “Sebenarnya sih ada mbak, tapi ya bagaimana ya sekarang yang penting mau ngajar aja dan sesuai dengan mata pelajarannya.” (CW.1.16)</p> <p>“Ada lah mbak</p>	<p>“Sebenarnya sih ada mbak, tapi ya bagaimana ya sekarang yang penting mau ngajar aja dan sesuai dengan mata pelajarannya.” (CW.1.16)</p> <p>“Ada lah mbak</p>	<p>“Sebenarnya sih ada mbak, tapi ya bagaimana ya sekarang yang penting mau ngajar aja dan sesuai dengan mata pelajarannya.” (CW.1.16)</p> <p>“Ada lah mbak</p>	<p>Kualifikasi untuk tutor di setiap PKBM sebenarnya ada, namun bisa dibil ng hanya beberapa yang terpenuhi dengan baik.</p>

<p>(CW.1.16) IN: “Ada lah mbak pastinya, namun kalau harus sesuai dengan kualifikasi pasti pada ngak mau soalnya kan sukarela ya, jadi ya biasanya yang mau aja jadi tutor disini.” (CW.2.16) HW: “Kalau berbicara kualifikasi untuk tutor untuk mengajar disini yang ada nantinya pada ngak mau ngajar disini mbak, soalnya disini tidak dibayar, kalau tuntutan yang diajukan banyak ya bagaimana gitu kan ya mbak”(CW.9.16) RA: “Kualifikasi untuk semua tutor ada mbak, hahah yang penting pendidikan sesuai dengan yang diajar dan yang penting lagi bisa ngajar to mbak.”(CW.19.16) AG: “Tidak mbak. Yang penting bisa ngajar aja mbak.”(CW.20.16) ZU: “Tidak ada mbak, dulu berbekal yang mau mengajar disini aja mbak, soalnya gaji juga kita tidak ada awalnya.”(CW.18.16) KS: “Kalau saya dulu ngak ada mbak, langsung ngajar aja kok mbak.” (CW. 3.5) MB: “Kalau dulu saya enggak ada mbak pas masuk disini, tinggal masuk aja, yang penting mau ngajar dan bisa ngajar.” (CW.12.5) JK: “Selama saya mengajar disini tidak ada kok mbak,</p>	<p>pastinya, namun kalau harus sesuai dengan kualifikasi pasti pada ngak mau soalnya kan sukarela ya, jadi ya biasanya yang mau aja jadi tutor disini.” (CW.2.16) “Saat perekrutan awal ada mbak, tapi dari beberapa kualifikasi biasanya hanya beberapa yang terpenuhi.” (CW.15.5) “Kebanyakan dari semua PKBM tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi tutor, yang penting mau mengajar saja” (CW. 5.8)</p>	<p>pastinya, namun kalau harus sesuai dengan kualifikasi pasti pada ngak mau soalnya kan sukarela ya, jadi ya biasanya yang mau aja jadi tutor disini.” (CW.2.16) “Saat perekrutan awal ada mbak, tapi dari beberapa kualifikasi biasanya hanya beberapa yang terpenuhi.” (CW.15.5) “Kebanyakan dari semua PKBM tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi tutor, yang penting mau mengajar saja” (CW. 5.8)</p>	
---	---	---	--

	<p>biasanya yang penting bisa ngajar.” (CW.13.5)</p> <p>ND:</p> <p>“Enggak mbak, pertama saya disini sampai sekarang juga syaratnya masih sama. Yang penting bisa ngajar gitu aja.” (CW.14.5)</p> <p>KL:</p> <p>“Saat perekrutan awal ada mbak, tapi dari beberapa kualifikasi biasanya hanya beberapa yang terpenuhi.” (CW.15.5)</p> <p>IK:</p> <p>“Tidak mbak, waktu saya Cuma yang penting mata pelajaran sesuai denga bidang pendidikan dan yang penting bisa mengajar saja.” (CW.16.5)</p> <p>SH:</p> <p>“Kebanyakan dari semua PKBM tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi tutor, yang penting mau mengajar saja” (CW. 5.8)</p> <p>MH:</p> <p>“Tidak mbak, biasanya PKBM merekrut untuk jadi tutor yang penting kan mau ngajar, bukan berasal dari kualifikasi yang ada ” (CW. 10.8)</p>			
25.	<p>Apakah tutor mendapat pelatihan dan pembekalan dari Dinas Pendidikan?</p> <p>KS:</p> <p>“Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)</p> <p>MB:</p> <p>“Pembekalan biasanya ada mbak setiap semester itu ngirim ke P2PNFI disemarang mbak, biasanya juga digilir juga mata pelajaran atau pelatihanya.” (CW.12.4)</p>	<p>“Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)</p> <p>“Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. ” (CW.13.4)</p> <p>“Pembekalan itu biasanya ada mbak,</p>	<p>“Pelatihan, sering mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)</p> <p>“Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak. ” (CW.13.4)</p> <p>“Pembekalan itu biasanya ada mbak,</p>	<p>Pelatihan dan pemebekalan biasanya dari P2PNFI di Semarang, itu diadakan 2 kali dalam setahun. Sedangkan dinas pendidikan jarang mengadakan pelatihan.</p>

	<p>JK: “Setiap semester ada mbak, tapi itu biasanya tiap semester beda beda permintaanya, kadang guru matematika kadang pengelola gitu mbak.” (CW.13.4)</p> <p>ND: “Kalau dari dinas untuk tutor sendiri ngak ada mbak.” (CW.14.4)</p> <p>KL: “Kalau dari Dinas pendidikan jarang mbak ada pelatihan.” (CW.15.4)</p> <p>IK: “Pembekalan itu biasanya ada mbak, persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)</p>	<p>persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)</p>	<p>persemester mbak diadakan oleh P2PNFI Semarang.” (CW.16.4)</p>	
26.	<p>Bagaimana dukungan pemerintah dalam menunjang kinerja tutor?</p> <p>NN: “Biasanya dukungan hanya berbentuk pelatihan atau diklat saja mbak, sedangkan dari segi keuangan juga masih kurang.” (CW. 1.17)</p> <p>IN: “Kalau dari pemerintah mungkin bisa dibilang ngak ada kali ya mbak, yang banyak itu dari P2PNFI biasanya mengadakan banyak pelatihan untuk tutor.” (CW. 2.17)</p> <p>HW: “Itu kali ya mbak sering ada pelatihan diklat, pameran yang diadakan pemerintah, itu juga sangat membantu kita sebagai tutor” (CW.9.17)</p> <p>RA: “Dukungan dari pemerintah mah kurang mbak, apalagi masalah gaji. Sanagt kurang</p>	<p>“Biasanya dukungan hanya berbentuk pelatihan atau diklat saja mbak, sedangkan dari segi keuangan juga masih kurang.” (CW. 1.17)</p> <p>“Itu kali ya mbak sering ada pelatihan diklat, pameran yang diadakan pemerintah, itu juga sangat membantu kita sebagai tutor” (CW.9.17)</p> <p>“Aduh mbak, Dukungan pemerintah masih kurang mbak, kita saja untuk mengaji tutor saja masih kurang-kurang kok.” (CW..17.18)</p>	<p>“Biasanya dukungan hanya berbentuk pelatihan atau diklat saja mbak, sedangkan dari segi keuangan juga masih kurang.” (CW. 1.17)</p> <p>“Pelatihan, serring mbak kalau dari P2PNFI paling tidak persemester selalu ada pembekalan.” (CW.3.4)</p> <p>“Aduh mbak, Dukungan pemerintah masih kurang mbak, kita saja untuk mengaji tutor saja masih kurang-kurang kok.” (CW..17.18)</p>	<p>Dukungan dari pemerintah sangat kurang sekali dalam menunjang kinerja tutor maupun dalam menunjang pembelajaran.</p>

	<p>sekali bagi tutor.” (CW.19.17)</p> <p>AG:</p> <p>“Sedikit mbak kalau dukungan dari pemerintah. Gaji saja masih kurang dari kata cukup.” (CW.20.17)</p> <p>ZU:</p> <p>“Aduh mbak, Dukungan pemerintah masih kurang mbak, kita saja untuk mengaji tutor saja masih kurang-kurang kok.” (CW..17.18)</p>			
27.	<p>Apakah jumlah tutor terpenuhi?</p> <p>SH:</p> <p>“Terpenuhi mbak, bisa dicek langsung disetiap PKBM yang bersangkutan”(CW.5.7)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau tutor terpenuhi mbak sesuai dengan kelas dan mata pelajaran juga kok, kalau dilihat dilapangan seperti itu”(CW.10.7)</p> <p>NN:</p> <p>“Jelas sesuai dengan kebutuhan ya mbak, sesuai juga dengan latar pendidikan yang ada.” (CW. 1.14)</p> <p>IN:</p> <p>“Ada yang terpenuhi ada yang tidak mbak, dari 14 tutor yang ada ada 4 tutor yang tidak sesuai dengan mata pelajaran.” (CW. 2.14)</p> <p>HW:</p> <p>“Terpenuhi mbak dan disini termasuk yang sesuai dengan kebutuhan”(CW.9.14)</p> <p>RA:</p> <p>“Untuk paket B sudah terpenuhi mbak. Ditambah lagi kan ada juga tutor</p>	<p>“Terpenuhi mbak dan disini termasuk yang sesuai dengan kebutuhan” (CW.9.14)</p> <p>“Untuk paket B sudah terpenuhi mbak. Ditambah lagi kan ada juga tutor paket yang lain juga yang biasanya membantu juga. ”(CW.19.14)</p>	<p>“Terpenuhi mbak dan disini termasuk yang sesuai dengan kebutuhan” (CW.9.14)</p> <p>“Untuk paket B sudah terpenuhi mbak. Ditambah lagi kan ada juga tutor paket yang lain juga yang biasanya membantu juga. ”(CW.19.14)</p>	<p>Secara Kuantitatif tutor sudah terpenuhi dengan baik.</p>



	<p>paket yang lain juga yang biasanya membantu juga.”(CW.19.14)</p> <p>AG:</p> <p>“Sudah mbak. Sesuai juga dengan mata pelajarannya.”(CW.20.14)</p> <p>ZU:</p> <p>“Sudah mbak, sudah sesuai dengan mata pelajaran juga.”(CW.18.14)</p>			
28.	<p>Apakah tutor menguasai materi yang diajarkan?</p> <p>SA:</p> <p>“Menguasai kali ya mbak, soalnya saya juga ngak ngerti heheheh..” (CW.4.6)</p> <p>FO:</p> <p>“Hampir semua tutor menguasai mbak, soalnya saya juga mudeng kalau pas diajari” (CW.6.6)</p> <p>SW:</p> <p>“Bisa kok mbak soalnya menjelaskanya dengan jelas dan banyak yang mengerti termasuk saya.” (CW.7.6)</p> <p>OW:</p> <p>“Pastinya iya kali ya mbak. Soale yang dijelake saya juga mudeng kok” (CW.8.6)</p> <p>RH:</p> <p>“Ya pastinya menguasai lah mbak, kalau enggak kita pun ya ngak terlalu ngerti hahah” (CW.11.6)</p> <p>TT:</p> <p>“Itu iya mbak, biasanya materi kan dari modul aja kok” (CW.17.6)</p> <p>NN:</p> <p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>IN:</p> <p>“Ada 2 tutor yang kurang mahir dalam menggunakan media pemebelajaran yang</p>	<p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>“Ya pastinya menguasai lah mbak, kalau enggak kita pun ya ngak terlalu ngerti hahah” (CW.11.6)</p> <p>“Bisa kok mbak soalnya menjelaskanya dengan jelas dan banyak yang mengerti termasuk saya.” (CW.7.6)</p>	<p>“Ada yang menguasai ada yang tidak mbak, terkadang kan juga ada tutor yang sudah tua.” (CW.1.21)</p> <p>“Ya pastinya menguasai lah mbak, kalau enggak kita pun ya ngak terlalu ngerti hahah” (CW.11.6)</p> <p>“Bisa kok mbak soalnya menjelaskanya dengan jelas dan banyak yang mengerti termasuk saya.” (CW.7.6)</p>	<p>Penguasaan tutor mengenai pembelajaran sebenarnya sudah cukup, namun terkadang terkendala dengan usia sehingga metode pemebelajaran yang diterapkan kurang cocok dengan kebutuhan yang ada.</p>

	<p>moderen mbak, karena memang sudah tua.” (CW.2.21)</p> <p>HW:</p> <p>“Ya wajib lah mbak, kan dari pihak PKBM juga sudah sering mengikutsertakan tutor ke berbagai pelatihan tentang media pembelajaran.”(CW.9.21)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya kalau modul dan LCD biasanya pada bisa mbak. Tapi kalau media yang lain karena terkendala tidak ada media ya kurang menguasai ya mbak.”CW.19.21)</p> <p>AG:</p> <p>“Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.”CW.20.21)</p> <p>ZU:</p> <p>“Media belajar terbatas mbak, jadi ya kurang ya mbak.”CW.20.21)</p>			
29.	<p>Apakah tutor datang tepat waktu?</p> <p>SA:</p> <p>“Tepat waktu mbak mungkin satu atau dua tutor sja yng sering telat, katanya beliau juga ngajar di SMP formal, jadi biasanay waktu juga ditambah kok kalau beliau telat.” (CW.4.7)</p> <p>FO:</p> <p>“Kadang ada tutor yang sering telat mbak, jadinya waktunya kebuang banyak, tapi kan biasanya warga belajar palah suka” (CW.6.7)</p> <p>SW:</p> <p>“Tepat waktu mbak, malah yang sering telat itu warga belajarnya kok heheheh” (CW.7.7)</p> <p>OW:</p>	<p>“Tepat waktu mbak mungkin satu atau dua tutor sja yng sering telat, katanya beliau juga ngajar di SMP formal, jadi biasanay waktu juga ditambah kok kalau beliau telat.” (CW.4.7)</p> <p>“Tepat waktu mbak, malah yang sering telat itu warga belajarnya kok heheheh” (CW.7.7)</p> <p>“Palah seringnya warga belajarnya yang sering telat mbak.” (CW.8.7)</p>	<p>“Tepat waktu mbak mungkin satu atau dua tutor sja yng sering telat, katanya beliau juga ngajar di SMP formal, jadi biasanay waktu juga ditambah kok kalau beliau telat.” (CW.4.7)</p> <p>“Tepat waktu mbak, malah yang sering telat itu warga belajarnya kok heheheh” (CW.7.7)</p> <p>“Palah seringnya warga belajarnya yang sering telat mbak.” (CW.8.7)</p>	<p>Kedatangan tutor menjadi salah satu yang penting bagi setiap pembelajaran yang ada. Namun dalam hal ini terkadang tutor memiliki jam bentrok dengan pendidikan formal yang ada sehingga bisa saja telat.</p>

	<p>“Palah seringnya warga belajarnya yang sering telat mbak.” (CW.8.7)</p> <p>RH:</p> <p>“Tepat waktu sih mbak, palah yang sering telat itu kan warga belajarnya kok” (CW.11.7)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau disini iya mbak, kalau telat biasanya waktunya ditambah menyesuaikan sam tutor mbak” (CW.17.7)</p>			
30.	<p>Apakah diadakan evaluasi pembelajaran secara berkala dan terjadwal?</p> <p>SA:</p> <p>“Evaluasi pembelajaran itu kan dijadwal dari PKBM mbak, kalau yang dari tutor langsung jarang ada mbak.” (CW.4.9)</p> <p>FO:</p> <p>“Ada mbak, kan kalau yang berkala dan terjadwal biasanya langsung dari PKBM” (CW.6.9)</p> <p>SW:</p> <p>“Kalau yang berkala dan terjadwal biasanya mid semester dan semesteran mbak, itu kan sudah dijadwal oleh PKBM juga” (CW.7.9)</p> <p>OW:</p> <p>“Kalau yang dijdwal ada mbak tapi biasanya cuma mid semeser sama semesteran ja itu kok” (CW.8.9)</p> <p>RH:</p> <p>“Kalau dari PKBM ada mbak, itu lho mid semester sama semesteran itu aja, kalau yang lainnya mah enggak ada” (CW.11.9)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau yang terjadwal ngikuti dari PKBM ada</p>	<p>“Kalau yang berkala dan terjadwal biasanya mid semester dan semesteran mbak, itu kan sudah dijadwal oleh PKBM juga” (CW.7.9)</p> <p>“Kalau yang terjadwal ngikuti dari PKBM ada mbak, mid semester sama semesteran itu lho... yang biasanya berengan sama PKBM yang lain juga” (CW.17.9)</p> <p>“Kalau dari PKBM ada mbak, itu lho mid semester sama semesteran itu aja, kalau yang lainnya mah enggak ada” (CW.11.9)</p>	<p>“Kalau yang berkala dan terjadwal biasanya mid semester dan semesteran mbak, itu kan sudah dijadwal oleh PKBM juga” (CW.7.9)</p> <p>“Kalau yang terjadwal ngikuti dari PKBM ada mbak, mid semester sama semesteran itu lho... yang biasanya berengan sama PKBM yang lain juga” (CW.17.9)</p> <p>“Kalau dari PKBM ada mbak, itu lho mid semester sama semesteran itu aja, kalau yang lainnya mah enggak ada” (CW.11.9)</p>	<p>Evaluasi yang terjadwal biasanya mengikuti jadwal dari lembaga, yaitu Mid semester dan Semesteran saja.</p>

	mbak, mid semester sama semesteran itu lho... yang biasanya berengan sama PKBM yang lain juga”(CW.17.9)			
31.	<p>Apakah PKBM ini milik pemerintah atau yayasan?  NN:  “PKBM ini pinjaman dari Pemerintah Kota Magelang mbak, tapi berada di bawah naungan dari Dinas Pendidikan kota mbak.” (CW.1.7)</p> <p>IN:  “Semua gedung yang ada di PKBM kota magelang semua milik Pemerintah Kota magelang namun berada dibawah naungan Dinas pendidikan Kota Megelang.” (CW.2.7)</p> <p>HW:  “Gedung kita dipinjam pemerintah kota mbak, tapi kalau untuk perizinan dan yang lain sebagainya kita berada di Dinas pendidikan kota masihan.” (CW.9.7)</p> <p>RA:  “Tempatnya milik Pemerintah Kota Magelang mbak tapi masih dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Magelang.” (CW.19.7)</p> <p>AG:  “Milik Pemerintah Kota mbak, tapi masih dibawah bimbingan Dinas Pendidikan Kota Magelang.” (CW.20.7)</p>	<p>“Gedung kita dipinjam pemerintah kota mbak, tapi kalau untuk perizinan dan yang lain sebagainya kita berada di Dinas pendidikan kota masihan.” (CW.9.7)</p> <p>“Semua gedung yang ada di PKBM kota magelang semua milik Pemerintah Kota magelang namun berada dibawah naungan Dinas pendidikan Kota Megelang.” (CW.2.7)</p>	<p>“Gedung kita dipinjam pemerintah kota mbak, tapi kalau untuk perizinan dan yang lain sebagainya kita berada di Dinas pendidikan kota masihan.” (CW.9.7)</p> <p>“Semua gedung yang ada di PKBM kota magelang semua milik Pemerintah Kota magelang namun berada dibawah naungan Dinas pendidikan Kota Megelang.” (CW.2.7)</p>	Semua Gedung untuk Lembaga PKBM semua masih milik dari Pemerintah Kota Magelang, namun untuk perijinan dibawah Dinas Pendidikan Kota.
32.	<p>Apakah sarana dan prasarana yang ada di PKBM dalam kondisi yang baik?  SA:  “Masih baik kok mbak, layak lah untuk</p>	<p>“Masih baik kok mbak, layak lah untuk pembelajaran.” (CW.4.10)</p> <p>“Sarana dan prasarana kurang lengkap ya mbak, tidak ada lab</p>	<p>“Masih baik kok mbak, layak lah untuk pembelajaran.” (CW.4.10)</p> <p>“Sarana dan prasarana kurang lengkap ya mbak, tidak ada lab</p>	Untuk sarana prasarana yang ada sebenarnya masih banyak yang dalam kondisi yang baik, namun

<p>pembelajaran.”(CW.4.10)</p> <p>FO:</p> <p>“Baik kok mbak, yang penting masih bisa buat belajar kok”(CW.6.10)</p> <p>SW:</p> <p>“Bagus kok mbak, paling Cuma ada beberapa kursi yang udah agak buluk”(CW.7.10)</p> <p>OW:</p> <p>“Kalau meja kursi masih bagus mbak, dibuat belajar juga msih nyaman kali ya mbak”(CW.8.10)</p> <p>RH:</p> <p>“Masih kok mbak, kita jug amasih nyaman”(CW.11.10)</p> <p>TT:</p> <p>“Ya masih layak aja kayae mbak, lek digawe sinau jeh patut”(CW.17.10)</p> <p>SH:</p> <p>“Dinas pernah mengadakan sarana dan prasanana di salah satu PKBM saja, yaitu PKBM permata untuk pengadaan meja dan kursi”(CW. 5.5)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau setahu saya tahun 2014 pernah mbak pengadaan mebeler untuk PKBM permata, ”(CW.10.5)</p> <p>KS:</p> <p>“Belum mbak, namanya juga PKBM, semuanya masih minjam mbak, media pembelajaran saja masih minim.”(CW.3.6)</p> <p>MB:</p> <p>“Sarana dan prasarana kurang lengkap ya mbak, tidak ada lab dan alat-alat pendukung praktikum. Ya maklum ya namanya juga pendidikan non formal”(CW.12.6)</p>	<p>dan alat-alat pendukung praktikum. Ya maklum ya namanya juga pendidikan non formal”(CW.12.6)</p> <p>“Kalau meja kursi masih bagus mbak, dibuat belajar juga msih nyaman kali ya mbak”(CW.8.10)</p> <p>“Dinas pernah mengadakan sarana dan prasanana di salah satu PKBM saja, yaitu PKBM permata untuk pengadaan meja dan kursi”(CW. 5.5)</p>	<p>dan alat-alat pendukung praktikum. Ya maklum ya namanya juga pendidikan non formal”(CW.12.6)</p> <p>“Kalau meja kursi masih bagus mbak, dibuat belajar juga msih nyaman kali ya mbak”(CW.8.10)</p> <p>“Dinas pernah mengadakan sarana dan prasanana di salah satu PKBM saja, yaitu PKBM permata untuk pengadaan meja dan kursi”(CW. 5.5)</p>	<p>terkadang tidak digunakan dengan baik, sehingga banyak yang terbengkalai.</p>
---	---	---	--

	<p>JK: “Kalau di PKBM sini belum mbak, dari sarana dan prasana masih kurang.” (CW.13.6)</p> <p>ND: “Kalau disini ya mbak, dibidang lengkap ya jauh dari kata lengkap, tapi paling tidak bisa buat pembelajaran dan waraga belajar juga nyaman.” (CW.14.6)</p> <p>KL: “Disini belum mbak, Gedung saja masih numpang mbak.” (CW.15.6)</p> <p>IK: “Jauh dari kata lengkap mbak, tapi ya masih bisa untuk pembelajaran saja mbak.” (CW.1.6)</p>			
33.	<p>Apakah sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran?</p> <p>SA: “Iya kali ya mbak, kalau enggak ada meja dan kursi gimana saya belajarnya.” (CW.4.11)</p> <p>FO: “Kalau disini masih mendukung mbak.” (CW.6.11)</p> <p>SW: “Mendukung kok mbak, buktinya masih ada pembelajaran disini.” (CW.7.11)</p> <p>OW: “Iya lah mbak, kalau enggak ada sarana dan prasarana trus pembelajaranya gimana.... masak mau dilapangan” (CW.8.11)</p> <p>RH: “Mendukung lah mbak, kalau enggak ada kita belajarnya dimana”</p>	<p>“Belum juga mbak, masih banyak yang kurang, tapi asal pembelajaran lancar sih kadang tidak jadi masalah ko mbak.” (CW.10.9)</p> <p>“Dari ketiga PKBM yang ada belum ada yang sesuai dengan standar SPM mbak,” (CW.5.9)</p> <p>“Kurang sesuai mbak kalau disini, masih jauh sekali dari standar teknisa yang ada dilapangan, dilihat dari jumlah murid dan ruangan saja sudah jelas kurang mbak.” (CW.12.7)</p> <p>“Belum mbak, masih sangat minim disini. Tapi ya lumayan lah untuk pembelajaran sudah layak kok” (CW.15.7)</p>	<p>“Belum juga mbak, masih banyak yang kurang, tapi asal pembelajaran lancar sih kadang tidak jadi masalah ko mbak.” (CW.10.9)</p> <p>“Dari ketiga PKBM yang ada belum ada yang sesuai dengan standar SPM mbak,” (CW.5.9)</p> <p>“Kurang sesuai mbak kalau disini, masih jauh sekali dari standar teknisa yang ada dilapangan, dilihat dari jumlah murid dan ruangan saja sudah jelas kurang mbak.” (CW.12.7)</p> <p>“Belum mbak, masih sangat minim disini. Tapi ya lumayan lah untuk pembelajaran sudah layak kok” (CW.15.7)</p>	<p>Karena banyak sarana dan prasarana yang kurang ditambah lagi dengan sistem yang terbengkalai membuat prasarana kurang mendukung.</p>

<p>(CW.11.11)</p> <p>TT:</p> <p>“Ya mendukung to mbak, lek ngak ana ya gimana gitu.” (CW.17.11)</p> <p>SH:</p> <p>“Dari ketiga PKBM yang ada belum ada yang sesuai dengan standar SPM mbak,” (CW.5.9)</p> <p>MH:</p> <p>“Belum juga mbak, masih banyak yang kurang, tapi asal pembelajaran lancar sih kadang tidak jadi masalah ko mbak.” (CW.10.9)</p> <p>NN:</p> <p>“Ya beginilah mbak keadaan di PKBM, mau dibilang sudah ya belum tapi ya cukup dan layak untuk pembelajaran.” (CW.1 18)</p> <p>IN:</p> <p>“Sudah mbak, bisa dilihat saja modul, alat peraga semua ada dan semua digunakan untuk proses pembelajaran.” (CW.2. 18)</p> <p>HW:</p> <p>“Ya itu lah pasti lah mbak, kalau sarana dan prasarana lengkap kan warga belajar juga nyaman. Sebagai pengelola an juga puas.” (CW.9.18)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya kalau lengkap sarana dan prasarana nya ya pasti mendukung mbak, tapi disini masih kurang mendukung mbak.” (CW.19.18)</p> <p>AG:</p> <p>“Masih kurang mbak. Maklum PKBM sini kan juga masih numpang ya.” (CW.20.18)</p> <p>ZU:</p> <p>“Masih kurang mbak,</p>			
---	--	--	--

	<p>dilihat dari jumlah ruanagn saja kalau disini kurang mbak.” (CW.18.18)</p> <p>KS:</p> <p>“Belum kayaknya mbak, bisa dilihat saja dilapangan seperti apa.” (CW. 3.7)</p> <p>MB:</p> <p>“Kurang sesuai mbak kalau disini, masih jauh sekali dari standar teknisa yang ada dilapangan, dilihat dari jumlah murid dan ruangan saja sudah jelas kurang mbak.” (CW.12.7)</p> <p>JK:</p> <p>“Belum mbak, dari jumlah sarana dan prasarana juga belum terpenuhi kok.” (CW.13.7)</p> <p>ND:</p> <p>“Belum lah mbak, dilihat seko jumlahe aja belum nyukupi kok mbak.” (CW.14.7)</p> <p>KL:</p> <p>“Belum mbak, masih sangat minim disini. Tapi ya lumayan lah untuk pembelajaran sudah layak kok” (CW.15.7)</p> <p>IK:</p> <p>“Walah jauh mbak. Belum.” (CW.16.7)</p>			
34.	<p>Apakah ada pembinaan dalam Standar Pelayanan Minimal?</p> <p>SH:</p> <p>“Pembinaan dari Dinas kota belum pernah ada mbak, tapi kalau dari PNFI semarang sudah pernah mbak, namun hanya perwakilan saja.” (CW.5.11)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau dari dinas belum pernah ada mbak, pernah itu yang mengadakan dari piak P2PNFI Semarang”</p>	<p>“Pembinaan dari Dinas kota belum pernah ada mbak, tapi kalau dari PNFI semarang sudah pernah mbak, namun hanya perwakilan saja.” (CW.5.11)</p>	<p>“Pembinaan dari Dinas kota belum pernah ada mbak, tapi kalau dari PNFI semarang sudah pernah mbak, namun hanya perwakilan saja.” (CW.5.11)</p>	<p>Pembinaan mengenai SPM sangat kurang sekali dari dinas pendidikan maupun dari P2 PNFI</p>



	(CW.10.11)			
35.	<p>Apakah penyusunan rencana kerja mencapai target SPM?</p> <p>SH:</p> <p>“Rencana kerja biasanya sudah sesuai dan SPM, namun karena banyak kendala sehingga tidak bisa mencapai target” (CW.5.12)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau disetiap rencana kerja selalu memenuhi SPM mbak, tapi kalau pelaksanaan pasti kan ada masalah dan kadang banyak kendala jadi tidak terpenuhi dengan baik biasanya. Di ketiga PKBM yang ada juga hampir sama seperti itu” (CW.10.12)</p>	<p>“Rencana kerja biasanya sudah sesuai dan SPM, namun karena banyak kendala sehingga tidak bisa mencapai target” (CW.5.12)</p>	<p>“Rencana kerja biasanya sudah sesuai dan SPM, namun karena banyak kendala sehingga tidak bisa mencapai target” (CW.5.12)</p>	<p>Tidak mencapai SPM karena banyak kendala dari lembaga, maupun dari berbagai masalah yang ada dari birokrasi.</p>
36.	<p>Apakah penyusunan Standar kerja mencapai target SPM?</p> <p>SH:</p> <p>“Standar kerja setiap lembaga mencapai target SPM dilihat dari pengelolaan dan lulusan yang dihasilkan” (CW.5.13)</p> <p>MH:</p> <p>“Dari ketiga PKBM yang ada yang standar kerjanya bagus itu hanya satu mbak di PKBM Kuncup mekar, kalau yang lain masih kurang bagus dan tidak mencapai SPM yang seharusnya” (CW.10.13)</p>	<p>“Dari ketiga PKBM yang ada yang standar kerjanya bagus itu hanya satu mbak di PKBM Kuncup mekar, kalau yang lain masih kurang bagus dan tidak mencapai SPM yang seharusnya” (CW.10.13)</p>	<p>“Dari ketiga PKBM yang ada yang standar kerjanya bagus itu hanya satu mbak di PKBM Kuncup mekar, kalau yang lain masih kurang bagus dan tidak mencapai SPM yang seharusnya” (CW.10.13)</p>	<p>Menurut data diatas, dari ketika lembaga yang ada masih belum mencapai SPM yang ada</p>
37.	<p>Apakah ada penilaian pengukuran kinerja?</p> <p>SH:</p> <p>“Ada mbak, tapi dari ketiga lembaga yang ada yang pernah dinilai adalah PKBM kuncup mekar pada tahun 2015 dan tahun 2016 ini rencananya adalah upaya terampil.” (CW.5.14)</p>	<p>“Pengukuran kinerja pengelola PKBM kita lakukan setiap tahun mbak, ada tim khusus biasanya yang menangani hal ini”(CW.10.14)</p>	<p>“Pengukuran kinerja pengelola PKBM kita lakukan setiap tahun mbak, ada tim khusus biasanya yang menangani hal ini”(CW.10.14)</p>	<p>Evaluasi hanya dilakukan setiap akhir tahun, sedangkan dalam pendidikan evaluasi paling tidak harus mengandung aspek aspek</p>

	MH: “Pengukuran kinerja pengelola PKBM kita lakukan setiap tahun mbak, ada tim khusus biasanya yang menangani hal ini”(CW.10.14)			yang lain.
<b>Kendala Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang.</b>				
38.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?</p> <p>NN: “Kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal adalah keuangan mbak, ya kalau keuangan sedikit bagaimana bisa menjalankan program dengan baik.” (CW. 1.23)</p> <p>IN: “Banyak mbak kalau bicara kendala, salah satunya ya masalah anggaran lah ya pastinya. Karna memang kalau anggaran itu masalah yang sangat krusial untuk menunjang kelancaran.” (CW. 2.23)</p> <p>HW: “Banyak mbak, tapi kalau saya bilang semua itu banyak masalah dari warga belajar yang masih sangat labil.” (CW.9.23)</p> <p>RA: “Kendala banyak mbak, anggaran lah ya yang paling biasanya berperan penting banget.”(CW.19.23)</p> <p>AG: “Banyak mbak, semua masalah biasanya dari keterbatasan anggran.”(CW.20.23)</p> <p>ZU:</p>	<p>“Kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal adalah keuangan mbak, ya kalau keuangan sedikit bagaimana bisa menjalankan program dengan baik.” (CW. 1.23)</p> <p>“Banyak mbak kalau bicara kendala, salah satunya ya masalah anggaran lah ya pastinya. Karna memang kalau anggaran itu masalah yang sangat krusial untuk menunjang kelancaran.” (CW. 2.23)</p> <p>“Banyak mbak, tapi kalau saya bilang semua itu banyak masalah dari warga belajar yang masih sangat labil.” (CW.9.23)</p>	<p>“Kendala dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal adalah keuangan mbak, ya kalau keuangan sedikit bagaimana bisa menjalankan program dengan baik.” (CW. 1.23)</p> <p>“Banyak mbak kalau bicara kendala, salah satunya ya masalah anggaran lah ya pastinya. Karna memang kalau anggaran itu masalah yang sangat krusial untuk menunjang kelancaran.” (CW. 2.23)</p> <p>“Banyak mbak, tapi kalau saya bilang semua itu banyak masalah dari warga belajar yang masih sangat labil.” (CW.9.23)</p>	<p>Dalam hal ini kendala yang dikeluhkan disetiap lembaga adalah masalah anggaran yang sangat minim. Namun tidak menutup kemungkinan juga warga belajar juga menjadi kendala yang besar seperti kehadiran dan partisipasi saat pembelajaran yang ada.</p>

	<p>“Lagu lama mbak, masalahnya ya anggaran lah mbak kalau anggaran sedikit ya kita sebagai pengelola juga susah.”(CW.18.23)</p>			
39.	<p>Apakah ada pihak-pihak tertentu yang menghambat pengimplementasian standar pelayanan minimal dalam kesetaraan paket B di kota magelang?  NN:  “Kalau pihak lain sih ngak ada mbak.” (CW.1.24)  IN:  “Ada mbak, warga belajar yang terdaftar namun tidak aktif itu lo. Jadi membuat data yang ada sering tidak valid.” (CW.2.24)  HW:  “Warga belajar mbak, ya bagaimana ya warga belajar kan sebagai subjek dari proses pembelajaran ini to mbak. Kalau ngak ada warga belajar ya kita tidak ada program ini” (CW.9.24)  RA:  “Banyak mbak, dari anggaran, tutor, dan warga belajar punya kendala masing-masing mbak.” (CW.19.24)  AG:  “Warga belajar mbak. Terkadang tidak bisa diajak untuk maju.” (CW.20.24)  ZU:  “Pemerintah mbak kalau dirasa-rasa kurang mendukung PKBM secara penuh.” (CW.18.24)</p>	<p>“Warga belajar mbak, ya bagaimana ya warga belajar kan sebagai subjek dari proses pembelajaran ini to mbak. Kalau ngak ada warga belajar ya kita tidak ada program ini” (CW.9.24)  “Banyak mbak, dari anggaran, tutor, dan warga belajar punya kendala masing-masing mbak.” (CW.19.24)  “Pemerintah mbak kalau dirasa-rasa kurang mendukung PKBM secara penuh.” (CW.18.24)</p>	<p>“Warga belajar mbak, ya bagaimana ya warga belajar kan sebagai subjek dari proses pembelajaran ini to mbak. Kalau ngak ada warga belajar ya kita tidak ada program ini” (CW.9.24)  “Banyak mbak, dari anggaran, tutor, dan warga belajar punya kendala masing-masing mbak.” (CW.19.24)  “Pemerintah mbak kalau dirasa-rasa kurang mendukung PKBM secara penuh.” (CW.18.24)</p>	<p>Kendala pihak pihak terkait dalam pengimplementasian SPM terdiri dari berbagai hal. Dari masalah anggaran, pemerintah, warga belajar hingga sarana dan prasarana.</p>
40.	<p>Apakah penentuan kualifikasi tutor menjadi kendala dalam pemenuhan SPM?  SH:</p>	<p>“Seharusnya tidak menjadi kendala asalkan kualifikasi itu dipenuhi oleh setiap lembaga, namun</p>	<p>“Seharusnya tidak menjadi kendala asalkan kualifikasi itu dipenuhi oleh setiap lembaga, namun</p>	<p>Dalam penentuan kualifikasi tutor menjadi bermasalah di</p>

<p>“Seharusnya tidak menjadi kendala asalkan kualifikasi itu dipenuhi oleh setiap lembaga, namun karena tidak dipenuhinya itu menjadi kendala saat akreditasi ataupun penilaian yang lainnya.” (CW.5.16)</p> <p>MH:</p> <p>“Karena dari ketiga PKBM ynag tutornya sesuai dengan SMP tidak ada, jadi sering menjadi kendala masalah dengan kurikulum dan cara mengajarnya yang masih tradisionalmbak” (CW.10.16)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI semarang untuk menyetarakan standar sesuai kulifikasi Nasional.” (CW.1.30)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau masalah tutor yang ada kita mengikutsertakan dalam pelatihan pengajaran yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan maupun dari swasta.” (CW.2.30)</p> <p>HW:</p> <p>“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik” (CW.9.30)</p> <p>RA:</p> <p>“Mengikutsertakkan dalam berbagai kualifikasi tutor agar dapat terpenuhi” (CW.19.30)</p> <p>AG:</p> <p>“Mengikutkan dalam berbagai pelatihan dan mengusahakan untuk memenuhi kalifikasi dengan waktu tertentu.” (CW.20.30)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kualifikasi tutor mah itu</p>	<p>karena tidak dipenuhinya itu menjadi kendala saat akreditasi ataupun penilaian yang lainnya.” (CW.5.16)</p> <p>“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI semarang untuk menyetarakan standar sesuai kulifikasi Nasional.” (CW.1.30)</p> <p>“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik” (CW.9.30)</p> <p>“Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)</p>	<p>karena tidak dipenuhinya itu menjadi kendala saat akreditasi ataupun penilaian yang lainnya.” (CW.5.16)</p> <p>“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun P2PNFI semarang untuk menyetarakan standar sesuai kulifikasi Nasional.” (CW.1.30)</p> <p>“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik” (CW.9.30)</p> <p>“Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)</p>	<p>setiap lembaga, dengan berbagai pertimbangan yang ada banyak yang tidak memenuhi klasifikasi yang ada.</p>
--	--	--	---

	kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan pkb yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)			
41.	<p>Apakah anda kesulitan dalam mencari modul? SA: “Tidak mbak soalnya ditaruh di TBM kok, jadi mudah mengambilnya.” (CW.4.12) FO: “Tidak kok mbak,” (CW.6.12) SW: “Sedikit mbak, karena digudang dan tidak dirapikan jadi susah pas nyarinya aja” (CW.7.12) OW: “Enggak sih mbak, banyak modul kok sebenarnya kalau mau minjem dan baca” (CW.8.12) RH: “Enggak mbak, kan kalau enggak ada tinggal minta sama pengelola aja” (CW.11.12) TT: “Engak sih mbak sebenarnya, toh dah disiapkan sama pengelola juga” (CW.17.12)</p>	<p>“Tidak mbak soalnya ditaruh di TBM kok, jadi mudah mengambilnya.” (CW.4.12) “Sedikit mbak, karena digudang dan tidak dirapikan jadi susah pas nyarinya aja” (CW.7.12) “Enggak mbak, kan kalau enggak ada tinggal minta sama pengelola aja” (CW.11.12)</p>	<p>“Tidak mbak soalnya ditaruh di TBM kok, jadi mudah mengambilnya.” (CW.4.12) “Sedikit mbak, karena digudang dan tidak dirapikan jadi susah pas nyarinya aja” (CW.7.12) “Enggak mbak, kan kalau enggak ada tinggal minta sama pengelola aja” (CW.11.12)</p>	Untuk modul setiap lembaga menyediakan untuk warga belajar yang ada. Bisanya diletakkan di TBM di setiap lembaga yang ada.
42.	<p>Apakah anda mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan tutor? SA: “Tekadang iya mbak, kalau tutornya pas dapat yang galak, kadang ada juga tutornya yang judesnya minta ampun,” (CW.4.13) FO: “Enggak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok” (CW.17.13)</p>	<p>“Tekadang iya mbak, kalau tutornya pas dapat yang galak, kadang ada juga tutornya yang judesnya minta ampun,” (CW.4.13) “Engak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok” (CW.17.13)</p>	<p>“Tekadang iya mbak, kalau tutornya pas dapat yang galak, kadang ada juga tutornya yang judesnya minta ampun,” (CW.4.13) “Engak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok” (CW.17.13)</p>	Komunikasi dengan tutor masih wajar dan warga belajar tidak mengalami kendala yang berarti.

	<p>“Tidak mbak, tutor disini baik baik kok, dan enak kalau diajak diskusi” (CW.6.13)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak ada, disini tutor-tutornya enak-anak kok mbak, semuanya bisa diajak bercanda.” (CW.7.13)</p> <p>OW:</p> <p>“Tutor sini mah gokil-gokil mbak, enggak sepaneng kok.” (CW.8.13)</p> <p>RH:</p> <p>“Tidak ada, tutornya enak kok mbak” (CW.11.13)</p> <p>TT:</p> <p>“Engak mbak, disini tutor sama pengelola pada baik-baik kok” (CW.17.13)</p>	<p>“Tidak ada, disini tutor-tutornya enak-anak kok mbak, semuanya bisa diajak bercanda.” (CW.7.13)</p>	<p>“Tidak ada, disini tutor-tutornya enak-anak kok mbak, semuanya bisa diajak bercanda.” (CW.7.13)</p>	
43.	<p>Apakah anda mengalami kendala dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai?</p> <p>SA:</p> <p>“Tidak mbak, soalnya yang penting bagi saya proses pembelajaran ada, dan modul juga ada, kalau saya gitu.” (CW.4.14)</p> <p>FO:</p> <p>“Sebenarnya kalau dari segi sarana dan prasana tidak sih mbak, yang penting masih bisa digunakan untuk pembelajaran saja” (CW.6.14)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak mbak, disini saya yang penting ikut pembelajaran, pembelajaran disini juga fleksibel kok jadi tidak terlalu membutuhkan sarana dan prasaran yang bagus kayak di sekolah formal” (CW.7.14)</p> <p>OW:</p> <p>“Tidak terlalu mbak, soalnya kan biasanya juga</p>	<p>“Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)</p> <p>“Ya jelas to mbak, kalau lengkap kan warga beajar juga semangat, tutor pun juga semanagt.” (CW.18.25)</p> <p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan kalaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.10.19)</p> <p>NN:</p> <p>“Salah satunya iya, sarana dan prasana kan juga masih minjam dan inventaris disini juga.” (CW.1.25)</p>	<p>“Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)</p> <p>“Ya jelas to mbak, kalau lengkap kan warga beajar juga semangat, tutor pun juga semanagt.” (CW.18.25)</p> <p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan kalaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.10.19)</p> <p>NN:</p> <p>“Salah satunya iya, sarana dan prasana kan juga masih minjam dan inventaris disini juga.” (CW.1.25)</p>	<p>Sebenarnya kurang memadai itu dikarenakan beberapa hal, namun tak bisa dipungkiri semua berkaitan dengan yang namanya anggaran.</p>

<p>diusahakan sama pengelola kok” (CW.8.14)</p> <p>RH:</p> <p>“Tidak masalah mbak, maklum lah mbak kan juga disekolah non formal, beda sama sekolah formal yang lengkap” (CW.11.14)</p> <p>TT:</p> <p>“Kedala masalah sarana dan prasarana enggak ada mbak. Yang penting mah masih bisa buat belajar aja to mbak” (CW.17.14)</p> <p>SH:</p> <p>“Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)</p> <p>MH:</p> <p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.10.19)</p> <p>NN:</p> <p>“Salah satunya iya, sarana dan prasana kan juga masih minjam dan inventaris disini juga.” (CW.1.25)</p> <p>IN:</p> <p>“Pasti iya, kalau sarana dan prasaran kurang bagaimana proses pembelajaran yang ada berlangsung dengan lancar. .” (CW.2.25)</p> <p>HW:</p> <p>“Kalau untuk pembelajaran ya pasti jadi kendala lah mbak, tapi ya jadinya diusahakan buat lebih enak aja pas dipakai.” (CW.9.25)</p> <p>RA:</p> <p>“Ya jelas ya mbak. Gimana pembelajaran bisa berjalan lancar kalau tidak ada sarana dan prasarana yang</p>			
---	--	--	--

	<p>memadai.” (CW.19.25)</p> <p>AG:</p> <p>“Pastinya mbak. Sarana dan prasarana lengkap kan enak juga buat belajar.” (CW.20.25)</p> <p>ZU:</p> <p>“Ya jelas to mbak, kalau lengkap kan warga beajar juga semangat, tutor pun juga semanagt.” (CW.18.25)</p>			
44.	<p>Apakah peraturan dari dinas pendidikan menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran?</p> <p>NN:</p> <p>“Tidak ada lah mbak, soalnya semua wewenang proses pembelajaran diserahkan langsung pada pengelola PKBM. (CW.1.27)</p> <p>IN:</p> <p>“Peraturan dari dinas pendidikan sangat membantu proses pengelolaan PKBM dalam proses pembelajaran yang ada kok mbak.” (CW.2.27)</p> <p>HW:</p> <p>“Tidak mbak, kendala dalam proses pemebelajran biasanya karna warga belajar datangnya terlambat . bukan ada masalah dengan peraturan pemerintah” (CW.9.27)</p> <p>RA:</p> <p>“Iya mbak, apalagi kebijakan masalah anggaran. ” (CW.19.27)</p> <p>AG:</p> <p>“Tidak mbak” (CW.20.27)</p> <p>ZU:</p> <p>“Terkadang iya mbak, contohnya saja kalau pas lagi pembuatan proposal dan pelaporan anggaran.” (CW.18.27)</p>	<p>“Tidak ada lah mbak, soalnya semua wewenang proses pembelajaran diserahkan langsung pada pengelola PKBM. (CW.1.27)</p> <p>“Peraturan dari dinas pendidikan sangat membantu proses pengelolaan PKBM dalam proses pembelajaran yang ada kok mbak.” (CW.2.27)</p> <p>“Terkadang iya mbak, contohnya saja kalau pas lagi pembuatan proposal dan pelaporan anggaran.” (CW.18.27)</p>	<p>“Tidak ada lah mbak, soalnya semua wewenang proses pembelajaran diserahkan langsung pada pengelola PKBM. (CW.1.27)</p> <p>“Peraturan dari dinas pendidikan sangat membantu proses pengelolaan PKBM dalam proses pembelajaran yang ada kok mbak.” (CW.2.27)</p> <p>“Terkadang iya mbak, contohnya saja kalau pas lagi pembuatan proposal dan pelaporan anggaran.” (CW.18.27)</p>	<p>Peraturan yang dibuat oleh dinas pendidikan sebenarnya akan memudahkan lembaga dalam mengatur setiap pembelajaran yang ada, namun terkadang menjadi kendala dalam beberapa hal.</p>



45.	<p>Apakah anda mengalami kendala dengan jadwal pembelajaran?</p> <p>SA:</p> <p>“Iya mbak, soalnya saya kan sudah kerja jadi seminggu di jadwal masuk 3 kali saya hanya bisa masuk 2 hai saja.” (CW.4.15)</p> <p>FO:</p> <p>“Tidak terlalu mbak, soalnya kan biasanya jadwla sudah disesuaikan dengan yang kerja dan tutornya” (CW.6.15)</p> <p>SW:</p> <p>“Tidak mbak, saya kan masuk paket b juga biar bebas sekolahnya” (CW.7.15)</p> <p>OW:</p> <p>“Jadwal mah saya enggak mbak, soalnya saya kan sudah menikah, dan enggak ada kesibukan juga” (CW.8.15)</p> <p>RH:</p> <p>“Jadwal mah kadang mbak kalau pas ujian biasanya, soalnya kan saya kerja jadi harus izin juga sama bosnya” (CW.11.15)</p> <p>TT:</p> <p>“Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain” (CW.17.15)</p>	<p>“Iya mbak, soalnya saya kan sudah kerja jadi seminggu di jadwal masuk 3 kali saya hanya bisa masuk 2 hai saja.” (CW.4.15)</p> <p>“Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain” (CW.17.15)</p> <p>“Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain” (CW.17.15)</p>	<p>“Iya mbak, soalnya saya kan sudah kerja jadi seminggu di jadwal masuk 3 kali saya hanya bisa masuk 2 hai saja.” (CW.4.15)</p> <p>“Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain” (CW.17.15)</p> <p>“Jadwal iya mbak, solnya kan saya sudah berkeluarga dan punya anak kecil jadi ya kadang ngak bisa ditinggal. Kalau mau dibawa kesini ya malu juga sama teman-teman yang lain” (CW.17.15)</p>	<p>Warga belajar terkadang memiliki kendala dalam masalah jadwal, dikarenakan mereka sudah menikah ataupun sudah bekerja, namun, sehingga pengaturan jadwal biasanya menyesuaikan dengan mereka yang sudah bekerja dan yang lainnya.</p>
<p align="center"><b>Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan Paket B di Kota Magelang</b></p>				
46.	<p>Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala dalam pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal dalam Kesetaraan Paket B di Kota Magelang?</p>	<p>“Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi dari anggaran, kualifikasi tutor dan pengelolaan PKBM itu sendiri ya mbak.”</p>	<p>“Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi dari anggaran, kualifikasi tutor dan pengelolaan PKBM itu sendiri ya mbak.”</p>	<p>Solusi dalam pengimplementasian adalah dengan membenahi berbagai aspek</p>

	<p>NN: “Solusinya ya mbak, kalau anggaran ditambah aja, pasti pengimplementasian juga akan maksimal.” (CW.1.28)</p> <p>IN: “Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi dari anggaran, kualifikasi tutor dan pengelolaan PKBM itu sendiri ya mbak.” (CW.2.28)</p> <p>HW: “Perlu adanya pelatihan yang lebih serius dan mendalam tentang SPM itu sendiri.” (CW.9.28)</p> <p>RA: “Sebagai pengelola sering lah ya mengadakan audiensi dan penanganan yang lain. Biar lebih baik” (CW.19.28)</p> <p>AG: “Ya kalau masalah anggran mah dari pemerintahnya bagaimana t mbak, kita sebagai pengelola Cuma bisa menjalankan apa instruksi dari atsa to.” (CW.20.28)</p> <p>TT: “Anggaran ditambah mungkin bisa mengurangi sedikit kendala yang ada di PKBM kok mbak.” (CW.18.28)</p> <p>KS: “Banyak mbak, gaji saya sebagai tutor saja kurang, sarana dan prasana disini juga kurang mendukung dan warga belajar juga kurang kondusif” (CW.3.11)</p> <p>MB: “Kendala saat pengimplementasian biasanya karena</p>	<p>(CW.2.28) “Kendala saat pengimplementasian biasanya karena keterbatasan anggaran mbak untuk PKBM itu jadi kurang optimal.” (CW.12.11) “Banyak mbak, yang paling krusial ya anggaran to mbak. La mau gimana lagi anggaran yang menjalankan e mbak” (CW.16.11) “Perlu adanya pelatihan yang lebih serius dan mendalam tentang SPM itu sendiri.” (CW.9.28)</p>	<p>(CW.2.28) “Kendala saat pengimplementasian biasanya karena keterbatasan anggaran mbak untuk PKBM itu jadi kurang optimal.” (CW.12.11) “Banyak mbak, yang paling krusial ya anggaran to mbak. La mau gimana lagi anggaran yang menjalankan e mbak” (CW.16.11) “Perlu adanya pelatihan yang lebih serius dan mendalam tentang SPM itu sendiri.” (CW.9.28)</p>	<p>yang erpengaruh dalam SPm. Namun tak lupa penambahan anggran juga sanagt berperan penting dalam setiap kemajuan SPM.</p>
--	--	--	--	---

	<p>keterbatasan anggaran mbak untuk PKBM itu jadi kurang optimal.” (CW.12.11)</p> <p>JK:</p> <p>“Kendala banyak mbak disini, kalau saya sebagai tutor mah. Apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang.” (CW.13.11)</p> <p>ND:</p> <p>“Warga belajar mbak, kan dilihat dari orientasi belajare wes beda to. Na itu sebagian besar disitu.” (CW.14.11)</p> <p>KL:</p> <p>“Sarana dan prasarana mbak kalau menurut saya yang sebagai tutor.” (CW.15.11)</p> <p>IK:</p> <p>“Banyak mbak, yang paling krusial ya anggaran to mbak. La mau gimana lagi anggaran yang menjalankan e mbak” (CW.16.11)</p>			
47.	<p>Bagaimana cara mengatasi kendala kualifikasi tutor untuk pemenuhan SPM?</p> <p>“Penegasan dari pusat mengenai kualifikasi tutor dan kejelasan peraturan yan ada.” (CW.5.18)</p> <p>MH:</p> <p>“Kalau itu juga sedang dibicarakan mbak,soalnya kalau kita juga menuntut terlalu banyak pada tutor kan juga harus berbanding terbalik dengan gaji to. Tapi kan tau sendiri tutor saja hanya mendapat gaji dari APBD 2 saja” (CW.10.18)</p> <p>NN:</p> <p>“Biasanya kita ikutkan pelatihan yang mengadakan dinas pendidikan maupun</p>	<p>“Tidak terlalu signifikan mbak, soalnya yang penting tutor mampu mengajar dengan baik dan warga belajar juga suka dengan tutor tersebut.” (CW.12.12)</p> <p>“Dibilang tidak juga sebenarnya memberatkan juga mbak, tapi juga dari dinas juga tidak ada kejelasan kok mbak, ya kami sebagai tutor juga santai saja to. Yang penting tugas mengajar kita terpenuhi gitu aja.” (CW.16.12)</p> <p>“Kalau dalam pembelajaran tidak</p>	<p>“Tidak terlalu signifikan mbak, soalnya yang penting tutor mampu mengajar dengan baik dan warga belajar juga suka dengan tutor tersebut.” (CW.12.12)</p> <p>“Dibilang tidak juga sebenarnya memberatkan juga mbak, tapi juga dari dinas juga tidak ada kejelasan kok mbak, ya kami sebagai tutor juga santai saja to. Yang penting tugas mengajar kita terpenuhi gitu aja.” (CW.16.12)</p> <p>“Kalau dalam pembelajaran tidak</p>	<p>Karena tidak terlalu dipentingkan mengenai masalah kualifikasi tutor ini, sehingga tidak terlalu difikirkan dengan seksama. Namun untuk menunjang kualifikasi yang ada biasanya adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak</p>

<p>P2PNFI Semarang untuk menyetarakan standar sesuai kualifikasi Nasional.” (CW.1.30)</p> <p>IN:</p> <p>“Kalau masalah tutor yang ada kita mengikutsertakan dalam pelatihan pengajaran yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan maupun dari swasta.” (CW.2.30)</p> <p>HW:</p> <p>“Pelatihan agar kualifikasi tutor semakin terpenuhi dengan baik” (CW.9.30)</p> <p>RA:</p> <p>“Mengikutsertakan dalam berbagai kualifikasi tutor agar dapat terpenuhi” (CW.19.30)</p> <p>AG:</p> <p>“Mengikutkan dalam berbagai pelatihan dan mengusahakan untuk memenuhi kualifikasi dengan waktu tertentu.” (CW.20.30)</p> <p>ZU:</p> <p>“Kualifikasi tutor mah itu kebijakan pemerintah to mbak, tapi kalau dari kebijakan PKBM yang penting tutor mau mengajar mbak. Itu saja sudah dari kata cukup kok mbak soalnya nyari orang yang mau saja sulit mbak dengan gaji yang enggak jelas.” (CW.18.30)</p> <p>KS:</p> <p>“Tidak lah mbak, yang penting pembelajaran terlaksana aja.” (CW. 3.12)</p> <p>MB:</p> <p>“Tidak terlalu signifikan mbak, soalnya yang penting tutor mampu mengajar dengan baik dan warga belajar juga suka dengan tutor tersebut.” (CW.12.12)</p>	<p>mbak, kualifikasi tutor biasanya kendala sama gaji mbak. Padahal gaji disini juga enggak seberapa.” (CW.13.12)</p> <p>“Proses pembelajaran ngak ada hubungannya sama kualifikasi tutor biasanya mbak. Kualifikasi tutor kan biasanya hanya administrasi aja kok.” (CW.14.12)</p>	<p>mbak, kualifikasi tutor biasanya kendala sama gaji mbak. Padahal gaji disini juga enggak seberapa.” (CW.13.12)</p> <p>“Proses pembelajaran ngak ada hubungannya sama kualifikasi tutor biasanya mbak. Kualifikasi tutor kan biasanya hanya administrasi aja kok.” (CW.14.12)</p>	<p>swasta yang lain.</p>
--	---	---	--------------------------

	<p>JK:  “Kalau dalam pembelajaran tidak mbak, kualifikasi tutor biasanya kendala sama gaji mbak. Padahal gaji disini juga enggak seberapa.” (CW.13.12)</p> <p>ND:  “Proses pembelajaran ngak ada hubungannya sama kualifikasi tutor biasanya mbak. Kualifikasi tutor kan biasanya hanya administrasi aja kok.” (CW.14.12)</p> <p>KL:  “Tidak lah mbak. Yang penting warga belajar mengerti sama pa yang kita sampaikan saja sudah syukur mbak.” (CW.15.12)</p> <p>IK:  “Dibilang tidak juga sebenarnya memberatkan juga mbak, tapi juga dari dinas juga tidak ada kejelasan kok mbak, ya kami sebagai tutor juga santai saja to. Yang penting tugas mengajar kita terpenuhi gitu aja.” (CW.16.12)</p>			
48.	<p>Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam hal sarana dan prasarana?</p> <p>SH:  “ Sarana dan prasaran itu mah, berkaitan dengan anggaran mbak, sedangkan dinas tidak pernah ada anggaran.” (CW.5.19)</p> <p>MH:  “Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.5.19)</p> <p>NN:  “Sarana dan prasarana</p>	<p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.5.19)</p> <p>“Ya bagaimana ya, pasti iya lah, kalau alat-alat yang tidak lengkap kan juga menyusahkan para tutor juga mbak pas pembelajaran.” (CW.12.13)</p> <p>“Kendala sih tidak terlalu ya mbak, toh</p>	<p>“Manajemen tentang sarana dan prasarana dikaji kembali, dan walaupun ada anggaran yang lebih bisa dialihkan disarana dan prasarana yang kurang.” (CW.5.19)</p> <p>“Ya bagaimana ya, pasti iya lah, kalau alat-alat yang tidak lengkap kan juga menyusahkan para tutor juga mbak pas pembelajaran.” (CW.12.13)</p> <p>“Kendala sih tidak terlalu ya mbak, toh kalau disini</p>	<p>Pengkajian mengenai manajemen mengenai sarana dan prasarana juga diperhitungkan. Sehingga apabila ada kendala yang lain masih bisa dicaver oleh PKBM.</p>

<p>ditambah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada aja mbak.” (CW.1.29)</p> <p>IN:</p> <p>“Pembenahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana aja kali ya mbak biar bisa digunakan semaksimal mungkin.” (CW.2.29)</p> <p>HW:</p> <p>“Dalam hal ini banyak yang harus dibenahi, dari segi manajemen keuangan dan manajemen sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik” (CW.9.29)</p> <p>RA:</p> <p>“Sebagai pengelola kita cuma bisa mengusahakan anggaran yang mana bisa digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana.” (CW.19.29)</p> <p>AG:</p> <p>“Mengajukan anggaran to mbak biar bisa memperbaiki sarana dan prasarana.” (CW.20.29)</p> <p>ZU:</p> <p>“Sarana dan prasarana bisa tidak terlalu dipusingkan, yang penting media pembelajaran lebih lengkap.” (CW.18.29)</p> <p>KS:</p> <p>“Kalau yang ini jelas lah ya mbak, soalnya kan tempat pembelajaran gabung dengan SD wates 4, jadi banyak kendala kalau pas bersamaan penggunaanya.” (CW.3.13)</p> <p>MB:</p> <p>“Ya bagaimana ya, pasti iya lah, kalau alat-alat yang tidak lengkap kan juga</p>	<p>kalau disini pembelajaran juga tidak terlalu sering dan waktunya juga fleksibel.” (CW.16.13)</p>	<p>pembelajarannya juga tidak terlalu sering dan waktunya juga fleksibel.” (CW.16.13)</p>	
--	---	---	--

	<p>menyusahkan para tutor juga mbak pas pembelajaran.” (CW.12.13)</p> <p>JK:</p> <p>“Sarana dan prasana ya iya lah mbak. Soalnya kan pengaruh sama pembelajaran to ya.” (CW.13.13)</p> <p>ND:</p> <p>“Ya pastinya iya mbak, tapi ya bagaimana lagi disini anggaran juga sanagt minim. Jadi ya pasrah aja.” (CW.14.13)</p> <p>KL:</p> <p>“Ya jelas mbak. Soalnya kan memberi motivasi juga to mbak kalau sarana dan prasarana” (CW.15.13)</p> <p>IK:</p> <p>“Kendala sih tidak terlalu ya mbak, toh kalau disini pembelajaranya juga tidak terlalu sering dan waktunya juga fleksibel.” (CW.16.13)</p>			
49.	<p>Apakah usia warga belajar yang sangat berbeda menjadi kendala dalam proses pembelajaran?</p> <p>KS:</p> <p>“Terkadang iya mbak, soalnya pasti daya tangkap setiap umur juga relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya.” (CW. 3.14)</p> <p>MB:</p> <p>“Wah disini usia sekolah ada, yang sudah menikah juga ada, yang kerja juga ada. Kendalanya ya nanti dari cara berfikir itu to mbak, la gimana lagi yang difikrin juga udah beda-beda” (CW.12.14)</p> <p>JK:</p> <p>“Kalau namanya di paket ya kendala usia warga belajar itu mbak yang beda-beda, pemikiranya juga</p>	<p>“Terkadang iya mbak, soalnya pasti daya tangkap setiap umur juga relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya.” (CW. 3.14)</p> <p>“Kalau namanya di paket ya kendala usia warga belajar itu mbak yang beda-beda, pemikiranya juga udah jarang yang bener-bener mau sekolah. Orientasinya kan juga udah beda ya mbak sama yang sekolah formal.” (CW.13.14)</p>	<p>“Terkadang iya mbak, soalnya pasti daya tangkap setiap umur juga relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya.” (CW. 3.14)</p> <p>“Kalau namanya di paket ya kendala usia warga belajar itu mbak yang beda-beda, pemikiranya juga udah jarang yang bener-bener mau sekolah. Orientasinya kan juga udah beda ya mbak sama yang sekolah formal.” (CW.13.14)</p>	<p>Bagaimana juga di pendidikan kesetaraan itu pasti banyak warga belajar yang usianya berbeda-beda. Namun dapat diatasi dengan pendekatan yang berbeda dan metode gaya mengajar yang berbeda oleh para tutor.</p>

	<p>udah jarang yang benar-bener mau sekolah. Orientasinya kan juga udah beda ya mbak sama yang sekolah formal.” (CW.13.14)</p> <p>ND:</p> <p>“Itu masalah mbak di proses pembelajaran. Kadang kalau yang tua-tua yang sering kurang jelas. Kalau yang usia sekolah biasanya lebih cepat.” (CW.14.14)</p> <p>KL:</p> <p>“Warga belajar tidak terlalu masalah mbak. Soalnya kan memang kalau di paket ya usia kan memang relatif ngak sama ya.” (CW.15.14)</p> <p>IK:</p> <p>“Sebagai tutor di PKBM saya tidak terlalu kesulitan mbak, yang menjadi kendala palah tingkat kehadirannya saja mbak.” (CW.16.14)</p>			
50.	<p>Bagaimana mengatasi kendala dalam berkomunikasi dengan tutor?</p> <p>SA:</p> <p>“Kadang via telepon mbak, soalnya kan zaman sudah canggih”(CW.4.16)</p> <p>FO:</p> <p>“Kalau cara mengatasi enggak ada sih mbak, soalnya saya kan tidak ada masalah dengan tutor”(CW.6.16)</p> <p>SW:</p> <p>“Saya sih diam aja mbak, yang penting saya mengikuti pelajaran yang tutor berikan gitu aja.”(CW.7.16)</p> <p>OW:</p> <p>“Jangan bikin mood tutor sebel aja sama kitanya,</p>	<p>“Saya sih diam aja mbak, yang penting saya mengikuti pelajaran yang tutor berikan gitu aja.”(CW.7.16)</p> <p>“Jangan bikin mood tutor sebel aja sama kitanya, pasti juga tutornya enak kok”(CW.8.16)</p> <p>“Nurut aja sama perintah-perintah tutor gt aja pasti ngak ada masalah kok mbak”(CW.17.16)</p>	<p>“Saya sih diam aja mbak, yang penting saya mengikuti pelajaran yang tutor berikan gitu aja.”(CW.7.16)</p> <p>“Jangan bikin mood tutor sebel aja sama kitanya, pasti juga tutornya enak kok”(CW.8.16)</p> <p>“Nurut aja sama perintah-perintah tutor gt aja pasti ngak ada masalah kok mbak”(CW.17.16)</p>	<p>Sebenarnya banyak warga belajar yang tidak terlalu bermasalah dengan tutor di PKBM.</p>



	<p>pasti juga tutornya enak kok”(CW.8.16)</p> <p>RH:</p> <p>“Jangan membuat tutor marah aja, pasti ngak ada masalah kok sama tutor”(CW.11.16)</p> <p>TT:</p> <p>“Nurut aja sama perintah-perintah tutor gt aja pasti ngak ada masalah kok mbak”(CW.17.16)</p>			
51.	<p>Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah jadwal pembelajaran?</p> <p>SA:</p> <p>“Kalau jadwal kerja saya kan ngak bisa diganti mbak, jadi ya pinginya jadwal aja menyesuaikan dengan kita yang bekerja”(CW.4.17)</p> <p>FO:</p> <p>“Jadwal saya sudah enjoy karna pemilihan dengan jam kerja saya juga cocok”(CW.6.17)</p> <p>SW:</p> <p>“Kalau masalah jadwal kan saya ngak ada masalah, tapi kalau yang lain ada masalah mungkin aja nie bisa disesuaikan dengn yang lain dulu gitu”(CW.7.17)</p> <p>OW:</p> <p>“Ya jadwal mah disesuaikan aja sama PKBM menyesuaikan dengan yang kerja dan tutor”(CW.8.17)</p> <p>RH:</p> <p>“Kalau saya biasanya minta izin sama bos saya mbak kalau pas ujian”(CW.11.17)</p> <p>TT:</p> <p>“Kalau jadwal biasanya saya naruh bayi saya ke rumah simbahe to mbak. Kalau pas ngak ada yang dititipi ya terpaksa ngak</p>	<p>“Ya jadwal mah disesuaikan aja sama PKBM menyesuaikan dengan yang kerja dan tutor”(CW.8.17)</p> <p>“Kalau jadwal kerja saya kan ngak bisa diganti mbak, jadi ya pinginya jadwal aja menyesuaikan dengan kita yang bekerja”(CW.4.17)</p> <p>“Kalau masalah jadwal kan saya ngak ada masalah, tapi kalau yang lain ada masalah mungkin aja nie bisa disesuaikan dengn yang lain dulu gitu”(CW.7.17)</p>	<p>“Ya jadwal mah disesuaikan aja sama PKBM menyesuaikan dengan yang kerja dan tutor”(CW.8.17)</p> <p>“Kalau jadwal kerja saya kan ngak bisa diganti mbak, jadi ya pinginya jadwal aja menyesuaikan dengan kita yang bekerja”(CW.4.17)</p> <p>“Kalau masalah jadwal kan saya ngak ada masalah, tapi kalau yang lain ada masalah mungkin aja nie bisa disesuaikan dengn yang lain dulu gitu”(CW.7.17)</p>	<p>Masalah jadwal biasanya PKBM sudah menyesuaikan dengan tutor dan warga belajar yang ada sehingga terjadi keselarasan yang baik.</p>

	ikut pembelajaran gitu aja”(CW.17.17)			
52.	<p>Bagaimana solusi untuk mengatasi peraturan pemerintah yang ada demi terlaksannya proses pembelajaran?</p> <p>NN:</p> <p>“Solusinya ya biasanya kita tetep jalan mbak, yang penting proses pembelajaran tetep berlangsung dengan baik saja.” (CW.1.31)</p> <p>IN:</p> <p>“Agar pembelajaran yang penting berlanjut maka sering kita mengabaikan peraturan dari pemerintah.” (CW.2.31)</p> <p>HW:</p> <p>“Mungkin bisa mengajukan sebuah saran agar peraturan pemerintah juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.” (CW.9.31)</p> <p>RA:</p> <p>“Mengikuti kebijakan yang ada mbak. Yang penting pembelajaran masih bisa berlangsung dengan lancar” (CW.19.31)</p> <p>AG:</p> <p>“Ya mengikuti peraturan saja mbak, sebisa mungkin untuk yang bisa dilaksanakan.” (CW.20.31)</p> <p>ZU:</p> <p>“Ya dilaksanakan semampu kita aja to mbak, paling tidak untuk administrasi dari pemerintah saja.” (CW.18.31)</p>	<p>“Mengikuti kebijakan yang ada mbak. Yang penting pembelajaran masih bisa berlangsung dengan lancar” (CW.19.31)</p> <p>“Solusinya ya biasanya kita tetep jalan mbak, yang penting proses pembelajaran tetep berlangsung dengan baik saja.” (CW.1.31)</p>	<p>“Mengikuti kebijakan yang ada mbak. Yang penting pembelajaran masih bisa berlangsung dengan lancar” (CW.19.31)</p> <p>“Solusinya ya biasanya kita tetep jalan mbak, yang penting proses pembelajaran tetep berlangsung dengan baik saja.” (CW.1.31)</p>	<p>Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah sebaiknya kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan sebagaimana mungkin kita menjalankan dengan sebaik-baiknya.</p>

## **CATATAN LAPANGAN I**

Hari Dan Tanggal : Senin, 9 Februari 2016

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Tempat : PKBM Permata

Deskripsi :

Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2016 peneliti datang ke PKBM Permata dan PKBM Kuncup Mekar untuk bertemu dengan para pengelola-pengelola PKBM. Peneliti dipersilahkan masuk diruang kerja kemudian menjelaskan maksud dan tujuan.

Peneliti dan pengelola PKBM Permata dan PKBM Kuncup Mekar selanjutnya berbincang mengenai jadwal PKBM dan kegiatan-kegiatan yang ada di setiap PKBM. Lebih rincinya beliau menjelaskan mengenai jadwal, tutor, warga belajar hingga sarana dan prasarana. Dengan begitu peneliti diizinkan dalam pengambilan data dan penelitain sesuai dengan subjek yang ada.

## **CATATAN LAPANGAN II**

Hari Dan Tanggal : Senin, 15 Februari 2016

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Kuncup Mekar

Deskripsi :

Peneliti berkunjung ke PKBM Kuncup Mekar, menemui pengelola PKBM Kuncup Mekar bertemu dengan Ibu Titin untuk melakukan pembahasan SPM yang akan diteliti di PKBM kuncup Mekar. Dalam hal ini Peneliti memberikan Instrumen SPM Pendidikan Non formal.

Dilanjutkan dengan perjanjian dan menyesuaikan jadwal untuk wawancara pada pertemuan selanjutnya.

### **CATATAN LAPANGAN III**

Hari Dan Tanggal : Kamis, 17 Februari 2016

Waktu : 14.00-16.00 WIB

Tempat : PKBM Permata

Deskripsi :

Peneliti berkunjung ke PKBM Permata untuk mencari data mengenai data-data SPM yang harus dilengkapi, peneliti disini bertemu dengan ibu Nana sebagai pengelola. Peneliti bermaksud melakukan wawancara dengan pengelola PKBM namun karena PKBM sedang ada acara yaitu sosialisasi mengenai kangker, sehingga wawancara diundur pada pertemuan selanjutnya.

Dalam pertemuan ini peneliti juga disarankan untuk mengikuti acara yang sedang dibuat oleh PKBM tersebut yaitu mengikuti acara sosialisasi tentang kangker. Bersama dengan masyarakat sekitar dan warga belajar yang ada peneliti mengikuti acara tersebut hingga selesai.

#### **CATATAN LAPANGAN IV**

Hari Dan Tanggal : Jum'at 19 Februari 2016

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang PNF, Dinas Pendidikan Kota Magelang

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang dengan tujuan mengurus surat izin penelitian di Dinas Pendidikan Kota Magelang. Setelah sampai di Dinas Pendidikan Kota Magelang, peneliti menemui staf tata usaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan apa yang akan dilakukan disana. Setelah melengkapi persyaratan untuk pengajuan surat izin penelitian yang ada peneliti disuruh kembali dalam kurun waktu tiga hari untuk mengetahui Disposisi pada bagian apa.

#### **CATATAN LAPANGAN V**

Hari Dan Tanggal : Senin, 22 Februari 2016

Waktu : Ruang Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Magelang

Tempat : 10.00-11.30 WIB

Deskripsi :

Peneliti hari ini bermaksud datang ke Dinas Pendidikan Kota untuk menanyakan mengenai surat disposisi untuk penelitian yang sudah diajukan. Namun ternyata ada kesalahan saat pemberian disposisi dari Dinas pendidikan kota sehingga harus menunggu beberapa jam untuk mengurus hal tersebut. Sambil menunggu Disposisi dari Kepala Dinas, peneliti menunggu di bagian PNF bertemu dengan Ibu Sarah di bagian Pengelolaan dan Kinerja PKBM.

Jam 10.40 Disposisi dibagian PNF sudah selesai sehingga bisa dilanjutkan dengan bertemu pimpinan PNF.

## **CATATAN LAPANGAN VI**

Hari Dan Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016

Waktu : 15.00-17.00 WIB

Tempat : PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Peneliti bermaksud hari ini untuk mengurus surat izin di PKBM Upaya terampil namun Pengelola dan tutor sedang ada acara di Purwakarta. Namun di PKBM Upaya Terampil Peneliti bertemu dengan tutor kursus Menjahit yang bernama Mbak Diroh, karena pengelola PKBM sedang berada diluar kota urusan PKBM mengenai pameran karya yang diselenggarakan oleh PP2 Paudni Semarang

Peneliti mendapat nomer dan jadwal yang diselenggarakan oleh PKBM Upaya Terampil.

## **CATATAN LAPANGAN VII**



Hari Dan Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016

Waktu : 15.30-17.00 WIB

Tempat : PKBM Kuncup Mekar

Deskripsi :

Peneliti mewawancarai dua tutor paket B setelah selesai Ujian Mid Semester untuk Paket B. Tutor bernama Kristanti, S.E mengajar Paket B pada mata pelajaran Sejarah sedangkan Joko Sutrisno, Ba mengajar Paket B pada mata pelajaran Matematika.

Dalam wawancara ini diperoleh informasi yang sanagt berguna bagi peneliti. Dan hari itu juga melakukan janji dengan turor yang lain untuk melakukan wawancara.

## **CATATAN LAPANGAN VIII**

Hari Dan Tanggal : Jumat, 26 Februari 2016

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Tempat : PKBM Permata dan PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Bertemu dengan pengelola dari PKBM permata bernama Mbak Zuma Ariana, S.Pd wawancara mengenai berbagai macam kendala yang dihadapi di PKBM. Berbagai masalah dan kendala yang ada sebenarnya sangat klasik.

Dilanjutkan dengan pengamatan warga belajar Paket B yang sedang melakukan pembelajaran mata pelajaran Matematika. Dapat diamati dalam pembelajaran dimulai dengan pembukaan, memberikan materi oleh tutor dan dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan dari tutor maupun warga belajar.

Waktu : 14.45-16.00 WIB

Tempat : PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Peneliti bermaksud menemui pengelola PKBM Upaya terampil untuk meminta izin penelitian. Peneliti bertemu dengan bu Ratna dan dipersilakan untuk melakukan penelitian dengan syarat-syarat yang ditentukan. Dilanjutkan dengan mengajukan pertemuan selanjutnya untuk mengatar pertemuan selanjutnya agar bisa melakukan pengamatan dan melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang ada.

## **CATATAN LAPANGAN IX**

Hari Dan Tanggal : Selasa, 1 Maret 2016

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Tempat : PKBM Kuncup Mekar

Deskripsi :

Peneliti bertemu dengan bu intang untuk mencari data warga belajar dan profil lembaga. Guna untuk melengkapi berbagai hal-hal yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : PKBM Permata

Deskripsi :

Peneliti bermaksud menemui Bu Nana untuk meminta data-data mengenai profil lembaga, dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Waktu : 11.00-12.00 WIB

Tempat : PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Peneliti bermaksud memenuhi semua persyaratan untuk penelitian di PKBM Upaya Terampil. Dilanjutkan dengan pengamatan warga belajar pukul 13.00-14.00 untuk menguatkan bahan-bahan penelitian yang ada.

## **CATATAN LAPANGAN X**

Hari Dan Tanggal : Jumat, 4 Maret 2016

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Tempat : PKBM Kuncup Mekar,

Deskripsi :

Jam 09.00 ke kuncup mekar

Jam 10.00 ke permata

Jam 11.00 Upaya termpil bertemu dengan Ibu Retna, mengenai hal-hal yang berkeaan dengan UAS untuk Paket B.

### **CATATAN LAPANGAN XI**

Hari Dan Tanggal : Senin, 07 Maret 2016

Waktu : 10.00-12.00 WIB

Tempat : Dinas Pendidikan

Deskripsi :

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala PNF Dinas Pendidikan Kota yaitu Bapak Sahid, S.Pd mengenai kebijakan SPM yang ada di Kota Magelang. Peraturan dalam SPM kota magelang dan Pembenahan dan beberapa yang harus diikutsertakan dalam berbagai hal pendidikan untuk mendukung pendidikan Non formal yang ada. Untuk mendukung data sesuai dengan wawancara yang ada peneliti di rujuk untuk menemui salah satu staff perencanaan bernama Mas Mahendra. Peneliti menemui mas Mahendra untu mencari data yang sudah diizinkan diambil oleh Pimpinan PNF Dinas Kota Magelang bapak Sahid, S.Pd

Pukul : 16.00-17.00 WIB

Tempat : PKBM Permata

Deskripsi :

Peneliti datang ke PKBM Permata karena suda janji dengan pengelola yang ada unuk elakukan pengambilan data mengenai warga belajar yang ada. Sehingga disana penelital bertemu dengan Rahma warga belajar paket B kelas VIII. Peneliti mengambil data dari sembel yang ada

## **CATATAN LAPANGAN XII**

Hari Dan Tanggal : Rabu, 9 Maret 2016

Waktu : 13.00-.1500 WIB

Tempat : PKBM Permata

Deskripsi :

Peneliti datang ke PKBM Permata untuk mengambil data mengenai SMP dengan sumber tutor yang ada disana. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan mengenai keterkaitan SPM dan yang lainnya. Tutor yang ada di sini sangat kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan dari peneliti. Hingga akhirnya diakhiri karena tutor sudah ada janji dengan yang lainnya ditempat yang lainnya

### **CATATAN LAPANGAN XIII**

Hari Dan Tanggal : Jumat, 11 Maret 2016

Waktu : 12.00-13.00 WIB

Tempat : PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Peneliti bertemu dengan tutor yang bernama bu Nadia dan Kak Lintang namun hanya mendapatkan beberapa wawancara yang belum selesai dan akan disambung dipertemuan selanjutnya.

#### **CATATAN LAPANGAN XIV**

Hari dan Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2016

Waktu : 14.00-14.40 WIB

Tempat : PKBM Kuncup Mekar

Deskripsi :

Peneliti datang untuk melakukan wawancara dengan warga belajar, namun warga belajar belum ada yang hadir, sehingga saat menunggu warga belajar yang ada peneliti mewawancarai tutor yang akan mengajar. Setelah selesai dengan tutor peneliti harus menunggu hingga proses belajar mengajar selesai dan bertemu dengan warga belajar bernama Tantri warga belajar keaksaraan paket B kelas IX. Wawancara sangat asik karena peneliti tidak secara langsung melakukan wawancaranya.

#### **CATATAN LAPANGAN XV**

Hari Dan Tanggal : Senin, 14 Maret 2016

Waktu : 11.30-12.10 WIB

Tempat : PKBM Permata



Deskripsi :

Peneliti bertemu dengan Bu Zumaroh, selaku pengelola yang ada di PKBM Permata. Untuk mengambil beberapa data yang ada, sehingga perlu diadakan beberapa wawancara singkat. Namun ada beberapa data yang belum lengkap sehingga bu Zumaroh menjanjikan untuk dikirim via email.

Pukul : 13.00-14.10 WIB

Tempat : PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Setelah pengambilan data dari PKBM Permata, peneliti langsung menuju ke PKBM Upaya Terampil karena jarak yang tidak terlalu jauh. Peneliti sudah janji dengan pengelola yaitu Bu Ratna untuk wawancara beberapa program dan hal-hal yang lain yang perlu dibahas untuk melengkapi data-data skripsi peneliti

## **CATATAN LAPANGAN XVI**

Hari dan Tanggal : Jumat, 18 Maret 2016

Waktu : 15.00-16.00 WIB

Tempat : PKBM Upaya Terampil

Deskripsi :

Peneliti mengambil sampel kembali di PKBM Upaya terampil dan bertemu dengan pak agus selaku pengelola PKBM Upaya Terampil. Dari hal tersebut peneliti mendapat data yang belum selesai pada penelitian yang sebelumnya oleh bu Ratna.

## Lampiran. Dokumentasi Foto



## Proses pembelajaran



## Ujian Kesetaraan Paket B



## Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal



Sosialisasi program PKBM



Tutor dan staf pengajar di PKBM Kuncup Mekar



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/0608/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/448/Kesbangpol/2016 tanggal 12 Februari 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : LAILA NUR ROSYIDAH
2. Alamat : TIRIP RT 02/RW 08, KEL. SUKODADI, KEC. BANDONGAN, KAB. MAGELANG, PROV. JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG
- b. Tempat / Lokasi : KOTA MAGELANG, PROV. JAWA TENGAH
- c. Bidang Penelitian : Pendidikan
- d. Waktu Penelitian : 15-03-2016 s.d. 30-04-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. Iis Prasetyo, M.M
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Maret 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Semarang, 15 Maret 2016

Nomor : 070/1909/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Walikota Magelang  
u.p. Kepala Badan Kesbangpol dan  
Linmas Kota Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0608/04.5/2016 Tanggal 15 Maret 2016 atas nama LAILA NUR ROSYIDAH dengan judul proposal STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DI KOTA MAGELANG, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWATENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. LAILA NUR ROSYIDAH.